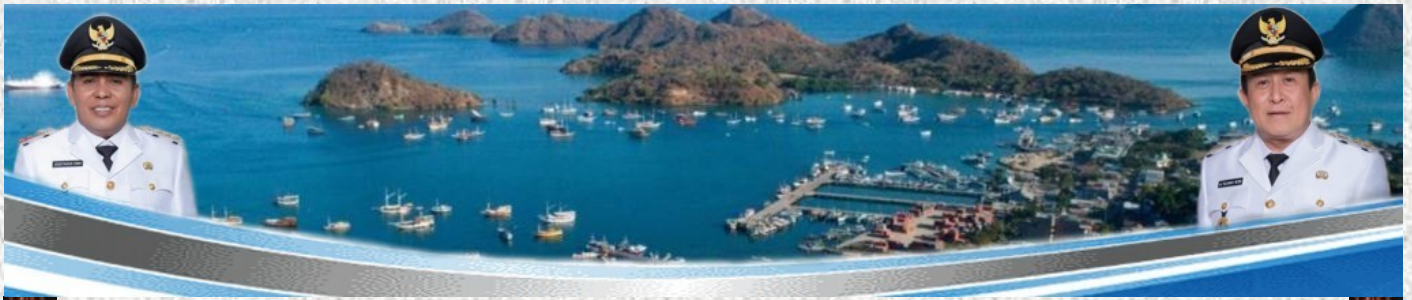




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)



**KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

LABUAN BAJO, 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Daniel Daeng Nabit – Labuan Bajo
Email : inspektorat_mabar@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Manggarai Barat untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ini .

Labuan Bajo, 28 Maret 2022

 Plt. Inspektur Daerah
Kabupaten Manggarai Barat 


Ismail Surdi, S.PKP
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198603 1 433

npwp.

KPP PRATAMA RUTENG

15.730.608.5-924.000

LAURENSIUS PANGUL

5315022801800003



KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BANDARA
KOMODO), GORONTALO, GORONTALO, KOMODO, KAB.
MANGGARAI BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR, 86654

08-02-2011



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepatutnyalah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat-Nya karena atas segala berkat, tuntunan dan bimbingan-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dapat disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LPPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 ini telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 69 dan Pasal 70 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ruang lingkup penulisan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang termuat dalam LPPD ini meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Lainnya serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) disertai dengan lampiran capaian indikator kinerja kunci (IKK).

Hasil dari setiap urusan yang menjadi kewenangan daerah maupun penyelenggaraan tugas pembantuan dapat diukur dari capaian indikator output dan outcome setiap kegiatan dan sub kegiatan yang hasil capaian tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun dalam rentang waktu tertentu.

Kebijakan anggaran yang sangat ketat sebagai dampak dari wabah virus covid – 19 ikut berpengaruh pada pencapaian kinerja perangkat daerah yang sudah ditetapkan indikator realisasi tetapi tidak dilaksanakan maupun rasionalisasi pencapaian target disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang pada tahun 2021 lebih berorientasi pada penanganan dan pencegahan wabah penyakit yang semakin mewabah, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan kelompok sasaran yang sangat terbatas dan tidak menjangkau semua kelompok masyarakat.



Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat menyadari bahwa capaian kinerja yang telah dilaksanakan belum menjawab semua kebutuhan dan tuntutan masyarakat, dan dalam rangka pencapaian yang lebih efektif dan berdaya saing, maka koreksi/ masukan oleh Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri atas substansi LPPD sangat diharapkan untuk perbaikan dan pembenahan.

Labuan Bajo, 30 Maret 2022

BUPATI MANGGARAI BARAT

EDISTASTIUS ENDI, SE

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
b. Data Demografis Wilayah.....	2
c. Jumlah Penduduk.....	3
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	5
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah..	5
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	8
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	8
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	8
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	18
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	36
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	76
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	90
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	103
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	103
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	103



2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	103
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	162
2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	173
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	176
a.	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	176
b.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.....	178
c.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	180
d.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	189
e.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	197
f.	Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Dan Kinerja	198
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	203
3.1	Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Manggarai Barat.....	203
3.2	Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Manggarai Barat.....	204
3.3	Permasalahan dan Kendala.....	213
3.4	Saran Dan Tindak Lanjut.....	213
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	214
BAB V	PENUTUP.....	242



1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Manggarai Barat menjadi sebuah daerah otonom dibentuk mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. TAP MPR RI Nomor: IV/MPR/1998 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 52 Tahun 2019; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintah Daerah tertanggal 6 Maret 2020, (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 288).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2).

b. Data Demografis Wilayah

Kabupaten Manggarai Barat terletak pada $08^{\circ} 14' \text{ LS}$ - $09^{\circ} 00' \text{ LS}$ dan $119^{\circ} 21' \text{ BT}$ - $120^{\circ} 20' \text{ BT}$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape

Luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas $10.000,47 \text{ km}^2$ dengan luas daratan $2.974,5 \text{ km}^2$ dan luas laut $7.052,97 \text{ km}^2$.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki topografi yang bervariasi dengan tingkat kemiringan $\pm 30^{\circ}$ dengan tingkat curah hujan sedang.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat terbagi atas 12 Kecamatan dan 169 desa/ kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

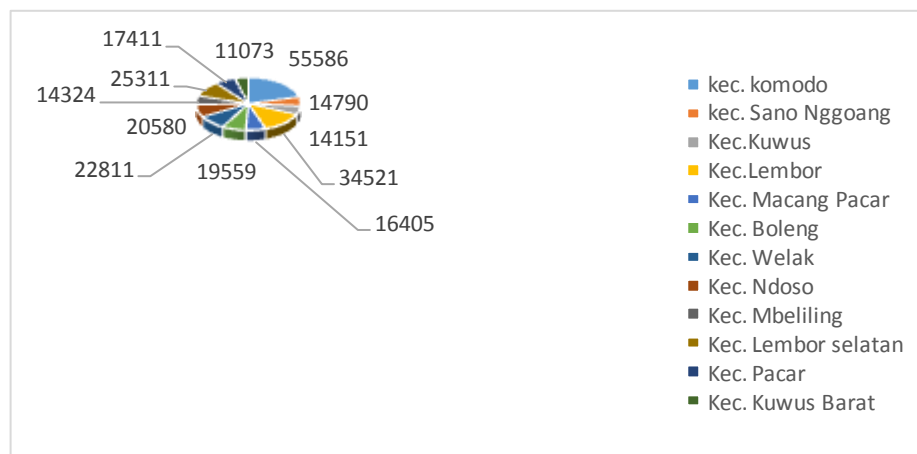
- 1) Kecamatan Komodo terdiri dari 17 Desa dan 2 Kelurahan
- 2) Kecamatan Sano Nggoang terdiri dari 15 Desa
- 3) Kecamatan Kuwus terdiri dari 2 Kelurahan dan 10 Desa
- 4) Kecamatan Lembor terdiri dari 1 Kelurahan dan 14 Desa
- 5) Kecamatan Macang Pacar terdiri dari 13 Desa
- 6) Kecamatan Boleng terdiri dari 11 Desa
- 7) Kecamatan Welak terdiri dari 16 Desa
- 8) Kecamatan Ndosso terdiri dari 15 Desa
- 9) Kecamatan Mbeliling terdiri dari 15 Desa
- 10) Kecamatan Lembor Selatan terdiri dari 15 Desa
- 11) Kecamatan Pacar terdiri dari 13 Desa

12) Kecamatan Kuwus Barat terdiri dari 10 Desa

c. Jumlah Penduduk.

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 266.522 jiwa dan 72.339 KK.
2. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 134.431 jiwa dan perempuan sebanyak 132.091 jiwa.
3. Komposisi penduduk menurut kecamatan:
 - a. Kecamatan Komodo sebanyak 55.586 jiwa
 - b. Kecamatan Sano Nggoang sebanyak 14.790 jiwa
 - c. Kecamatan Kuwus sebanyak 14.151 jiwa
 - d. Kecamatan Lembor sebanyak 34.521 jiwa
 - e. Kecamatan Macang Pacar sebanyak 16.405 jiwa
 - f. Kecamatan Boleng sebanyak 19.559 jiwa
 - g. Kecamatan Welak sebanyak 22.811 jiwa
 - h. Kecamatan Ndosso sebanyak 20.580 jiwa
 - i. Kecamatan Mbeliling sebanyak 14.324 jiwa
 - j. Kecamatan Lembor Selatan sebanyak 25.311 jiwa
 - k. Kecamatan Pacar sebanyak 17.411 jiwa
 - l. Kecamatan Kuwus Barat sebanyak 11.073 jiwa

Komposisi Penduduk Menurut Kecamatan.



Sumber Data: Agregat Kependudukan Semester II Th.2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat.

4. Komposisi penduduk menurut struktur usia.

1) 0 – 4	= 19.240 orang
2) 5 – 9	= 27.160 orang
3) 10 – 14	= 29.270 orang
4) 15 – 19	= 27.409 orang
5) 20 – 24	= 29.595 orang
6) 25 – 29	= 23.262 orang
7) 30 – 34	= 19.447 orang
8) 35 – 39	= 18.815 orang
9) 40 – 44	= 16.020 orang
10) 45 – 49	= 14.712 orang
11) 50 – 54	= 12.839 orang
12) 55 – 59	= 10.466 orang
13) 60 – 64	= 7.182 orang
14) 65 – 69	= 4.657 orang
15) 70 – 74	= 3.143 orang
16) ≥ 75	= 3.305 orang

5. Keadaan Penduduk menurut tingkat pendidikan.

Tidak Sekolah	: 5.461 orang
Belum Sekolah	: 29.281 orang
Belum Tamat SD/Sederajat	: 71.336 orang
SD/Sederajat	: 85.801 orang
SLTP/Sederajat	: 24.436 orang
SLTA/Sederajat	: 34.978 orang
Diploma I/II	: 1.220 orang
Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	: 2.863 orang
Diploma IV/Strata I	: 10.949 orang
Strata II	: 185 orang
Strata III	: 12 orang

6. Keadaan Penduduk berdasarkan Agama.

Islam	: 53.446 orang
Kristen	: 1.804 orang
Katholik	: 211.004 orang
Budha	: 18 orang
Hindu	: 243 orang
Konghuchu	: 2 orang
Lainnya	: 5 orang

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan/Desa/kelurahan	Jumlah
1.	Kecamatan	12
2.	Kelurahan	5
3.	Desa	164

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.

Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

I. SEKRETARIAT DAERAH

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- d. Asisten Administrasi Umum
- e. Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan
- f. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- g. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
- h. Bagian Pemerintahan
- i. Bagian Hukum

- j. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- k. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- l. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- m. Bagian Administrasi Pembangunan
- n. Bagian Organisasi
- o. Bagian Umum
- p. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah
- II. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- III. INSPEKTORAT DAERAH
- IV. DINAS DAERAH
 - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - e. Dinas Sosial
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - h. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - i. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - o. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 - q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - r. Dinas Perhubungan

- s. Dinas Komunikasi dan Informatika
- t. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

V. BADAN DAERAH

- a. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- b. Badan Pengelola Keuangan Daerah
- c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

VI. RUMAH SAKIT UMU DAERAH KOMODO

VII. KECAMATAN

- a. Kecamatan Komodo
- b. Kecamatan Lembor
- c. Kecamatan Lembor Selatan
- d. Kecamatan Kuwus
- e. Kecamatan Macang Pacar
- f. Kecamatan Boleng
- g. Kecamatan Mbeliling
- h. Kecamatan Welak
- i. Kecamatan Ndosu
- j. Kecamatan Sanon Nggoang
- k. Kecamatan Kuwus Barat
- l. Kecamatan Pacar

VIII. KELURAHAN

- a. Kelurahan Labuan Bajo
- b. Kelurahan Wae kelambu
- c. Kelurahan Tangge
- d. Kelurahan Nantal
- e. Kelurahan Golo Ru,u



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada APBD induk tahun anggaran 2021 ditargetkan Rp.1.252.277.476.341,00 dan setelah perubahan sebesar Rp.1.135.287.835.628,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp.1.089.722.465.552,77 atau sebesar 95,99% sedangkan target dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan pada APBD induk sebesar Rp.1.275.559.556.416,00 dan pada APBD Perubahan ditargetkan menjadi Rp.1.403.591.351.175,00 dan realisasi sebesar Rp.1.099.460.949.420,24 atau sebesar 78,33%.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah.

1. Bidang Sosial Budaya :

a. Pendidikan.

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015 sebesar 59,64 berada pada peringkat ke-15 dari 22 kabupaten/kota se-NTT dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 6,8 tahun dan Harapan Lama Sekolah sebesar 10,15 tahun lebih rendah dari capaian Propinsi NTT yakni 6,85 tahun untuk Rata-rata Lama Sekolah dan 12,65 tahun untuk Harapan Lama Sekolah;
- Penduduk berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2015 yang masih buta aksara sebanyak 14,70% atau 26.347 jiwa;
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD baru mencapai 99,57%. Sebanyak 0,43% atau 171 siswa usia 7-12 tahun yang belum menikmati pendidikan SD atau sederajat;Angka Partisipasi Murni tingkat SMP sebesar 84,63%. Sebanyak 15,37% atau 3.050 siswa usia 13-

15 tahun yang belum menikmati pendidikan SMP atau sederajat;

- Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah angka partisipasi sekolah. Angka Melanjutkan Sekolah dari jenjang SD ke SMP sebesar 94,76%; Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP ke SMA /SMK 84,8%; Dan dari SMA/SMK ke Perguruan Tinggi sebesar 38,54%;
- Proses Belajar Mengajar tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana sesuai standar SPM. Persentase ketersediaan ruang kelas layak menunjang proses belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan; SD 17% dalam kondisi rusak, SMP 11,8%, SMA 6%;
- Rasio Ruang kelas berbanding rombongan belajar juga belum memenuhi standar SPM dimana untuk jenjang SD/MI 1 : 1,23, jenjang SMP/MTs 1 : 1,14, dan SMA/MA 1 : 1,04 serta SMK 1 : 1,20;
- Persentase ketersediaan guru berkompeten (sesuai dengan kualifikasi pendidikan) masih rendah di setiap jenjang pendidikan ; SD 47% belum berijazah S1, SMP 20%, SMA 5,7%, SMK 7,4%;
- Komposisi Pendidikan penduduk 15 tahun ke atas didominasi oleh penduduk yang belum pernah sekolah/tidak tamat SD. BPS Manggarai Barat (2014) melaporkan penduduk yang belum pernah sekolah/tidak tamat SD sebanyak 26,13%, tamat SD sebanyak 34,64%, tamat SMP 20,92%, tamat SMA/SMK 13,73%, dan tamat Perguruan tinggi 4,58%;
- Organisasi pemuda yang aktif mencapai 32 organisasi dari 51 organisasi pemuda yang terdaftar atau masih 19 organisasi yang belum aktif.

b. Kebudayaan.

- Menurunnya kearifan lokal berbasis adat istiadat mewarnai perilaku sosial generasi muda;
- Belum maksimalnya pembinaan sanggar seni berbasis budaya lokal sebagai produk penunjang kepariwisataan.

c. Kesehatan.

- Rendahnya mutu pelayanan kesehatan dasar pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, karena rendahnya kualitas sarana prasarana yang belum memadai; Dari 18 Puskesmas, terdiri dari Puskesmas Rawat Inap 7 unit, Puskesmas Rawat Jalan 11 unit, Puskesmas PONEC 4 unit, Puskesmas Pembantu 31 unit, Pos Kesehatan Desa 54 unit;
- Tenaga Kesehatan : Dokter Spesialis 5 orang, Dokter umum 20, Dokter Gigi 8 orang, Perawat 339 orang, Bidan 205 orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 21 orang, Sanitarian 36 orang, Nutrisi 35 orang, analis 21 orang, Apoteker 14 orang, Perawat Gigi 25 orang, Tenaga Non Kesehatan/tenaga Administrasi 94 orang;
- Fasilitas sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Labuan Bajo belum memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal;
- Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita; Ibu: Tahun 2015, AKI sebesar 253,16/100.000 KH atau sebanyak 12 kasus, AKB sebesar 17,30/1000 KH atau 82 kasus, dan Angka Kematian Balita 4,47/1000 KH atau 10 kasus;
- Masih tingginya jumlah penderita gizi buruk. Tahun 2015 status gizi balita bergizi buruk 108 Balita (0,54%) dan bergizi Kurang 1.202 balita (6,05%);

- Masih tingginya prevalensi penyakit menular. Tahun 2015, Prevalensi Tuberkulosis sebanyak 204 kasus, Malaria 938 kasus, Demam berdarah 132 kasus;
- Sanitasi lingkungan perumahan tidak sehat, ditandai; (1) penduduk mengkonsumsi air minum bersih 37,72%, konsumsi air tidak layak minum 55,34%, dan konsumsi air kemasan 6,94%; (2) rumah yang memiliki jamban sendiri 58,10%, jamban bersama 16,06%, jamban umum 3,12%, tidak ada jamban 22,77%; (3) kondisi lantai rumah; keramik/semen 74,57%, tanah 28,43%; dinding rumah; tembok 20,81%, kayu 32,09%, bambu 39,91%, dan lain 7,18%;
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan berbasis masyarakat. Indikatornya adalah fungsionalisasi posyandu dan Desa Siaga. Tahun 2015, tercatat jumlah posyandu Purnama dan Mandiri yang aktif sebanyak 239 dari total 455 Posyandu; Desa Siaga sebanyak 98 yang Aktif atau 52%; Cakupan *Universal Child Immunization (UCI)* hanya 68,05% dari jumlah desa/kelurahan.

d. Keluarga Berencana.

Masih tingginya angka TFR (rata-rata melahirkan setiap wanita usia subur usia 15-49 tahun) sebesar 3,05, salah satu penyebabnya adalah presentase capaian peserta KB hanya 59.80% dari 40,119 Pasangan Usia Subur;

e. Pemberdayaan Perempuan.

- Belum tersedianya base line data bidang Pemberdayaan Perempuan untuk digunakan sebagai informasi perumusan kebijakan;
- Rata-rata kelompok binaan PKK tahun 2015 mencapai 3,2 dari 587 kelompok binaan yang tersebar di seluruh

kabupaten.

f. Kesejahteraan Sosial.

- Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I tahun 2015 sebanyak 37.457 Keluarga atau sebesar 70,74% dari jumlah keluarga;
- Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2015 mencapai 13,80%;
- Penurunan jumlah penduduk miskin belum signifikan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Penduduk miskin tahun 2012 sebesar 19,27%, dan tahun 2014 sebesar 17,10% dari total penduduk;

2. Bidang Ekonomi.

- a. Rendahnya pendapatan per kapita masyarakat yang berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat;
- b. Masih tingginya angka kemiskinan;
- c. **Investasi** belum optimal terutama terutama di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan infrastruktur pendukungnya;
- d. Mekanisme **perdagangan** kurang berpihak kepada petani di perdesaan, sempitnya jangkauan **pasar komoditas** pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan serta produk-produk hasil KUMKM Kabupaten Manggarai Barat;
- e. Rendahnya ekspor karena kualitas produk kurang sesuai dengan kualitas yang diinginkan pasar nasional dan internasional;
- f. Belum berdayanya **Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah** (KUMKM) sebagai salah satu penopang tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru;
- g. Pengembangan **agro industri** belum optimal dalam proses pengolahan hasil-hasil pertanian, peternakan,

- perikanan dan perkebunan;
- h. Pengembangan pada sistem pertanian masih bersifat parsial dan tradisional, belum berbasis manajemen Sistem Pertanian terpadu dengan pendekatan agribisnis utuh;
 - i. Produktivitas dan kualitas hasil pertanian masih rendah sebagai akibat belum meratanya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, rendahnya kualitas SDM dan kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian;
 - j. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air lainnya seperti danau/waduk untuk mengatasi kekurangan air untuk irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana;
 - k. Masih tingginya **pengangguran** karena terbatasnya persediaan lapangan kerja di luar sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
 - l. **Kualitas tenaga kerja** yang ada relatif masih rendah dibanding tuntutan dan kebutuhan pasar kerja;
 - m. Belum berkembangnya **industri kecil** dan menengah berbasis pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
 - n. Potensi wisata ekologis, budaya, wisata bahari, dan wisata alam (petualangan) dan wisata berbasis KUMKM di Kabupaten Manggarai Barat belum di gali dan di kembangkan menjadi daya tarik wisata yang optimal, efisien dan ekonomis;
 - o. Kondisi **infrastruktur** jalan sebagai urat nadi perekonomian daerah belum lancar menghubungkan sentra-sentra produksi dengan kota pemasaran;

3. Fisik Prasarana, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

- a. Sebagian besar topografi wilayah berbukit menyebabkan

- semakin besarnya investasi pembangunan infrastruktur jalan/jembatan dan tingginya biaya pemeliharaan akibat longsor dan banjir;
- b. Iklimbasah yang lama setiap tahun rata-rata 8 bulan basah dan hanya 4 bulan kering belum memberikan daya dukung bagi pengembangan budidaya pertanian, hortikultura, dan tanaman perdagangan lainnya;
 - c. Konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan dengan ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten belum lancar karena sebagian besar ruas jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan strategis berada dalam kondisi tidak mantap. Dari 1226,89 km jalan kabupaten, kondisi HRS sepanjang 42,69 km, Macadam 527,8 km, perkerasan (telford) 311,31 km, jalan tanah 345,09 km. Jumlah jembatan sebanyak 292 buah, dalam keadaan baik 68 buah, sedang 15 buah, rusak 22 buah, dan belum dibangun 187 buah;
 - d. Belum semua ibu kota kecamatan memiliki terminal angkutan barang dan jasa. Sampai 2015, baru 2 unit terminal yang dibangun yaitu terminal Nggorang (Type B) dan Terminal Lembor (Type C);
 - e. Sampai tahun 2015 dibangun 9 buah dermaga pelabuhan rakyat. Masih banyak daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil belum dibangun dermaga untuk meningkatkan transportasi barang dan orang melalui laut;
 - f. Masih rendahnya tingkat pertumbuhan tanaman untuk kegiatan rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan;
 - g. Kawasan penyangga dengan daya dukung lahan yang tersedia belum maksimal didayagunakan dengan tanaman perdagangan dan hortikultura bagi

- pengembangan pariwisata di kawasan utama pulau komodo dan sekitarnya;
- h. Rasio elektrifikasi perdesaan dan perkotaan belum mencapai target nasional. Sampai tahun 2015, rasio elektrifikasi mencapai 39,9%;
 - i. Masih cukup banyak wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan seluler untuk menunjang kegiatan ekonomi dan akses informasi di masyarakat;
 - j. Semakin meningkatnya investasi dan jumlah penduduk di kota Labuan Bajo dari tahun ke tahun sebagai pusat pertumbuhan kawasan strategis nasional diikuti dengan meningkatnya produksi sampah. Sampai tahun 2015, belum ada rencana induk penanganan persampahan terintegrasi. Keadaan sampai tahun 2015, produksi sampah mencapai 46.280 m³, yang ditangani 38.690 m³. Sisanya 7.590 m³ belum dikelola secara maksimal;
 - k. Sistem pembuangan air limbah domestik masih konvensional tanpa melalui pengolahan lebih lanjut sehingga air limbah domestik langsung dibuang ke kali atau sungai, drainase yang tentunya berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan;
 - l. Masih rendahnya pengawasan terhadap Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan serta AMDAL terhadap pembangunan berskala investasi besar;
 - m. Belum adanya sinkronisasi pemanfaatan ruang berdasarkan zonasi ruang antara Rencana Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
 - n. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terutama penguasaan- penguasaan tanah pada Kawasan inti dan Kawasan Penyangga Taman Nasional Komodo serta

Perlindungan dan Pelestarian Ekosistem Kawasan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan inti dan kawasan penyangga.

4. Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM)

- a. Belum optimalnya pengamanan aset pemerintah daerah antara lain lahan milik pemerintah daerah. Hal ini terlihat bahwa sampai dengan tahun 2015 baru 4,44% tanah milik pemerintah daerah yang telah bersertifikat;
- b. Meningkatnya jumlah pelanggaran PERDA dari tahun ke tahun. Tahun 2012 sebanyak 2 pelanggaran, dan tahun 2015 meningkat menjadi 5 pelanggaran;
- c. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih terjadi walaupun cenderung menurun, dan berdampak secara psikologis bagi korban kekerasan dan luntarnya kerukunan kehidupan keluarga. Tahun 2012 sebanyak 23 kasus, tahun 2013 sebanyak 18 kasus, tahun 2014 sebanyak 12 kasus, dan tahun 2015 sebanyak 13 kasus;
- d. Meningkatnya korban *human trafficking* di Indonesia terutama perempuan dan anak-anak akibat dari penyaluran tenaga kerja ilegal keluar negeri. Tahun 2015 pendampingan korban *human trafficking* oleh JPIC-SSPS sebanyak 30 kasus;
- e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian ekosistem Kawasan Taman Nasional Komodo terutama penguasaan penguasaan tanah pada Kawasan inti dan Kawasan penyangga Taman Nasional Komodo;
- f. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada lapangan kerja di sektor primer, sekunder, dan tersier pada tahun 2015 hanya mencapai 63,3%. Artinya, masih terdapat 36,7% penduduk usia kerja yang tidak bekerja;

5. Kelembagaan dan Aparatur Sipil Negara

- a. Rendahnya Kontribusi PAD terhadap pembentukan APBD; tahun 2012 5,5%, tahun 2013 6,4%, tahun 2014 7,5%, dan tahun 2015 8,5% dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1 %;
- b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur diindikasikan dengan 32,10% Aparatur Sipil Negara (ASN) berpendidikan SMA/SMK/ sederajat ke bawah. Selanjutnya, rincian komposisi pendidikan para ASN di kabupaten Manggarai Barat tahun 2015: (1) SD 25 orang; (2) SMP/ sederajat 22 orang; (3) SMA/SMK/ sederajat 1.336 orang; (4) Diploma 1, II, III sebanyak 1.337 orang; dan (4) D-IV dan S-1 1.569 orang, S-2 sebanyak 19 orang;
- c. Belum berkembangnya Penanaman Modal sebagai suplemen belanja pembangunan dari pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Sampai tahun 2015, jumlah badan usaha berinvestasi di Manggarai Barat yaitu 47 badan usaha, dengan jumlah investasi Rp.247.863.080.000,-;
- d. Belum optimalnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu; rata-rata pelayanan perizinan 20 hari/satu perijinan;
- e. Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas diri dari penduduk sebagai syarat bagi penduduk pencari kerja dan kebutuhan lainnya di masyarakat. Sampai tahun 2015, jumlah penduduk yang memiliki KTP sebesar 61,47%, penduduk yang memiliki akta kelahiran sebesar 46,53%, keluarga yang memiliki Kartu keluarga hanya 86,4% dari jumlah keluarga, dan pasangan nikah yang memiliki akte pernikahan hanya 18,86%.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dalam gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah, disajikan secara bersamaan Visi dan Misi Periode 2016 – 2021 dan Periode 2021–2026 karena Penyusunan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan tahun 2020 sebagai tahun ke-5 (lima) atau tahun terakhir RPJMD periode 2016–2021. Sedangkan untuk Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2021–2026 dimulai pada tahun 2021 sehingga dilakukan penyelarasan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dan rencana program atau kegiatan melalui RKPD perubahan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang menjadi pedoman dalam penyusunan KUA – PPAS Perubahan dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Adapun Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2021–2026 sebagai berikut:

1. Visi.

Visi Bupati Manggarai Barat Periode 2016-2021, yaitu:

Sebuah pendekatan baru dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat selama Tahun 2016-2021 adalah konsep **“Ramah”** dengan tiga dimensi pelayanan, yakni; **(1) Ramah Birokrasi; (2) Ramah Sosial; dan (3) Ramah Lingkungan.**

Ramah Birokrasi dimaksudkan performansi yang dinampakkan oleh para Aparatur Sipil Negara selama melakukan pelayanan. Para Aparatur Sipil Negara perlu memiliki knowledge, ketrampilan, dan kepercayaan diri sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Selama

pelayanan perlu mematuhi prosedur kerja (ketepatan, kecepatan), tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi, dan mutu layanan yang memuaskan masyarakat.

Ramah Sosial merupakan identitas masyarakat lokal dan modal sosial selama melakukan pelayanan tanpa membedakan suku, agama, gender, dan kaum marginal. Nilai-nilai sosial yang dimiliki masyarakat Manggarai Barat (sosial capital), semangat gotong royong, pelibatan masyarakat, keramahan, dan kepedulian sosial merupakan modal pembangunan menuju terwujudnya manusia yang berkualitas dari aspek fisik, psikis, moral, dan intelektualitas.

Ramah Lingkungan diimplementasikan ke dalam; (1) Ramah terhadap Sumber Daya Alam; dan (2) Ramah terhadap Fasilitas Umum. Konsepsi tentang Ramah Lingkungan adalah substansi dari empat pilar pembangunan guna pemenuhan kebutuhan ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan bagi pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.

Pengertian **"Manggarai Barat Maju"** sebagai tujuan mencapai tingkat peradaban yang lebih baik, lebih menjanjikan sebagai Daya Saing Daerah yang baru pada semua lini pembangunan.

Pengertian **"Manggarai Barat Sejahtera"** pada hakekatnya sebagai suatu filosofi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai tujuan akhir pembangunan adalah Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat harus didukung oleh **Peningkatan Kualitas Pelayanan**, maka segala instrumen terkait dengan Peningkatan Kualitas

Pelayanan akan menjadi perhatian serius selama tahun 2016-2021.

Berdasarkan alur pikir di atas, visi pemerintah kabupaten Manggarai Barat tahun 2016-2021 sebagai berikut:

**"MENUJU KABUPATEN MANGGARAI BARAT YANG
RAMAH, MAJU DAN SEJAHTERA".**

Rumusan visi dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan yang diharapkan dapat menyentuh pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat Manggarai Barat, yakni pemenuhan kebutuhan sosial budaya, ekonomi, tata ruang dan lingkungan hidup, kelembagaan birokrasi dan Aparatur Sipil Negara, hukum dan hak azasi manusia.

Visi Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026, yaitu:

"MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP".

Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut:

1. **Mabar Bangkit**, bagi masyarakat Indonesia, istilah atau kata "Bangkit" mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam. Ketika Bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan, para pahlawan sepakat untuk bersatu dan bangkit melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Dalam Konteks Visi tersebut, kata "Bangkit" dimaknai sebagai berikut:
 - a. **Bangkit** merupakan seruan dan ajakan untuk membangun kebulatan tekad bersama masyarakat Manggarai Barat untuk "*bangun dari tidurnya*" dan berjuang bersama melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pembangunan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam

pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi pertanian

- b. **Bangkit** juga dimaknai sebagai suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit juga sebuah ajakan bersama yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat Manggarai Barat untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan **semangat restorasi**. Semangat restorasi diharapkan membawa kerja keras seluruh komponen untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Manggarai Barat dalam berbagai dimensi pembangunan.

2. **MANTAP** merupakan singkatan dari Maju, Unggul, Tangguh dan Populer.

- a. **Mabar Mantap** mengandung pengertian sebuah sikap hati/keyakinan bersama dan optimism untuk menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah yang Maju, Unggul, Tangguh, dan Populer. Pembangunan daerah difokuskan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang merata, berkualitas dan memadai.
- b. **Mabar Mantap** juga bermakna terwujudnya kualitas SDM yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif, jujur, beretika dan berintegritas, sehingga mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan. Melalui Mabar Mantap, prioritas pembangunan akan diarahkan berdasarkan potensi

daerah setempat melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghubungkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada sektor pariwisata dan pertanian.

- c. **Mabar Mantap** juga memberi arti bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya berpihak pada seluruh lapisan masyarakat Manggarai Barat.

- 3. **Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap** menunjukkan tekad, semangat dan optimism bersama seluruh masyarakat Manggarai Barat menuju perubahan kearah yang lebih baik dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah guna mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam setiap dimensi pembangunan untuk **Masyarakat Manggarai Barat Yang Maju, Unggul, Tangguh dan Populer.**

2. Misi.

Misi Bupati Manggarai Barat Periode 2016-2021, yaitu:

- 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan dan Perlindungan Sosial ;
 - a. Meningkatkan Layanan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing.
 - 1) Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan;
 - Menyusun Regulasi bidang Pendidikan daerah

berbasis masalah di masyarakat dengan merujuk pada Sistem Pendidikan Nasional;

- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
- Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru, serta uji kompetensi;
- Menyediakan beasiswa bagi masyarakat miskin;
- Memperluas akses pendidikan non formal bagi anak putus sekolah.

2) Terwujudnya Generasi Muda yang Berprestasi dan Berdaya Saing.

- Membangun sarana dan prasarana olahraga dan pembinaan atlet berprestasi;
- Meningkatkan pembinaan organisasi pemuda, karang taruna, dan Pramuka.

b. Mewujudkan Layanan Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas

1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;

- Menyusun Regulasi bidang kesehatan daerah berbasis masalah di masyarakat sebagai pedoman umum kebijakan kesehatan;
- Meningkatkan Promosi dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi pada balita;
- Memperluas jangkauan pelayanan BPJS-Bidang Kesehatan ke seluruh masyarakat;
- Mengenalkan budaya hidup sehat sejak dini;
- Meningkatkan jumlah tenaga medis dan para medis ketentuan Permenkes 75 tahun 2014;

- Meningkatkan pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lanjut Usia yang Berkualitas.
- c. Meningkatkan Kesempatan Kerja bagi Masyarakat;
 - 1) Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja.
 - Menyusun Regulasi daerah bidang Ketenagakerjaan pedoman umum kebijakan ketenagakerjaan;
 - Memaksimalkan BLK, Menyediakan instruktur yang memiliki keahlian link match dengan kebutuhan pasar kerja; dan meningkatkan pelatihan tenaga kerja;
 - Penguatan lembaga perlindungan tenaga kerja.
- d. Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat;
 - 1) Menurunnya Angka Kemiskinan.
 - Meningkatkan advokasi dan kebijakan untuk pemenuhan hak-hak dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial, Keluarga miskin, bantuan peralatan kerja dan bantuan UEP/KUBE serta Padat Karya;
 - Meningkatkan jumlah Panti untuk menampung anak-anak terlantar/yatim piatu.
- e. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat;
 - 1) Meningkatnya Minat Baca Masyarakat.
 - Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan yang dijangkau oleh masyarakat pembaca.
 2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Agrowisata dan Agribisnis dengan Memanfaatkan Sumber Daya yang Tersedia, Sumber

Daya Manusia Berkualitas, Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan;

a. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan;

1) Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah;

- Mengidentifikasi potensi dan peluang destinasi pariwisata baru dengan fokus wisata ekologis, budaya, bahari dan petualangan;
- Meningkatkan Promosi Destinasi Wisata;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penataan daya tarik wisata;
- Mengembangkan agrowisata berbasis komoditas unggulan bidang pertanian, peternakan, perikanan perkebunan dan kehutanan;
- Mengembangkan aset budaya Manggarai;
- Identifikasi karakteristik desa wisata.

2) Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan pertanian;
- Penerapan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri);
- Peningkatan penyediaan sarana/prasarana pertanian;
- Pengembangan spesialisasi produk unggulan pertanian/ perkebunan berbasis desa;
- Pengembangan spesialisasi peternakan besar dan kecil berbasis desa;
- Pendataan masalah peternakan;

- Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik;
- Mengkaji daya dukung dan meningkatkan jumlah ternak;
- Pengembangan spesialisasi perikanan minapolitan berbasis desa;
- Peningkatan penyediaan sarana/prasarana penangkapan ikan;
- Memberdayakan kelompok tani, ternak dan nelayan;
- Peningkatan rasio jumlah penyuluh terhadap jumlah desa;
- Memberikan pelatihan secara berkala kepada penyuluh pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

3) Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN;

- Memfasilitasi kegiatan kerjasama investasi;
- Mengintensifkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi investasi;
- Mengkaji dan mengembangkan potensi PMD;
- Mengembangkan sistem pelayanan informasi perijinan secara elektronik.

b. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Mutu Pangan;

1) Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Keamanan Pangan.

- Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan;
- Memperbaiki infrastruktur, teknologi dan strategi distribusi pangan;
- Meningkatkan produksi produk olahan pangan non beras;
- Meningkatkan jumlah dan jenis produk

- pangan yang aman dan sehat;
- Menyusun dokumen kebijakan pangan (Rencana Induk Pangan), Peta Ketahanan dan Kerawanan pangan, NBM, dan SKPG secara berkala;
 - Meningkatkan pengawasan produk pangan.
3. Mengembangkan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Daerah yang Mendukung Pertumbuhan Sektor Riil dan Pelayanan Publik;
- a. Meningkatkan Akses Infrastruktur Jalan terhadap Fasilitas Pelayanan Publik, Perekonomian dan Daerah Tujuan Wisata;
 - 1) Meningkatkan Akses terhadap Infrastruktur Jalan.
 - Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan;
 - Pembukaan Jalan ke Sentra-Sentra Produksi dan Obyek Pariwisata.
 - b. Meningkatkan Akses Penyediaan Air Bersih dan Prasarana Penunjang Produksi Pertanian secara Partisipatif;
 - 1) Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - c. Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Akses Perumahan;
 - 1) Meningkatkan Akses Perumahan Layak Huni.
 - Penataan dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan;
 - Peningkatan Kualitas Lingkungan.
 - 2) Meningkatkan Akses Perumahan Layak Huni.

- Penyediaan Akses Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat.
- d. Mengembangkan Sistem Transportasi serta Layanan Komunikasi dan Informatika;
 - 1) Terwujudnya Sistem Transportasi yang Memadai;
 - Penyediaan Sarana Transportasi yang layak bagi Masyarakat;
 - Penyediaan Moda Transportasi Bagi Masyarakat.
 - 2) Meningkatnya Layanan Komunikasi & Informatika.
 - Penyediaan Akses Telekomunikasi yang layak bagi Masyarakat.
- 4. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - a. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
 - 1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik.
 - Melaksanakan Sosialisasi, Bimtek SAKIP dan LPPD;
 - Meningkatkan kompetensi aparatur;
 - Menyiapkan dokumen standar kompetensi manajerial;
 - Menyusun pedoman umum Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
 - Menyusun rencana pembangunan tepat

waktu;

- Menata manajemen sistem data dan informasi bagi pengambilan kebijakan pembangunan daerah;

Mengembangkan sistem penyusunan dokumen perencanaan berbasis elektronik.

5. Meningkatkan Kesadaran Hukum, Budaya Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan;

a. Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Budaya Politik;

1) Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat;

- Melakukan sosialisasi, advokasi produk hukum daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- Melaksanakan penegakan PERDA baik secara persuasif maupun represif dengan melibatkan pihak yang terkait;
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur Satpol. PP;
- Pembentukan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

2) Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat;

- Meningkatkan partisipasi partai politik, masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan sosial politik;

b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan;

1) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan.

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan

Misi Bupati Manggarai Barat Periode 2021-2026, yaitu:

Misi RPJMD merupakan rumusan yang menjadi representasi dari seluruh aspek pembangunan yang akan dijalankan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Manggarai Barat. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan Pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Penggerak Utama Ekonomi.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki karakteristik pariwisata yang unik dan memiliki keunggulan komparatif. Karakteristik tersebut ditopang dengan perhatian pemerintah pusat yang besar bagi pembangunan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Pembangunan pariwisata Manggarai Barat perlu dikerangkai dalam konsep pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan pariwisata yang inklusif tidak hanya digerakkan dan menggerakkan sector pariwisata sendiri, melainkan juga menjadi lokomotif utama atau pemicu (*trigger*) bagi pembangunan sector ekonomi lainnya. Pembangunan pariwisata yang inklusif digerakkan oleh lintas sektor dan sinergi berbagai pemangku kepentingan. Berpijak dari pembangunan yang inklusif, pembangunan pariwisata berkelanjutan juga dapat dijalankan, yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah, sekaligus mampu diterima dan diwarnai oleh budaya lokal dan membawa kesejahteraan masyarakat, serta tidak kalah

penting tetap membawa manfaat bagi kelestarian lingkungan.

Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Misi ini diarahkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Misi ini juga diarahkan untuk mempermudah keterjangkauan masyarakat *dalam* mendapatkan pelayanan dasar yang tanggap, cepat dan layak sehingga mampu memberikan jaminan berupa kesejahteraan dan rasa aman. Selain itu, Misi 2 juga menjadi upaya untuk menjalankan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, sehingga tidak terdapat ketimpangan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal.

Potensi ekonomi Manggarai Barat yang melimpah, antara lain berupa pertanian, peternakan, dan perikanan perlu dioptimalkan untuk membangun daya saing daerah. Pembangunan daya saing yang berbasis potensi *lokal* diharapkan semakin memperkuat struktur perekonomian daerah dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Perekonomian daerah yang kokoh juga ditopang oleh pelaku UMKM yang mampu menjaga eksistensi dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Selain itu, Manggarai Barat sebagai prioritas pembangunan nasional, terutama di bidang pariwisata, perlu direspon dengan membangun iklim investasi yang kondusif. Peningkatan investasi tetap diarahkan agar mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga gerak perekonomian Manggarai Barat yang semakin meningkat, beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas perekonomian, serta membuka aksesibilitas daerah-daerah perbatasan, pinggiran dan terisolir. Pembangunan infrastruktur dalam Misi 4 juga terkait peningkatan layak hunian, yang sekaligus memiliki sasaran khusus untuk ikut menjalankan upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni. Tidak kalah penting, Misi 4 juga mengarahkan derap pembangunan infrastruktur yang menopang aktivitas perekonomian tetap mampu menjaga kesesuaian dengan kebijakan tata ruang wilayah, menjaga daya dukung dan daya dukung lingkungan hidup, serta meningkatkan ketangguhan terhadap bencana.

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan

Melayani.

Kebijakan utama dalam menjalankan Misi 5 adalah penerapan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Penerapan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan dan akuntabel, dengan didukung sumberdaya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, system kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan di dalam Misi 5 juga terkait implementasi prinsip partisipasi publik dalam pembangunan yang semakin meningkat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Efektivitas pembangunan daerah juga ditopang dengan peningkatan keberdayaan desa. Oleh karena itu, Misi 5 juga memiliki prioritas untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan optimalisasi *pembangunan* desa melalui kelembagaan masyarakat desa yang kuat dalam mengelola potensi lokal desa.

Kelima rumusan Misi Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 perlu memiliki keterkaitan dengan Misi pembangunan Nasional dan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keterkaitan tersebut memberikan kerangka umum adanya sinergi perencanaan pembangunan antar level pemerintahan. Keterkaitan Misi Kabupaten Manggarai Barat dengan Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Misi Nasional sebagai berikut:

**Keterkaitan Antara Visi Kabupaten Manggarai Barat
dengan Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan
Visi Nasional**

RPJMN 2020-2024	RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026	RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023
Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, Berdaya Saing Misi 5: Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 1: Mengembangkan Pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Penggerak Utama Ekonomi	Misi 2: Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (<i>Ring of Beauty</i>)
Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, BerdayaSaing	Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Adil
Misi 3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Misi 4: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	Misi 3: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan
Misi 6: Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya Misi 7: Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Bagi pada Seluruh Warga	Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani	Misi 5: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Misi 8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya Misi 9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		
---	--	--

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.

Program pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Program pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut:

No.	Program Pembangunan Daerah	No.	Indikator Program	Target Capaian				Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal (2015)		Tahun Akhir (2021)			
1.	Program : Pendidikan Anak Usia Dini	1.	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	22,48%	Org	50%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
2.	Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI	113,50%	Org	100%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	88,30%	Org	100%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
3.	Program : Pendidikan Menengah	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	47,50%	Org	65%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI	99,60%	Org	100%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	84,60%	Org	98%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	46,90%	Org	61,90%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		5.	Angka Melanjutkan Sekolah dari Jenjang SD/MI ke SMP/MTs	94,70%	Org	100%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		6.	Angka Melanjutkan Sekolah dari Jenjang SMP/MTs ke SMA/MA	60,50%	Org	75%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		7.	Angka Melanjutkan Sekolah dari Jenjang SMP/MTs ke SMK	24,30%	Org	30%	Org	Pendidikan	Dinas PPO

4.	Program : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.	Persentase Sekolah yang Memiliki Perpustakaan					Pendidikan	Dinas PPO dan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
		2.	Jenjang SD/ MI	36,60%	Unit	43%	Unit	Pendidikan	Dinas PPO
		3.	Jenjang SMP/MTs	29,10%	Unit	48%	Unit	Pendidikan	Dinas PPO
		4.	Jenjang SMA/MA	63%	Unit	100%	Unit	Pendidikan	Dinas PPO
		5.	Jenjang SMK	20%	Unit	100	Unit	Pendidikan	Dinas PPO
5.	Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.	Persentase Siswa Miskin di SMP/MTs yang Mendapat Beasiswa	53%	Org	65%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
6.	Program : Pendidikan Menengah	1.	Persentase Siswa Miskin di SMA/MA/SMK yang Mendapat Beasiswa	2,40%	Org	5%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
7.	Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.	Rasio Ruang Kelas SD/MI terhadap Rombongan Belajar	1:1,23	Ruang	1:01	Ruang	Pendidikan	Dinas PPO
		2.	Rasio Ruang Kelas SMP/MTs terhadap Rombongan Belajar	01:01,1	Ruang	1:01	Ruang	Pendidikan	Dinas PPO
8.	Program : Pendidikan Menengah	1.	Rasio Ruang Kelas SMA/MA terhadap Rombongan Belajar	01:01,0	Ruang	1:01	Ruang	Pendidikan	Dinas PPO
		2.	Rasio Ruang Kelas SMK terhadap Rombongan Belajar	01:01,2	Ruang	1:01	Ruang	Pendidikan	Dinas PPO
9.	Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.	Persentase Sekolah Terakreditasi Minimal B						
		2.	Tingkat SD /MI	10,70%	Sekolah	13%	Sekolah	Pendidikan	Dinas PPO
		3.	Tingkat SMP/ MTs	12,30%	Sekolah	15%	Sekolah	Pendidikan	Dinas PPO
		4.	Tingkat SMA/ MA	11,10%	Sekolah	15%	Sekolah	Pendidikan	Dinas PPO

		5.	Tingkat SMK	10%	Sekolah	14%	Sekolah	Pendidikan	Dinas PPO
10.	Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.	Persentase Siswa Kejar Paket B	1,36%	Org	2%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
11.	Program : Pendidikan Menengah	1.	Persentase Siswa Kejar Paket C	1,79%	Org	2%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
12.	Program : Pendidikan Non Formal								
13.	Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.	Jumlah Penerima Beasiswa bagi Siswa Berprestasi pada Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
		2.	Jenjang SD/ MI	0	Org	3	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		3.	Jenjang SMP/ MTs	0	Siswa	4	Org	Pendidikan	Dinas PPO
14.	Program : Pendidikan Menengah	1.	Jumlah Penerima Beasiswa bagi Siswa Berprestasi pada Pendidikan Menengah						
		2.	Jenjang SMA/ MA	0	Org	9	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		3.	Jenjang SMK	0	Org	7	Org	Pendidikan	Dinas PPO
15.	Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.	Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Lainnya	0	Buah	4	Buah	Pendidikan	Dinas PPO
		2.	Jumlah Siswa yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri	40	Org	80	Org	Pendidikan	Dinas PPO
16.	Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.	Persentase Siswa SMP/MTs dengan Nilai Rata-rata Sama dengan atau lebih Tinggi dari Standar Nasional	13%	Org	20%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
17.	Program : Pendidikan Menengah	1.	Persentase Siswa SMA/MA/SMK dengan Nilai Rata-rata Sama dengan atau lebih Tinggi dari Standar Nasional	13%	Org	20%	Org	Pendidikan	Dinas PPO

18.	Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.	Persentase Jumlah Guru Memiliki Sertifikasi Guru Jenjang SD/MI	18,99%	Org	25%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		2.	Persentase Jumlah Guru Memiliki Sertifikasi Guru Jenjang SMP/MTs	24,30%	Org	34%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		3.	Persentase Jumlah Guru Memiliki Sertifikasi Guru Jenjang SMA/MA	43,40%	Org	65%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		4.	Persentase Jumlah Guru Memiliki Sertifikasi Guru Jenjang SMK	32,70%	Org	65%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		5.	Persentase Guru Berpendidikan S-1 Jenjang SD/MI	53%	Org	85%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		6.	Persentase Guru Berpendidikan S-1 Jenjang SMP/MTs	79,90%	Org	100%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		7.	Persentase Guru Berpendidikan S-1 Jenjang SMA/MA	94,67%	Org	100%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		8.	Persentase Guru Berpendidikan S-1 Jenjang SMK	92,50%	Org	100%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		9.	Persentase Sekolah Memiliki Laboratorium Jenjang SMP/MTs	19%	Sekolah	36%	Sekolah	Pendidikan	Dinas PPO
		10.	Persentase Sekolah Memiliki Laboratorium Jenjang SMA/MA/SMK	95%	Sekolah	100%	Sekolah	Pendidikan	Dinas PPO
		11.	Jumlah Sekolah Memiliki Asrama Sekolah	8	Unit	15	Unit	Pendidikan	Dinas PPO
19.	Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.	Jumlah Penghargaan bagi Siswa Lomba Bidang Studi Kabupaten	1	Buah	2	Buah	Pendidikan	Dinas PPO
20.	Program : Pendidikan Menengah	1.	Jumlah Centre MIPA	0	Buah	1	Buah	Pendidikan	Dinas PPO
		2.	Persentase Guru Mengikuti Diklat Jenjang SD/MI	11,20%	Org	21,80%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		3.	Tersedianya Guru Mengikuti Diklat Jenjang SMP/MTs	12,76%	Org	20,90%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
		4.	Tersedianya Guru Mengikuti Diklat Jenjang SMA/MA	13,25%	Org	21,90%	Org	Pendidikan	Dinas PPO



		5.	Tersedianya Guru Mengikuti Diklat Jenjang SMK	6,51%	Org	15,80%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
21.	Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.	Jumlah Guru Mendapatkan Penghargaan	0	Org	2	Org	Pendidikan	Dinas PPO
22.	Program : Pendidikan Menengah	1.	Jumlah SMK Melakukan Praktek Kerja Industri	1	Sekolah	10	Sekolah	Pendidikan	Dinas PPO
23.	Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.	Persentase Guru Berkeahlian Khusus	1%	Org	2%	Org	Pendidikan	Dinas PPO
24.	Program: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun; dan Program : Pendidikan Menengah	1.	Persentase Pengelolaan Dana BOS sesuai Juknis	100%	Sekolah	100%	Sekolah	Pendidikan	Dinas PPO
25.	Program : Pendidikan Luar Biasa	1.	Persentase Pengelolaan Dana BOS sesuai Juknis	100%	Sekolah	100	Sekolah	Pendidikan	Dinas PPO
26.	Program : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.	Jumlah Perpustakaan Berbasis Masyarakat	0	Unit	15	Unit	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
		2.	Jumlah Perpustakaan Model	0	Unit	100	Unit	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
		3.	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	1.959	Org	6.000	Org	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
		4.	Jumlah Pustakawan	0	Org	120	Org	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
		5.	Persentase Pembinaan ke Perpustakaan	0%	Perpustakaan	100%	Perpustakaan	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
27.	Program : Pembinaan Olahraga pada Cabang-cabang Olahraga Unggulan	1.	Jumlah Atlet Berprestasi	0	Org	2	Org	Pemuda dan Olahraga	Dinas PPO
28.	Program : Peningkatan sarana Prasarana Olahraga	1.	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga terhadap Penduduk	0,35625	Sarana	0,180556	Sarana	Pemuda dan Olahraga	Dinas PPO



29.	Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.	Jumlah Organisasi Kepemudaan	51	Organisasi	70	Organisasi	Pemuda dan Olahraga	Dinas PPO
30.	Program : Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi	n/a	Org	0,60%	Org	Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
31.	Program : Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih	0,98%	Org	0,3 %	Org	Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.	Jumlah Tenaga Instruktur/Profesional	0	Org	10	Org	Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
32.	Program : Peningkatan Kesempatan Kerja	1.	Persentase Informasi Bursa Tenaga Kerja	0%	Perusahaan	35,80%	Perusahaan	Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.	Persentase Tenaga Kerja Siap Kerja	0%	Org	0,60%	Org	Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3.	Persentase Angkatan Kerja	62,97	Org	64,12	Org	Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
33.	Program : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1.	Persentase Perusahaan yang Menerapkan UMR	35,80%	Perusahaan	50%	Perusahaan	Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.	Persentase Perselisihan antara Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Tertangani	100%	Perselisihan	100%	Perselisihan	Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
34.	Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.	Persentase Desa Mendapatkan UCI	68%	Desa/Kel	80%	Desa/Kel	Kesehatan	Dinas Kesehatan
35.	Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.	Persentase Posyandu aktif (Purnama dan Mandiri)	52,50%	Posyandu	72,21%	Posyandu	Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Kesehatan dan BPMPD
		2.	Persentase Balita Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	78,52%	Org	95%	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan



		3.	Persentase Jumlah Rumah Tunggu di Pusat Pelayanan Kesehatan	66,60%	Unit	100%	Unit	Kesehatan	Dinas Kesehatan
36.	Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.	Persentase Desa Siaga Aktif	52%	Desa/Kel	100%	Desa/Kel	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan BPMPD
37.	Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							Pemberdayaan Masyarakat Desa	BPMPD
38.	Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.	Persentase UKS pada Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	0%	Sekolah	100%	Sekolah	Kesehatan	Dinas Kesehatan
39.	Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.	Cakupan KK Menerapkan STBM	n/a	KK	Meningkat	KK	Kesehatan	Dinas Kesehatan
40.	Program : Upaya Kesehatan Masyarakat	1.	Persentase Puskesmas Terakreditasi di Setiap Kecamatan	0%	Puskesmas	100%	Puskesmas	Kesehatan	Dinas Kesehatan
41.	Program : Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1.	Jumlah Puskesmas	18	Unit	21	Unit	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2.	Persentase Puskesmas Rawat Inap	38,80%	Unit	47,61%	Unit	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3.	Jumlah Puskesmas PONED	4	Unit	10	Unit	Kesehatan	Dinas Kesehatan
42.	Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.	Persentase Puskesmas yang Memiliki Jumlah SDM Kesehatan sesuai Ketentuan Permenkes 75 Tahun 2014	11,10%	Puskesmas	100%	Puskesmas	Kesehatan	Dinas Kesehatan
43.	Program : Perbaikan Gizi Masyarakat	1.	Persentase Remaja Putri Mendapat Mikronutrien	0	Org	Meningkat	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2.	Persentase Bumil KEK mendapat PMT	100%	Org	100%	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3.	Persentase Keluarga Sadar Gizi	80%	Keluarga	80%	Keluarga	Kesehatan	Dinas Kesehatan
44.	Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	69,70%	Org	85	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2.	Jumlah Kematian Ibu	12	Org	Menurun	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3.	Jumlah Kematian Bayi	82	Org	Menurun	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		4.	Jumlah Kematian Balita	10	Org	Menurun	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan

		5.	Persentase Capaian K1	81,10%	Org	95%	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		6.	Persentase Capaian K4	79,40%	Org	95%	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
45.	Program : Perbaikan Gizi Masyarakat	1.	Cakupan Penanganan Gizi Buruk dan Gizi Kurang	100%	Org	100%	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2.	Cakupan Penanganan Balita Stunting (Pendek) terhadap Total Balita	1,80%	Org	Menurun	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
46.	Program : Kesehatan Reproduksi Remaja	1.	Jumlah Sekolah (SMP/SMA) yang telah Membentuk PIK KR	15	Sekolah	30	Sekolah	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPPA dan KB, dan Dinas Kesehatan
47.	Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.	Persentase Kesembuhan Penderita TBC dari Penderita yang Selesai Pengobatan	97,4	Org	97,4	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2.	Cakupan Penemuan Penderita HIV	14	Org	Meningkat	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan KPA
		3.	API (Annual Parasit Insindece) Malaria	4/1000	Org	2/1000	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		4.	Prevalensi Hipertensi	0,05	Org	Menurun	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5.	Prevalensi Rabies	0	Org	0	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
48.	Program : Peningkatan Kapasitas SDM	1.	Jumlah Tenaga Medis pada Fasilitas Kesehatan	n/a	Org	n/a	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2.	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya pada Fasilitas Kesehatan	n/a	Org	n/a	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3.	Jumlah Tenaga non Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	n/a	Org	n/a	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		4.	Persentase Puskesmas dan RS Memiliki Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 dan Permenkes 56 Tahun 2014	n/a	Unit	55,50%	Unit	Kesehatan	Dinas Kesehatan
49.	Program : Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.	Persentase Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100%	Obat	100%	Obat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
50.	Program : Pengawasan Obat dan Makanan	1.	Persentase Pemantauan Obat dan Makanan	100%	Unit	100%	Unit	Kesehatan	Dinas Kesehatan

51.	Program : Upaya Kesehatan Masyarakat	1.	Persentase Masyarakat Miskin Memiliki Jaminan Kesehatan	n/a	Org	100%	Org	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2.	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah yang Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan	100%	Unit	100%	Unit	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3.	Persentase ketersediaan tenaga medis sesuai standar RS Kelas C	0%	Org	100%	Org	Kesehatan	RSUD Komodo
		4.	Persentase ketersediaan tenaga Paramedis dan tenaga penunjang kesehatan sesuai standar RS Kelas C	0%	Org	100%	Org	Kesehatan	RSUD Komodo
		5.	Persentase Obat yang dilayani di IFRS atau Apotek kerjasama RS	0%		100%		Kesehatan	RSUD Komodo
		6.	RSUD Terakreditasi	0%	Unit	100%	Unit	Kesehatan	RSUD Komodo
52.	Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	1.	Persentase Tahap pembangunan RS sesuai rekomendasi Master Plan 2015	0%		100%		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2.	Persentase ketersediaan dokumen dan regulasi RSUD sebagai BLUD	0%	Dokumen	100%	Dokumen	Kesehatan	RSUD Komodo
		3.	Persentase Ketersediaan Regulasi terkait SKD	0%	Regulasi	100%	Regulasi	Kesehatan	Dinas Kesehatan
53.	Program : Keluarga Berencana	1.	Persentase Contraceptive Prevalensi Rate terhadap PUS	60,59%	PUS	66,50%	PUS	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPPA dan KB
		2.	Persentase Penggunaan MKJP (Medis Kontrasepsi Jangka Panjang)	28,37%	PUS	34,50%	PUS	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPPA dan KB
54.	Program : Keluarga Berencana	1.	Persentase Unmet Need	15,33%	PUS	9,50%	PUS	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPPA dan KB
55.	Program : Pelayanan Kontrasepsi	1.	Persentase Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (DO)	22%	PUS	15%	PUS	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPPA dan KB
56.	Program : Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	1.	Angka ASFR (Average Specific Fertility Rate) per 1.000 Wanita Usia Subur (WUS)	48	WUS	42	WUS	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPPA dan KB

57.	Program : Kesehatan Reproduksi Remaja	1.	Jumlah Sekolah (SMP/SMA) yang telah Membentuk PIK KR	15	Unit	30	Unit	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPPA dan KB
58.	Program : Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	1.	Jumlah Kelompok PIK KR Yang telah mendapat media genre kit	15	Kelompok	30	Kelompok	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPPA dan KB
		2.	Rasio PKB/PLKB (1 orang : 2 desa) sesuai Standar Nasional	1 Orang : 1.56 Desa		1 Orang : 2 Desa		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPPA dan KB
		2.	Rasio PPKBD (1 orang : 1 desa)	0.78		1		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPPA dan KB
59.	Program : Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	1.	Persentase Anggota UPPKS ber-KB	76%	Keluarga	87%	Keluarga	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPPA dan KB
60.	Program : Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	1.	Persentase Desa/Kelurahan Yang telah mempunyai pengurus PKK dan menjalankan program PKK	55,50%	Desa/Kel	100%	Desa/Kel	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PKK dan BPPPA dan KB
		2.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	3,30%	Kelompok	7,60%	Kelompok	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PKK
61.	Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	1.	Ketersediaan Dokumen Base Line Perempuan yang Dibutuhkan Daerah (Data Terpilah Gender)	Belum Ada	Dokumen	Ada	Dokumen	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA dan KB
62.	Program : Kesenjangan Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1.	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	81%	Org	88%	Org	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA dan KB
63.	Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	1.	Persentase Perempuan dalam Lembaga Pemerintah	34,12%	Org	35,50%	Org	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA dan KB

		2.	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	3,33%	Org	6,67%	Org	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA dan KB
		3.	Persentase Perempuan di Lembaga Swasta	43,40%	Org	46,50%	Org	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA dan KB
64.	Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.	Persentase Pekerja Anak di bawah Umur	0,06%	Org	0,03%	Org	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA dan KB
65.	Program : Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1.	Persentase Penduduk Miskin	17,20%	Org	10-12%	Org	Sosial, PEMERINTAHAN UMUM	Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Bagian KESRA
		2.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	3,97%	Indeks	2,50%	Indeks	Sosial	Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3.	Indeks Keparahan Kemiskinan	1,31%	Indeks	1,02%	Indeks	Sosial	Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		4.	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan	82,80%	Org	89%	Orang	Sosial	Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
66.	Program : Pembinaan Anak Terlantar	1.	Persentase Penanganan Anak Terlantar	9,46%	Org	100%	Org	Sosial	Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
67.	Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS	1.	Persentase Penanganan Fakir Miskin	43,31%	Org	80%	Org	Sosial	Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
68.	Program : Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	1.	Persentase Penanganan Anak Penyandang Cacat dan Lansia Terlantar	2,97%	Org	Meningkat	Org	Sosial	Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
69.	Program : Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo								

70.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	1.	Luas lahan Produksi Pertanian (Ha)						
		2.	Luas lahan Produksi Tanaman Pangan (Ha)	32.867	Ha	34.200	Ha	Pertanian	DPP
		3.	Luas lahan Produksi Tanaman Perkebunan (Ha)	28.086,5	Ha	29.100,0	Ha	Pertanian	DPP
71.	Program peningka Tan Produksi pertanian/perkebunan	1.	Jumlah produktivitas tanaman pangan/perkebunan/hortikultura						
		2.	Jumlah produktivitas tanaman pangan (12.300 Ha)	1,932	Ton/Ha	3,543	Ton/Ha	Pertanian	DPP
		3.	Jumlah produktivitas tanaman Perkebunan (1.250 Ha)	355	Ton/Ha	1.580	Ton/Ha	Pertanian	DPP
		4.	Jumlah produktivitas tanaman Hortikultura (256 Ha)	1.116	ton/ha	1.372	ton/ha	Pertanian	DPP
72.	Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan	1.	Panjang jalan pertanian yang dibangun dan yang ditingkatkan	5	km	10	km	Pertanian	DPP
		2.	Jumlah DAM parit /embung yang dibangun	56	unit	106	unit	Pertanian	DPP
		3.	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun/direhab	29	Unit	79	unit	Pertanian	DPP
		4.	Jumlah P3A/GP3A yang terbentuk dan berbadan hukum	30	klpk	60	klpk	Pertanian	DPP
73.	Program peningkatan kesejahteraan petani	1.	Jumlah Poktan yang menerapkan Simantri terintegrasi Jagung (10 Ha) dengan ternak ayam kampung	-	Poktan	5	Poktan	Pertanian	DPP
		2.	Jumlah Poktan yang menerapkan Simantri terintegrasi Padi Sawah (100 Ha) dengan ternak Sapi	-	Poktan	5	Poktan	Pertanian	DPP
74.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1.	Jumlah ALSINTAN yang tersedia	392	unit	442	unit	Pertanian	DPP
75.	Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan	1.	Jumlah obat2an pengendalian hama/ penyakit yang tersedia	1.460	ltr/kg	7.500,0	ltr/kg	Pertanian	DPP

76.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.	Jumlah Populasi Ternak	232.420	ekor	342.459	ekor	Pertanian	Dinas Peternakan (Disnak)
		2.	Jumlah sarana dan Prasarana yang tersedia						
		a.	Ternak Besar	-	Paket	25	paket	Pertanian	Disnak
		b.	Ternak Kecil	-	Paket	25	paket	Pertanian	Disnak
		c.	Unggas	-	Paket	25	paket	Pertanian	Disnak
		3.	% peternak atau kelompok ternak yang mendapat insentif	-	%	10	%	Pertanian	Disnak
77.	Program Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	1.	Jumlah Desa Spesialisasi Komoditas Kehutanan (hasil hutan kayu dan non kayu)	-	Desa	10	Desa	Kehutanan	Dinas Kehutanan (Dishut)
78.	Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	1.	Jumlah desa / kampung spesialisasi produk unggulan pertanian/perkebunan	-	Ds/Kpg	12	Ds/Kpg	Pertanian	DPP
		2.	Jumlah benih tanaman pangan unggul berlabel	100	Ton	300	Ton	Pertanian	DPP
		3.	Jumlah (jenis) komoditas/produk (benih) unggulan berlabel	2	Jenis	3	Jenis	Pertanian	DPP
79.	Program Peningkatan produksi hasil peternakan	1.	Jumlah poktan spesialisasi ternak unggulan daerah	-	Poktan	174	Poktan	Pertanian	Disnak
80.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	1.	% kelompok peternak yang menggunakan teknologi tepat guna	7,1	%	100	%	Pertanian	Disnak
		2.	Jumlah ternak hasil Inseminasi Buatan (IB)	-	ekor	350	ekor	Pertanian	Disnak
		3.	Demplot ternak sapi	-	Demplot	1	Demplot	Pertanian	Disnak
81.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1.	% pencegahan masuknya penyakit hewan menular baru	-	%	-	%	Pertanian	Disnak

		2.	% ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan	100	%	100	%	Pertanian	Disnak
		3.	% ternak yang divaksinasi (AT, SE, Rabies, ND)	50	%	100	%	Pertanian	Disnak
		4.	% Ternak antar pulau yang diawasi dan diberikan pelayanan kesehatan hewan	100	%	100	%	Pertanian	Disnak
		5.	jumlah pengawasan produk2 asal ternak yang beredar di pasaran	12	Kali	120	kali	Pertanian	Disnak
		6.	Jumlah pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet	500	sampel	2.500	sampel	Pertanian	Disnak
		7.	% pengendalian rabies	80	%	100	%	Pertanian	Disnak
		8.	Jumlah kasus positif rabies pada HPR	2	Ekor	-	Ekor	Pertanian	Disnak
		9.	%peningkatan sarana dan prasarana laboratorium keswan	60	%	100	%	Pertanian	Disnak
82.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.	%Pendataan dan identifikasi ternak besar dan kecil	-	%	100	%	Peternakan	Disnak
		2.	Jumlah UPTD Pembibitan Ternak	-	paket	2	paket	Peternakan	Disnak/Tapem
		3.	Jumlah kontes ternak yang diikuti	-	kali	5	kali	Peternakan	Disnak
		4.	Jumlah arena pacuan kuda yang terbangun	-	arena	1	arena	Peternakan	Disnak/Tapem
83.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1.	Jumlah kelompok pengolahan hasil ternak yang terlatih	1	Kelompok	6	Kelompok	Peternakan	Disnak
		2.	Jumlah kelompok pendampingan pengolahan hasil ternak	-	Kelompok	5	Kelompok	Peternakan	Disnak
		3.	Jumlah keikutsertaan PEDTA/PENAS/HPS/Promosi/Expo	-	kali	12	kali	Peternakan	Disnak
84.	Program pengembangan perikanan tangkap	1.	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan sarana penangkapan ikan	1	Kelompok	12	Kelompok	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan Perikanan (DKP)

		2.	% rehabilitasi sarana dan prasarana TPI	40	%	100	%	Kelautan dan Perikanan	DKP
85.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.	Jumlah poktan pembudidaya ikan air tawar (minapadi)	0	poktan	40	poktan	Kelautan dan Perikanan	DKP
		2.	Jumlah kelompok pembudidaya ikan air tawar	5	Kelompok	17	Kelompok	Kelautan dan Perikanan	DKP
		3.	% pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana BBI	35	%	100	%	Kelautan dan Perikanan	DKP
86.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	1.	Jumlah kelompok penerima sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	23	Kelompok	43	Kelompok	Kelautan dan Perikanan	DKP
		2.	Jumlah Depo yang dibangun	0	Depo	1	Depo	Kelautan dan Perikanan	DKP/Perindagkop/ Tapem
		3.	Jumlah kelompok yang terlatih	0	Kelompok	20	Kelompok	Kelautan dan Perikanan	DKP
87.	Program Pengembangan Produk Hasil Perikanan	1.	% sarana dan prasarana mutu hasil perikanan	0	%	100	%	Kelautan dan Perikanan	DKP
88.	Program Peningkatan Kerja sama Perdagangan Internasional	1.	Jumlah dokumen kerja sama	0	Dok	5	Dok	Perdagangan	Prindagkop & UKM
		2.	% kenaikan ekspor	0	%	100	%	Perdagangan	Prindagkop & UKM
		3.	Jumlah Misi Dagang	0	Kali	5	Kali	Perdagangan	Prindagkop & UKM
89.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.	Jumlah Gapoktan menjadi Koperasi	6	Koperasi	36	Koperasi	Koperasi dan UKM	Perindagkop & UKM
90.	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan	1.	Penguatan Kelembagaan Kelompok Peternakan						
		a.	Jumlah sarana/prasarana pemasaran Hewan hidup	-	unit	1	unit		Disnak/ Tapem
		b.	Jumlah sarana/prasarana pemasaran daging di pasar	-	unit	2	unit		Disnak
		c.	Jumlah depo/outlet daging	-	unit	2	unit		Disnak
		2.	Jumlah sarana/prasarana RPH	1	paket	3	paket		Disnak

		3.	RPH Ruminansia	-	unit	2	unit		Disnak/ Tapem
		4.	RPH Babi	-	unit	1	unit		Disnak
		5.	Tempat Pemotongan Ayam Mini	-	unit	1	unit		Disnak
		6.	Jumlah produk olahan lokal hasil ternak berlabel	-	produk	6	produk		Disnak
91.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.	Jumlah Info pasar	24	kali	240	kali	Perdagangan	Prindagkop & UKM
		2.	Jumlah pengawasan barang	6	kali	120	kali	Perdagangan	Prindagkop & UKM
		3.	Jumlah Gedung metrologi terbangun	-	unit	1	unit	Perdagangan	Prindagkop & UKM
		4.	Jumlah Peralatan kemetrolgian tersedia	-	Paket	1	paket	Perdagangan	Prindagkop & UKM
		5.	Jumlah SDM Aparatur Metereologi terlatih	-	Org	10	Org	Perdagangan	Prindagkop & UKM
92.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.	Jumlah pasar terbangun	11	Unit	21	Unit	Perdagangan	Prindagkop & UKM
		2.	Jumlah Pasar Lelang Terbentuk	-	Unit	1	Unit	Perdagangan	Prindagkop & UKM
		3.	Jumlah Gedung terbangun	-	Unit	2	Unit	Perdagangan	Prindagkop & UKM
		4.	Jumlah system distribusi dan Logistik	-	Paket	5	Paket	Perdagangan	Prindagkop & UKM
93.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.	%capaian ketersediaan energi dan protein perkapita (NBM dan PPH)	68,2	%	75	%	Ketahanan Pangan	BP2KP
		2.	Jumlah Desa Mandiri Pangan (DMP)	3	Desa	13	Desa	Ketahanan Pangan	BP2KP
		3.	Jumlah Unit Stabilisasi Pangan Desa (USPD)	-	Desa	11	Desa	Ketahanan Pangan	BP2KP
		4.	Jumlah cadangan pangan	20	ton	420	ton	Ketahanan Pangan	BP2KP
94.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.	% ketersediaan dan informasi pasokan harga dan akses pangan daerah	50	%	100	%	Pangan	BP2KP
		2.	% capaian stabilitas harga dan pasokan	75	%	100	%	Pangan	BP2KP

95.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan pelaku usaha	4	Lembaga	12	Lembaga	Ketahanan Pangan	BP2KP
96.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	-	Skor	75	Skor	Ketahanan Pangan	BP2KP
		2.	Jumlah produk pangan olahan non beras yang dipasarkan	1	produk	11	produk	Ketahanan Pangan	BP2KP
97.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.	Jumlah jenis pangan lokal olahan berlabel	0	label	6	label	Ketahanan Pangan	BP2KP
98.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.	% pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	10	%	100	%	Ketahanan Pangan	BP2KP
		2.	Jumlah Depo Pangan Segar	0	Unit	1	Unit	Ketahanan Pangan	BP2KP
99.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.	Jumlah dokumen SKPG dan peta kerawanan dan ketahanan pangan (FSVA) yang dihasilkan	1	dok	7	dok	Ketahanan Pangan	BP2KP
100.	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian	1.	Jumlah BPK yang meningkat kapasitasnya	0	BPK	10	BPK	Ketahanan Pangan	BP2KP
		2.	% kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (1.214 poktan)	0	%	100	%	Ketahanan Pangan	BP2KP
		3.	Jumlah penyuluh spesialis	20	Org	40	Org	Ketahanan Pangan	BP2KP
		4.	% penyuluh yang memiliki kendaraan operasional roda 2	40,8	%	100	%	Ketahanan Pangan	BP2KP
101.	Program peningkatan kesejahteraan petani	1.	Jumlah petani terlatih	1.252	Org	3.752	org	Ketahanan Pangan	BP2KP
		2.	Jumlah agroventura/lembaga keuangan petani	-	Lembaga	5	Lembaga	Ketahanan Pangan	BP2KP
		3.	% kinerja penyuluh	42	%	92	%	Ketahanan Pangan	BP2KP
102.	Program Peningkatan Penerapan teknologi pertanian	1.	% kapasitas Pusat pelatihan petani dan pedesaan swadaya (P4S)	30	%	100	%	Ketahanan Pangan	BP2KP
		2.	% Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan	60	%	100	%	Ketahanan Pangan	BP2KP

		3.	Jumlah Demplot BPK	10	Demplot	125	Demplot	Ketahanan Pangan	BP2KP
103.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	1.	Jumlah kegiatan promosi produk pertanian dan olahan melalui kegiatan Expo, PEDDA/PENAS, HPS dan Website	-	keg	12	keg	Ketahanan Pangan	BP2KP
104.	Program penciptaan iklim UKM yang kondusif	1.	Jumlah kepastian, ketenangan dan keuntungan berusaha bagi KUMKM	3.166	UMKM	5.150	UMKM	Koperasi dan UKM	Perindagkop & UKM
		2.	Jumlah kepastian, ketenangan dan keuntungan berusaha bagi Koperasi	122	Kope rasi	172	Kope rasi	Koperasi dan UKM	Perindagkop & UKM
		3.	Jumlah Usaha Mikro Kecil skala subsistem ke skala ekonomi	-	UMKM	10	UMKM	Koperasi dan UKM	Perindagkop & UKM
		4.	Jumlah pelaku KUMKM yang dilatih bermental wiraswasta	1.020	org	2.020	org	Koperasi dan UKM	Perindagkop & UKM
105.	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	1.	Jumlah Kesempatan Kerja tersedia	698	org	773	org	Perindustrian	Perindagkop & UKM
106.	Program Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri	1.	Jumlah SDM bersertifikat	2	org	12	org	Perindustrian	Perindagkop & UKM
107.	Program pengembangan Sentra Industri Potensial	1.	Jumlah Pengembangan sentra industry menjadi obyek wisata	0	Unit	6	Unit	Perindustrian	Perindagkop & UKM
		2.	Jumlah UKM Baru yng tumbuh di lokasi sentra industri	0	Unit	25	Unit	Perindustrian	Perindagkop & UKM
108.	Program Pengembangan Industri kecil Menengah	1.	Jumlah Usaha dari IKM Terbentuk	364	IKM	389	IKM	Perindustrian	Perindagkop & UKM
		2.	Jumlah kesempatan berusaha	0	Kali	5	Kali	Perindustrian	Perindagkop & UKM
		3.	Jumlah produk yang bersertifikasi	2	Produk	12	Produk	Perindustrian	Perindagkop & UKM
109.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.	Jumlah Koperasi Berbasis Usaha Anggota	80	Koperasi	85	Kope rasi	Koperasi dan UKM	Perindagkop & UKM
		2.	Jumlah Koperasi	122	Koperasi	172	Koperasi	Koperasi dan UKM	Perindagkop & UKM
		3.	Jumlah Anggota Koperasi	17.000	Anggota	18650	Anggota	Koperasi dan UKM	Perindagkop & UKM

		4.	Jumlah KUMKM berprestasi yang mendapat award	1	KUM KM	11	KUM KM	Koperasi dan UKM	Perindagkop & UKM
110.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.	Jumlah investor	113	Investor	143	Investor	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT)
		2.	% proses pelayanan perijinan sesuai standar pelayanan	75	%	100	%	Penanaman Modal	BPMPPT
111.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.	Jumlah kerjasama investasi yang terlaksana	-	Dok	4	Dok	Penanaman Modal	BPMPPT/ BAPPEDA
		2.	Promosi Investasi	-	kali	5	kali	Penanaman Modal	BPMPPT/ BAPPEDA
		3.	% penyerapan tenaga kerja	1,1	%	5	%	Penanaman Modal	BPMPPT
		4.	% Realisasi investasi	36,8	%	65	%	Penanaman Modal	BPMPPT
112.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Investasi Daerah	-	Dok	5	Dok	Penanaman Modal	BPMPPT/ BAPPEDA
113.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.	Kajian Potensi	-	Dok	6	Dok	Penanaman Modal	BPMPPT/ BAPPEDA
114.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.	Jumlah Daya Tarik Wisata yang terpelihara dan dikelola	5	Lokasi	17	Lokasi	Pariwisata	Dinas Kebudayaan & Pariwisata (Disbudpar)
		2.	Angka Lama Tinggal Wisatawan di Manggarai Barat	6	Hari	7,20	Hari	Pariwisata	Disbudpar/Tapem
		3.	Persentase PAD Pariwisata terhadap PAD Kab. Manggarai Barat	4,39	%	6,90	%	Pariwisata	Disbudpar
115.	Program pengembangan pemasaran Pariwisata	1.	Angka kunjungan wisatawan ke Manggarai Barat Barat	61257	Orang	500	Orang	Pariwisata	Disbudpar
116.	Program Pengembangan Kemitraan	1.	Jumlah SDM Bidang Pariwisata yang dilatih	25	org	345	org	Pariwisata	Disbudpar

		2.	Jumlah Pengeluaran Harian wisatawan di Manggarai Barat	991	Rp	1,600,000	Rp	Pariwisata	Disbudpar
117.	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.	Jumlah Gelar seni dan budaya	1	Kegiatan	22	Kegiatan	Kebudayaan	Disbudpar
		2.	Jumlah Gedung Kesenian	0	Unit	1	Unit	Kebudayaan	Disbudpar
118.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.	Jumlah Sanggar dan Komunitas adat yang dibina	27	Klpk	45	Kplk	Kebudayaan	Disbudpar
		2.	kebijakan pengelolaan kakayan budaya lokal daerah	0	Dok	4	Dok	Kebudayaan	Disbudpar
		3.	Jumlah Pengelolaan dan pengembangan pelstraian peninggalan sejarah purbakala	22	Paket	25	Paket	Kebudayaan	Disbudpar
		4.	Jumlah Dokumen sejarah dan Purbakala	0	Dok	4	Dok	Kebudayaan	Disbudpar
		5.	Jumlah Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	1	Dok	4	Dok	Kebudayaan	Disbudpar
119.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.	Jumlah Kajian Seni	0	Dok	5	Dok	Kebudayaan	Disbudpar
		2.	Jumlah Dialog Kebudayaan	0	Keg	4	Keg	Kebudayaan	Disbudpar
		3.	Jumlah Festival Budaya daerah	1	Keg	26	Keg	Kebudayaan	Disbudpar
120.	Program Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Budaya	1.	Jumlah Dokumen Pengembangan Kebudayaan Bekerja sama dengan LSM dan Stakeholder Lain	1	Dok	6	Dok	Kebudayaan	Disbudpar
		2.	Jumlah Pengiriman Duta Budaya	2	Klpk	18	Klpk	Kebudayaan	Disbudpar
121.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	1.	% pajak daerah terhadap PAD	42,11	%	57,0	%	Pemerintahan Umum	Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
		2.	% retribusi daerah terhadap PAD	12,72	%	20,0	%	Pemerintahan Umum	Dispenda
		3.	% Peningkatan Target Penerimaan PAD	18,70	%	148	%	Pemerintahan Umum	Dispenda

122.	Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan SDA	1.	% sosialisasi, monitoring dan evaluasi Raskin yang dilaksanakan	100	%	100	%	Pemerintahan Umum	Bag. Ekonomi dan SDA
		2.	%pungutan SP3 yang diterima	50	%	55	%	Pemerintahan Umum	Bag. Ekonomi dan SDA
		3.	% monitoring Gemala yang dilaksanakan	100	%	100	%	Pemerintahan Umum	Bag. Ekonomi dan SDA
		4.	Jumlah data dan kegiatan (dokumen) yang dilaksanakan oleh SKPD terkait	100	%	100	%	Pemerintahan Umum	Bag. Ekonomi dan SDA
		5.	%koordinasi pembinaan dan pengawasan KUKM yang berkembang	0	%	100	%	Pemerintahan Umum	Bag. Ekonomi dan SDA
123.	Program Fasilitas kerjasama dan pembinaan badan usaha	1.	Jumlah Direktur dan Dewan Pengawas BUMD yang direkrut	0	org	16	org	Pemerintahan Umum	Bag. Ekonomi dan SDA
		2.	Jumlah rekomendasi ijin usaha yang dihasilkan	117	Rekomendasi	600	Rekomendasi	Pemerintahan Umum	Bag. Ekonomi dan SDA
		3.	Jumlah rekomendasi forum yang dihasilkan	1	Rekomendasi	39	Rekomendasi	Pemerintahan Umum	Bag. Ekonomi dan SDA
		4.	% koordinasi dan pengendalian harga kebutuhan bahan pangan pokok, barang strategis dan barang penting lainnya	0	%	100	%	Pemerintahan Umum	Bag. Ekonomi dan SDA
124.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	1.	Luas Daerah Irigasi (HA) yang diairi secara kontinu	16.787	Ha	21.287	Ha	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		2.	Jumlah dokumen kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang terlagalisasi dan data base Daerah irigasi (RP2I, Data Base)	2	Dok	5,00	Dok	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		3.	Jumlah bendung, yang dibangun	110	Bh	140	Bh	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		4.	Jumlah bendung, yang direhab	30	Bh	5	Bh	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		5.	Jumlah DI yang memiliki OP	0	DI	5	DI	Pekerjaan Umum	Dinas PU

		6.	Jumlah P3A terlatih Desain, Konstruksi, OP dan PAI Partisipatif	18	P3A	20	P3A	Pekerjaan Umum	Dinas PU
125.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1.	Jumlah Embung, waduk yang dibangun dan direhab	12	Bh	17	Bh	Pekerjaan Umum	Dinas PU
126.	Program Pengendalian Banjir	1.	Panjang (m) DAS yang dinormalisasi	3.439	m	4.939	M	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		2.	Panjang (m) tanggul pengaman pantai	1.167	m	2.667	M	Pekerjaan Umum	Dinas PU
127.	Program Perencanaan Tata Ruang	1.	Dokumen Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang	1	Dok	7	Dok	Penataan Ruang	Bappeda
		2.	Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Aparat Penataan ruang	0	Org	13	Org	Penataan Ruang	Bappeda
128.	Program Pemanfaatan Ruang	1.	Jumlah dokumen perijinan (IPL, IMB)	251	Dok	475	Dok	Penataan Ruang	Bappeda/Dinas PU
		2.	Penyusunan dokumen SOP perijinan dan pemanfaatan ruang	0	SOP	2	SOP	Penataan Ruang	Bappeda
129.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.	% pelanggaran pemanfaatan ruang/Jumlah bangunan yang tidak melanggar tata ruang	40	%	10	%	Penataan Ruang	Bappeda
		2.	Penyusunan dokumen kebijakan pengendalian ruang (yang terlegalisasi)	0	Dok	2	Dok	Penataan Ruang	Bappeda
130.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.	Dokumen Kebijakan, Sosialisasi dan Penertiban	0	Dok	4	Dok	Pertanahan	
131.	% masyarakat tertib pertanahan	1.	Konflik tertangani	0	%	50	%	Pertanahan	

132.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.	Jumlah dokumen AMDAL, UKL/UPL, KLHS, SLHD	675	Dok	1000	Dok	Lingkungan Hidup	BLHD
		2.	Jumlah sumber mata air yang sudah di periksa	6	MA	30	MA	Lingkungan Hidup	BLHD
		3.	Jumlah penegakan hukum lingkungan	32		50		Lingkungan Hidup	BLHD
		4.	Jumlah usaha/kegiatan yang telah diawasi	35	buah	100	Bh	Lingkungan Hidup	BLHD
133.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.	Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor, sumber mata air dan sempadan pantai	18	Kaw	40	Kaw	Lingkungan Hidup	BLHD
		2.	Jumlah IPAL yang dibangun	0	unit	2	Unit	Lingkungan Hidup	BLHD
		3.	Jumlah embung yang dibangun	45	unit	61	Unit	Lingkungan Hidup	BLHD
		4.	Jumlah sumur resapan yang dibangun	25	unit	35	Unit	Lingkungan Hidup	BLHD
		5.	Pusat Studi Habitat Komodo	0	Lembaga	1	Lembaga	Lingkungan Hidup	BAPPEDA/BLHD
134.	Program peningkatan pengendalian polusi	1.	Jumlah IKK Pengujian emisi kendaraan bermotor	0	IKK	2	IKK	Lingkungan Hidup	BLHD
135.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.	Jumlah Penyuluhan kepada Petani dan Nelayan untuk mendapat pengetahuan perubahan iklim	0	Paket	12	Paket	Lingkungan Hidup	BLHD
136.	Program rehabilitasi hutan dan lahan	1.	Luas(HA) rehabilitasi lahan kritis di dalam Kawasan Hutan	1465	Ha	1.865,00	Ha	Kehutanan	Dinas Kehutanan
		2.	Luas (HA) rehabilitasi lahan kritis diluar Kawasan Hutan	9213	Ha	9.823,27	Ha	Kehutanan	Dinas Kehutanan
		3.	Luas(Ha) Rehabilitasi hutan di daerah tangkapan air	1150	Ha	1.400,00	Ha	Kehutanan	Dinas Kehutanan

137.	Program Pengembangan Ekowisata dan jasa lingkungan didalam kawasan hutan	1.	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Perencanaan Kawasan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Hutan	0	Dok	3	Dok	Kehutanan	Kehutanan
		2.	Jumlah (Ha) Kawasan Jasa Lingkungan dan Ekowisata yang dikelola	0	Ha	1.500	Ha	Kehutanan	Kehutanan
138.	Program Pencegahan Bencana	1.	Jumlah Dokumen kebijakan/perencanaan terkait bencana	2	Dok	6	Dok	Pemerintahan Umum	BPBD
		2.	Jumlah SDM pencegahan terlatih	0	Org	20	Org	Pemerintahan Umum	BPBD
139.	Program Kesiapsiagaan Bencana	1.	Jmlah SDM (Org) Kesiapsiagaan bencana yang terlatih	5	Org	25	Org	Pemerintahan Umum	BPBD
		2.	Jumlah Sarana Prasarana Bencana	22	Unit	25	Unit	Pemerintahan Umum	BPBD
		3.	Jumlah (Orang) Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Darurat Bencana	0	Orang	40	Orang	Pemerintahan Umum	BPBD
		4.	Jumlah posko bencana	0	Posko	4	Posko	Pemerintahan Umum	BPBD
		5.	Jumlah logistik bencana	0	paket	6	Paket		BPBD
140.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1.	Jumlah kejadian penanganan korban bencana yang tertangani dengan rehabilitasi dan rekonstruksi	1	Paket	1	Paket	Pemerintahan Umum	BPBD
141.	Program Pengembangan Perumahan	1.	Dokumen (Bh) kebijakan dan Perencanaan pembangunan dan penataan perumahan	1	Dok	3	Dok	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU/Bappeda
		2.	Jumlah (bh) rumah layak huni yang direhab bagi MBR (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)	1.317	Bh	1.717	Bh	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
142.	Program Pengembangan sarana dan prasarana permukiman	1.	Panjang (Km) jalan lingkungan yang terbangun di ibu kota kecamatan	78,97	Km	111,97	Km	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU

143.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.	Jumlah dokumen (Bh) kebijakan penataan kawasan cepat tumbuh	2,00	Dok	6	Dok	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
		2.	Jumlah kawasan strategis cepat tumbuh yang tertata	0	Kaw	6	Kaw	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
144.	Program penyediaan sarana dan prasarana pemakaman	1.	Dokumen (Bh) kebijakan/perencanaan TPU terlegalisasi	0	Dok	2	Dok	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
		2.	Jumlah TPU	0	Unit	12	Unit	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
145.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.	Dokumen (Bh) kebijakan penyelenggaraan air bersih yang dilegalisasi	0	Dok	12	Dok	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
		2.	% RT yang memiliki akses air minum dasar	47,59	%	75	%	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
		3.	% RT yang memiliki akses air minum layak	9,14	%	25	%	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
146.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.	Dokumen kebijakan dan perencanaan sanitasi yang dilegalisasi	0	Dok	10	Dok	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
		2.	% RT yang memiliki jamban dasar/JSSP	17,33	%	30,29	%	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
		3.	% RT yang memiliki jamban komunal	6,78	%	27	%	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
		4.	% RT yang memiliki jamban sehat/JSP	27,38	%	42,71	%	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
		5.	% RT yang memiliki tengki septik/SPAL	6,780	%	27	%	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
		6.	% RT yang BABS	48,51	%	0	%	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
		7.	Panjang (m) saluran drainase	7871,46	m	24.835	M	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU

147.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.	Dokumen Kebijakan pengelolaan sampah	1	Dok	3	Dok	Lingkungan Hidup	BLHD
		2.	Jumlah prasarana persampahan yang terbangun	0	Unit	3	Unit	Lingkungan Hidup	BLHD
		3.	Jumlah Sarana persampahan yang tersedia	0	Unit	8	Unit	Lingkungan Hidup	BLHD
		4.	Jumlah personil (orang) tenaga kebersihan	0	Unit	15	Unit	Lingkungan Hidup	BLHD
		5.	% keterlibatan masyarakat dalam penanganan sampah	0	%	75	%	Lingkungan Hidup	BLHD
148.	Program Perencanaan Tata Ruang	1.	Dokumen Rencana Rinci tata ruang perkotaan labuan Bajo terlegalisasi (RDTR, RTBL dll)	1	Dok	5	Dok	Penataan Ruang	Bappeda
149.	Program Pemanfaatan Ruang	1.	Jumlah dokumen perijinan di Perkotaan Labuan Bajo (IPL, IMB)	468	Dok	900	Dok	Penataan Ruang	Bappeda/Dinas PU
		2.	% Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang di Perkotaan Labuan Bajo	20	%	80	%	Penataan Ruang	Bappeda
150.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.	Jumlah % pelanggaran pemanfaatan ruang di Perkotaan Labuan Bajo	40	%	5	%	Penataan Ruang	Bappeda
151.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.	% kerusakan jaringan /kebocoran air air minum bersih (Optimalisasi) di Perkotaan Labuan Bajo	28,57	%	0	%	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
		2.	% RT untuk Pengembangan air bersih (Sambungan rumah) di Perkotaan Labuan Bajo	52,3	%	100	%	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
152.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.	Dokumen kebijakan/perencanaan drainase perkotaan Labuan Bajo terlegalisasi	0	Dok	3	Dok	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU/Bappeda
		2.	Prosentase Panjang drainase perkotaan yang terbangun di Perkotaan Labuan Bajo	7,5	%	15,35	%	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU

		3.	% RT yang memiliki akses pengolahan air limbah di Perkotaan Labuan Bajo	22,09	%	100,00	%	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
		4.	% Rumah tangga yang memiliki jamban sehat di Perkotaan Labuan Bajo	82	%	100	%	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
		5.	Jumlah Dokumen kebijakan terkait air limbah di Perkotaan Labuan Bajo	0	Dok	3	Dok	Perumahan dan Pemukiman	Dinas PU
153.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.	Dokumen Kebijakan pengelolaan sampah di Perkotaan Labuan Bajo	1	Dok	3	Dok	Lingkungan Hidup	BLHD
		2.	prasarana persampahan yang terbangun di Perkotaan Labuan Bajo	4	Unit	8	Unit	Lingkungan Hidup	BLHD
		3.	Jumlah Sarana persampahan yang ada di Perkotaan Labuan Bajo	249	Unit	496	Unit	Lingkungan Hidup	BLHD
		4.	Jumlah personil (orang) tenaga kebersihan di Perkotaan Labuan Bajo	90	Org	93	Org	Lingkungan Hidup	BLHD
		5.	% volume sampah tertangani di Perkotaan Labuan Bajo	83,60	%	100	%	Lingkungan Hidup	BLHD
154.	Program Pengembangan sarana dan prasarana permukiman	1.	Jumlah Dokumen kebijakan dan Perencanaan pembangunan dan penataan perumahan di Perkotaan Labuan Bajo	0	Dok	2	Dok	Perumahan dan Permukiman	Dinas PU/Bappeda
		2.	penataan kawasan kumuh (ha) yang tertangani di Perkotaan Labuan Bajo	29,6	Ha	0	Ha	Perumahan dan Permukiman	Dinas PU
		3.	Panjang (Km) jalan lingkungan yang terbangun di Perkotaan Labuan Bajo	15	Km	45	Km	Perumahan dan Permukiman	Dinas PU
155.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.	Jumlah dokumen (Bh) kebijakan penataan kawasan cepat tumbuh di Perkotaan Labuan Bajo	0	Dok	2	Dok	Perumahan dan Permukiman	Dinas PU
		2.	Jumlah kawasan strategis cepat tumbuh yang tertata di Perkotaan Labuan Bajo	0	Kaw	4	Kaw	Lingkungan Hidup	Dinas PU

156.	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1.	Dokumen kebijakan pengelolaan RTH Perkotaan Labuan Bajo	0	Dok	2	Dok	Lingkungan Hidup	BLHD
		2.	Luas Ruang Terbuka hijau pada kawasan Perkotaan Labuan Bajo (Taman Kota/Hutan Kota/taman rekreasi) (ha)	3,5	Ha	5	Ha	Lingkungan Hidup	BLHD
		3.	% Ruang Publik yang berubah peruntukannya di Perkotaan Labuan Bajo	0	%	0	%	Lingkungan Hidup	BLHD
157.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;	1.	Jumlah dokumen kebijakan pembangunan jalan dan jembatan untuk jangka menengah dan panjang yang sudah dilegalisasi	0	Dok	2	Dok	Pekerjaan Umum	Dina PU/Bappeda
		2.	Prosentase panjang jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya yang beraspal	46,50	%	83,18	%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		3.	presentase jumlah jembatan yang dibangun	36,36	%	55,08	%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
158.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1.	% Panjang jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya yang mengalami kerusakan	40,75	%	6,11	%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		2.	% Jumlah jembatan yang mengalami kerusakan	20,95	%	10,48	%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
159.	Program peningkatan sarana dan prasarana ke-PU-an	1.	Jumlah Alat Berat	11	Unit	16	Unit	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		2.	Gudang Alat berat/benkel	0	Unit	1	Unit	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		3.	% perlatan Laboratorium dan SDM Laboratorium menuju akreditasi	65	%	100	%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
160.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1.	Jumlah perusahaan jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi dan klasifikasi untuk mengerjakan pekerjaan jasa konstruksi	157	Bh	300	Bh	Pekerjaan Umum	Dinas PU
161.	Program Rekayasa Teknologi	1.	Jumlah SDM yang memahami inofasi teknolog konstruksi	14	Orang	64	Org	Pekerjaan Umum	Dinas PU

162.	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	1.	Penyusunan Dokumen Data Base Jalan dan Jembatan	0	Dok	1	Dok	Pekerjaan Umum	Dinas PU
163.	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1.	Jumlah dokumen kebijakan dan dokumen perencanaan sistem transportasi terlegalisasi	0	Dok	4	Dok	Perhubungan	Dishubinfokom/ Bappeda
		2.	Jumlah Terminal berdasarkan Type	1 (B), 1 (C)	Unit	1 (B), 3 (C)	Unit	Perhubungan	Dishubinfokom
		3.	Jumlah (Orang) SDM bidang darat yang bersertifikat	1	org	8	Org	Perhubungan	Dishubinfokom
164.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.	Jumlah Pemasangan traffic light, rambu lalu lintas, guard rill dan marka jalan dll	2 traffig light, 159 rambu marka, guardril dll	Unit	4 traffig light, 339 rambu, marka, guardril dll	Unit	Perhubungan	Dishubinfokom
165.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1.	Alat uji kendaraan bermotor	1	Unit	2	Unit	Perhubungan	Dishubinfokom
166.	Program peningkatan pelayanan angkutan	1.	Jumlah ijin trayek darat	92	Ijin	272	Ijin	Perhubungan	Dishubinfokom
		2.	Jumlah uji kir angkutan	286	Kir	521	Kir	Perhubungan	Dishubinfokom
167.	Program Peningkatan dan pengamanan Lalu Lintas	1.	Jumlah Perahu Motor yang laik layar/pass kecil perahu motor	0	unit	350	Unit	Perhubungan	Dishubinfokom
168.	Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1.	Jumlah Dernaga kecil	7	Unit	22	Unit	Perhubungan	Dishubinfokom
		2.	Jumlah (Orang) SDM bidang laut yang bersertifikat	0	Orang	10	Orang	Perhubungan	Dishubinfokom
169.	Program Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	1.	Dokumen Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi terlegalisasi	1	Dok	4	Dok	Komunikasi dan informasi	Dishubinfokom
		2.	Prosentase Penegembangan jaringan komunikasi instansi pemerintah kab. Manggarai Barat	17,14	SKPD	100	SKPD	Komunikasi dan informasi	Dishubinfokom

		3.	Dokumen Kerja sama dengan BUMN (Telkomsel, Indosat);	0	Dok	3	Dok	Komunikasi dan informasi	Dishubinfokom
		4.	% Update dan upgrade data pada website Manggarai Barat	50	%	100	%	Komunikasi dan informasi	Dishubinfokom
		5.	Jumlah surat kabar Pemerintah kabupaten Manggarai Barat yang diterbitkan	0		6000		Komunikasi dan informasi	Dishubinfokom
		6.	Prosentase Kecamatan/Desa yang bisa diakses sinyal RSPD	40	%	100	%	Komunikasi dan informasi	Dishubinfokom
170.	Program kerjasama infomsi dan media massa	1.	Jumlah Media cetak/on line lokal dan nasional yang bekerja sama dengan pemda untuk penyebarluasan informasi	0	Media	6	Media	Komunikasi dan informasi	Dishubinfokom
171.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	1.	Jumlah SDM pemerintah yang memahami IT	2	Org	18	Org	Komunikasi dan informasi	Dishubinfokom
		2.	Jumlah (kelompok) pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan KIM (kelompok Informasi Masyarakat)	6,0	Klpk	50,0	Klpk	Komunikasi dan informasi	Dishubinfokom
172.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	1.	Dokumen Kebijakan/perencanaan ketenagalistrikan terlegalisasi	0	Dok	4	Dok	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
		2.	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) terpasang	150	Unit	550	Unit	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
		3.	% rumah tangga pengguna listrik (SR)	39,9	%	60	%	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
		4.	Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS (perusahaan)	0	Ijin	50	Ijin	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben

173.	Program pengawasan dan penertiban kegiatan Pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	1.	Jumlah Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)	16	Ijin	40	Ijin	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
		2.	% Reklamasi luas (ha) lahan bekas tambang	0	%	60	%	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
		3.	% Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	2,07	%	2,2	%	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
174.	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	1.	Jumlah tenaga kerja sektor pertambangan yang memenuhi standar K3	20	org	160		Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
		2.	Jumlah (KM3) material bahan mineral bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan	30	m3	59	m3	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
175.	Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Mineral	1.	jumlah air bawah tanah yang berijin	0	Unit	200	Unit	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
		2.	Jumlah wajib Pajak	80	Org	200	Org	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
		3.	Jumlah sumur bor yang di rehab	5	Buah	0	Buah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Distamben
176.	Program : Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1	Tersedianya PERDA dan PERBUP tentang Organisasi Perangkat Daerah	0	Dok	2	Dok	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi
177.	Program : Penerapan Pemerintahan yang Baik	1.	Persentase SKPD Menerapkan SPM	100%	SKPD	100%	SKPD	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi
		2.	Persentase SKPD yang Menyusun LAKIP dan Tepat Waktu	70%	SKPD	100%	SKPD	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi
178.	Program : Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1.	Jumlah Unit Khusus Pelayanan Pengaduan Masyarakat	0	Unit	1	Unit	Pemerintahan Umum	Bagian Administrasi Umum

179.	Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	1.	Persentase Pelayanan Kedinasan yang Dilaksanakan	100%	Kegiatan	100%	Kegiatan	Pemerintahan Umum	Bagian Administrasi Umum
180.	Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.	Persentase SKPD melaporkan kehadiran ASN tepat waktu	0	SKPD	100%	SKPD	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
181.	Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.	Jumlah ASN yang mendapat mendapat Bantuan Tugas Belajar	26	Org	80	Org	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
182.	Program : Pendidikan Kedinasan	1.	Persentase Pejabat Struktural memenuhi standart kompetensi					Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
		2.	Persentase Jabatan Struktural Eselon II yang telah Mengikuti PIM II	52%	Org	100%	Org	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
		3.	Persentase Jabatan Struktural Eselon III yang telah Mengikuti PIM III	71%	Org	100%	Org	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
		4.	Persentase Jabatan Struktural Eselon IV yang telah Mengikuti PIM IV	22%	Org	80%	Org	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
183.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.	Persentase ASN mengikuti Tugas Belajar sesuai SOP	0	%	100	%	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
184.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.	Implementasi Kebijakan Lelang Jabatan Eselon II dan III	0	%	5	%	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
185.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.	Persentase SOP Rekrutment yang Diterapkan	0	%	100	%	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah

186.	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.	Jumlah Dokumen Tahunan	0	Dok	54	Dok	Perencanaan Pembangunan	Bappeda dan Bag. Administrasi Pemerintahan Umum
187.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.	Jumlah Dokumen lima Tahunan	3	Dok	6	Dok	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
		2.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi bidang ekonomi yang terlegalisasi	1	Dok	4	Dok	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
188.	Program perencanaan sosial dan budaya	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi bidang sosial budaya yang terlegalisasi	1	Dok	4	Dok	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
189.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terlegalisasi	2	Dok	9	Dok	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
190.	Program penelitian dan pengembangan	1.	Jumlah dokumen kebijakan terkait penelitian dan pengembangan terlegalisasi	4	Dok	26	Dok	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
191.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1.	Jumlah SDM Perencana yang bersertifikat	6	Org	26	Org	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
192.	Program kerjasama pembangunan	1.	Jumlah Lembaga Pemerintah dan NGO yang bekerja sama dengan Pemda Manggarai Barat	4	Lembaga	13	Lembaga	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
193.	Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.	Persentase Desa yang Memiliki Dokumen RPJMDes, Dokumen Renstra, dan Dokumen RAPBDes, RKPDes, LPPDes yang Tepat Waktu	60.98%	Desa	100%	Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
		2.	Persentase Desa Memiliki Profil Desa	100%	Desa	100%	Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD

194.	Program : Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1.	Persentase Pendidikan Kepala Desa, Sekdes, Aparat Desa sesuai dengan syarat UU Desa	77,21%	Org	100%	Org	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
195.	Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.	Persentase Pelatihan Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD yang sudah mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	66.04%	Org	100%	Org	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
		2.	Persentase Pelatihan Pendamping Desa, Pendamping Lokal dan Tenaga Ahli	23.91%	Org	100%	Org	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
196.	Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1.	Jumlah Desa Memiliki Community Center	0	Desa/Kel	20	Desa/Kel	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
		2.	Jumlah Desa memiliki Posyantek-Des	0	Desa	20	Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
		3.	Terbentuknya Pelayanan Perijinan Satu Pintu	Belum	Unit	Ada	Unit		BPMDPPT
		4.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat						Semua SKPD
197	Program : Penataan Administrasi Kependudukan	1.	Persentase penduduk ber KTP	61.47%	Org	90%	Org	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.	Ketersediaan data base kependudukan	Ada	Ada/ Tdk Ada	Ada secara Elektronik	Ada/Tdk Ada	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	86.43%	Kepala Keluarga	100%	Kepala Keluarga	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		4.	Persentase Pasangan berakta Nikah	18.86%	Pasangan	80%	Pasangan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		5.	Persentase bayi berakte kelahiran	30.82%	Org	85%	Org	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		6.	Persentase Anak berakte kelahiran	34,38%	Org	85%	Org	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		7.	Persentase kepemilikan Akta kematian	4.90%	Org	40%	Org	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		8.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	n/a	Org	85%	Org	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
198.	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Persentase SKPD & SKPKD yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis Aplikasi dengan efektif dan efisien	25%	SKPD	90%	SKPD	Pemerintahan Umum	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
199.	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	1.	Persentase SKPD yang telah melaksanakan pengelolaan BMD secara efektif dan efisien	5%	SKPD	90%	SKPD	Pemerintahan Umum	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
200.	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	1.	Tersedianya Dokumen Musrenbang, RKPD, KUA, PPAS, RAPBD Tepat Waktu	Ada	Dok	Ada	Dok	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
201.	Program : Pengembangan Data/ Informasi	1.	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis On line	n/a	Data	100%	Data	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
		2.	Tersedianya Kabupaten Manggarai Barat dalam Angka dan PDRB Kabupaten	Ada	Dok	Ada	Dok	Statistik	Bappeda, Kantor BPS
202.	Program : Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.	Persentase Tindakan lanjut SKTJM	17%	Rp (Juta)	70%	Rp (Juta)	Pemerintahan Umum	Inspektorat

203.	Program : Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1.	Jumlah Aparatur Pengawas yang Mengikuti Bimtek APIP	12	Org	25	Org	Pemerintahan Umum	Inspektorat
		2.	Jumlah Aparatur Pengawas yang Bersertifikat Auditor	9	Orang	18	Orang	Pemerintahan Umum	Inspektorat
		3.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI	70	%	55	%	Pemerintahan Umum	Inspektorat
		4.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	252	Laporan	336	Laporan	Pemerintahan Umum	Inspektorat
		5.	Persentase Pembangunan Fisik Proyek Strategis yang Terawasi	-	%	30	%	Pemerintahan Umum	Inspektorat
204.	Program : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	1.	Persentase Pekerjaan Fisik/Pembangunan Tepat Waktu	87%	Paket	100%	Paket	Pemerintahan Umum	Bagian Administrasi Pembangunan
		2.	Persentase Pelaksanaan Lelang Tepat Waktu	56%	Paket	100%	Paket	Pemerintahan Umum	Bagian Administrasi Pembangunan
		3.	Persentase SKPD Menyampaikan RUP Tepat Waktu	56%	SKPD	100%	SKPD	Pemerintahan Umum	Bagian Administrasi Pembangunan
205.	Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	1.	Persentase SKPD Menata Arsip dengan Baik	23,5%	SKPD	100%	SKPD	Kearsipan dan Dokumentasi	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
		2.	Persentase SKPD yang Terakuisisi	0%	SKPD	100%	SKPD	Kearsipan dan Dokumentasi	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
206.	Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip	1.	Jumlah Arsiparis Daerah	50	Org	102	Org	Kearsipan dan Dokumentasi	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

		2.	Tersedianya Sarana Layanan Arsip secara Elektronik	0	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada/ Tidak Ada	Kearsipan dan Dokumentasi	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
207.	Program : Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1.	Tersedianya Database Informasi Kearsipan	0	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada/ Tidak Ada	Kearsipan dan Dokumentasi	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
		2.	Persentase Penyelesaian Sengketa / Konflik Tanah	n/a	Kasus	n/a	Kasus	Pertanahan	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
		3.	Persentase Luas Lahan Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	n/a	Ha	Meningkat	Ha	Pertanahan	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
		4.	Luas Lahan Strategis yang dimiliki Pemerintah	n/a	Ha	Meningkat	Ha	Pertanahan	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
208.	Program : Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pengendalian Tindakan Kriminal	1.	Persentase Pelanggaran PERDA / PERBUP yang Tertangani	0%	Kasus	100%	Kasus	Pemerintahan Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		2.	Terpenuhinya Kebutuhan Sat Pol PP	47,60%	Org	100%	Org	Pemerintahan Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
209.	Program : Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.	Jumlah Perda/Perbup yang diajukan sesuai Kebutuhan Masyarakat	n/a	Perda/ Perbup	n/a	Perda/ Perbup	Pemerintahan Umum	Bagian Hukum
		2.	Jumlah Perda/Perbup yang ditetapkan tepat waktu	n/a	Perda/ Perbup	n/a	Perda/ Perbup	Pemerintahan Umum	Bagian Hukum
210.	Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1.	Persentase Agenda Kerja DPRD yang Dilaksanakan	96,04%	Kegiatan	98,02%	Kegiatan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Dewan
		2.	Persentase Ketepatan Penetapan Perda	83,30%	Perda	83,30%	Perda	Pemerintahan Umum	Sekretariat Dewan

		3.	Persentase Keputusan Melalui Voting	0%	Keputusan	0%	Keputusan	Pemerintahan Umum	Sekretariat Dewan
211.	Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	1.	Jumlah Patroli Petugas Pol PP dalam 1 Hari	3	Kali Sehari	3	Kali Sehari	Pemerintahan Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
212.	Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.	Jumlah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan dalam Satu Tahun	1	Kali	1	Kali	Kesbangpol	Badan Kesbangpol
213.	Program : Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.	Jumlah Penyelenggaraan FKUB dan FPK dalam Satu Tahun	3	Kali	4	Kali	Kesbangpol	Badan Kesbangpol
		2.	Jumlah Konflik antar Umat Beragama (SARA)	0	Konflik	0	Konflik	Kesbangpol	Badan Kesbangpol
214.	Program : Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.	Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Satu Tahun	36	Kasus	0	Kasus	Kesbangpol	Badan Kesbangpol
		2.	Rasio Kriminabilitas terhadap 10.000 Penduduk	1.023	Kasus	0	Kasus	Kesbangpol	Badan Kesbangpol
		3.	Persentase Penanganan Demonstrasi Setiap Tahun	100%	Demonstrasi	100%	Demonstrasi	Kesbangpol	Badan Kesbangpol
215.	Program : Pendidikan Politik Masyarakat	1.	Persentase Partai Politik yang Mendapatkan Bantuan	100%	Partai Politik	100%	Partai Politik	Kesbangpol	Badan Kesbangpol

216.	Program : Pendidikan Politik Masyarakat	1.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif, Pilkada, dan Pilpres	Pileg thn 2009 : 87%, pilkada Thn 2010 : 89 %, Pilgub Thn 2013 : 73%, Pileg Thn 2014 : 83%, Pilpres thn 2014 : 77%, Pilbub Tahun 2015 : 73%	Org	90%	Org	Kesbangpol	Badan Kesbangpol
		2.	Hibah kepada KPUD						
		3.	Persentase Pembinaan Lembaga Adat	n/a	Lembaga	n/a	Lembaga	Kebudayaan	
		4.	Jumlah Pemugaran Rumah Adat Berciri Khas Adat Manggarai Barat	n/a	Unit	n/a	Unit	Kebudayaan	
		5.	Penyelenggaraan Festival dan budaya	n/a	Kegiatan	n/a	Kegiatan	Kebudayaan	
		6.	Jumlah Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	n/a	Unit	n/a	Unit	Kebudayaan	
		7.	Persentase Pelatihan dan Pemberdayaan Keluarga Korban Human Trafficking	n/a	Org	n/a	Org		
		8.	PERDA/PERBUP Human Trafficking	0	Perda/Perbup	Ada	Perda / Perbup		
		9.	Mitra Kerja dengan LSM dan Gereja	n/a	Lembaga	n/a	Lembaga		

217.	Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1.	Jumlah Lembaga Swasta yang Melakukan Pelayanan terhadap Korban KDRT	0	Lembaga	3	Lembaga	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA dan KB
		2.	Persentase Korban KDRT yang Mendapat Pendampingan	70%	Org	100%	Org	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA dan KB
		3.	Persentase Penindakan pelaku KDRT	60%	Org	75%	Org	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA dan KB
		4.	Rasio KDRT terhadap Jumlah Keluarga	0.09	Keluarga	0.06	Keluarga	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPA dan KB

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan kegiatan yang secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Manggarai Barat yang berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

Rekapitulasi kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen tahunan dituangkan dalam tabel di bawah ini:

No.	NAMA OPD	NAMA KEGIATAN
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

4.	Dinas Perhubungan	Pengelolaan Sampah
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
7.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pengembangan Prasarana Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian

		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
8.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pembangunan Prasarana Pertanian
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah

		Kabupaten/Kota dalam rangka
		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan(TPI)
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
10.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata

		Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
11.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
12.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
13.	Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran

		dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
14.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pengelolaan Pendidikan Non formal/Kesetaraan
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
15.	Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
16.	Polisi Praja Pamong	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
17.	Dinas Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat

		Daerah Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
19.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Pelayanan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Penyusunan Profil Kependudukan
20.	Dinas Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
22.	Badan Perencanaan, pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
23.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
24.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Mutasi dan Promosi ASN
		Pengembangan Kompetensi ASN
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
25.	Inspektorat	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

		Pendampingan dan Asistensi
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
27.	Sekretariat DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
		Peningkatan Kapasitas DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
28.	Sekretariat Daerah	Fasilitasi Tugas DPRD
		Administrasi Tata Pemerintahan
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Fasilitasi Kerjasama Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		Penataan Organisasi
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi memuat asas otonomi dan tugas pembantuan yaitu memberikan seluas-luasnya wewenang kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penerapannya, pelaksanaan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dari Pemerintah Pusat sebagai leading sektor berupa pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, serta monitoring dan evaluasi yang bertujuan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pedomaan Sebagaimana fungsi pembinaan, Pengendalian dan pengawasan dari Pemerintah Pusat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sebagai penjabaran dari urusan konkuren. Urusan Wajib

menjabarkan tentang urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan dasar dan non Pelayanan Dasar sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang dalam pelaksanaannya berhak menjadi pilihan Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Pasal 18 Undang-Undang 23 tahun 2014 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan pelaksanaan urusan tersebut. Selain itu pada pasal 298, belanja daerah wajib memprioritaskan pendanaan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sebagai penjabaran dari Pelayanan Dasar sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tersebut, maka disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menjelaskan tentang mutu dan jenis Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 sebagai Pedomaan dan standar dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerintah Daerah. Adapun Kementerian yang memangku urusan wajib Pelayanan Dasar, membuat Peraturan masing-masing sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tersebut.

Manggarai Barat sebagai daerah otonom wajib menjalankan urusan konkuren dari Pemerintah Pusat terutama yang berkaitan dengan urusan Wajib Pemerintahan Pelayanan Dasar yang bermula pada proses perencanaan melalui RPJMD yang telah berjalan selama 3 periode sampai pada Pelaporan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap tahun berjalan. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupaya menerapkan setiap mutu dan jenis Pelayanan Dasar sesuai dengan amanat undang-undang dalam

uraian program, kegiatan serta sub kegiatan pada OPD yang memangku urusan tersebut serta melakukan monitoring dan evaluasi pada proses pelaksanaannya. Upaya ini dilakukan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, demi terwujudnya pelayanan publik yang prima serta bertujuan memberikan kesejahteraan terhadap setiap lini masyarakat.

Berdasarkan perencanaan yang telah tertuang dalam RPJMD 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui laporan ini akan menjabarkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada akhir tahun periode RPJMD tahun 2021.

Dasar hukum penyusunan Laporan SPM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar Pada Standar Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1513);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 Nomor 196);

Kebijakan Umum

Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. KUA Tahun Anggaran 2021 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021, sebagai dokumen induk perencanaan tahunan daerah. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 dimana Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, dan Kebijakan Pembiayaan.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Secara terperinci proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Kode	Uraian	Jumlah
4.	Pendapatan Daerah	
5.1	Pendapatan Asli Daerah	263.799.440.625,-
4.1. 01	Pajak Daerah	164.540.085.625,-
4.1.02	Retribusi Daerah	70.090.000.000,-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan	4.500.000.000,-

	Daerah Yang dipisahkan	
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	24.669.355.000
4.2	Pendapatan Transfer	906.109.138.851
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	879.966.075.000
4.2.02	Pendapatan transfer Antar Daerah	26.143.063.851
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	74.581.900.506
4.3.01	Pendapatan Hibah	39.781.900.506
4.3.02	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	34.800.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.244.490.479.982

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat disesuaikan dengan visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam RPJMD tahun rencana dan renstra OPD. Sejalan dengan visi dan misi, sasaran, arah kebijakan dan program Bupati untuk lima tahun kedepan. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran anggaran dan kesinambungan kebijakan dan program-program yang dilaksanakan dapat diprediksi kemana arah pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021.

Tabel Proyeksi Belanja Daerah

Kode	Uraian	Jumlah
5.	Belanja	
5.1	Belanja Pegawai	868.916.555.500
5.1. 01	Belanja Operasi	397.099.961.911
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.546.513.589
5.1.03	Belanja Hibah	46.315.080.000
5.2	Belanja Modal	146.277.438.484
5.2.01	Belanja Modal Tanah	597.411.200

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.521.599.998
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.998.049.158
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	82.610.378.128
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	550.000.000
5.3	Belanja tidak terduga	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	226.081.485.998
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.937.243.498
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	213.144.242.500
	Jumlah Belanja	1.244.490.479.982
	Total Surplus/(Defisit)	0

Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan, anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/ urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan

antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil investasi sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Tabel Pembiayaan Daerah

Kode	Uraian	Jumlah
6.	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000
6.1. 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000
	Pembiayaan Netto	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-
	Total Surplus/(Defisit)	1.264.490.479.982

Kebijakan penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 diperoleh dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber pembiayaan pada APBD tahun 2021 yang diproyeksi sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah). Proyeksi ini dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan realisasi Pendapatan dan Belanja pada triwulan IV tahun 2020. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Bank NTT sebesar Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Manggarai Barat periode RPJMD 2016-2021 merupakan sinergi dari RPJPD Kabupaten Manggarai Barat 2005-2024 yang memfokuskan pada peningkatan kapasitas dan kinerja sarana dan prasarana umum untuk menunjang pertumbuhan pariwisata, pendidikan, kesehatan dan pengolahan hasil-hasil komoditas Manggarai Barat yang dapat dirincikan sebagai

berikut:

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2021
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan	Menyusun Regulasi bidang Pendidikan daerah berbasis masalah di masyarakat dengan merujuk pada Sistem Pendidikan Nasional	Menyediakan Regulasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan manajerial maupun operasional pelayanan pendidikan
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan terjangkau	Memastikan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak
		Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru, serta uji kompetensi	Memastikan keikutsertaan tenaga Pendidikan dalam Diklat Profesi Guru dan pelaksanaan Uji Kompetensi
		Menyediakan beasiswa bagi masyarakat miskin	Memastikan Kecukupan ketersediaan anggaran beasiswa bagi Masyarakat
		Memperluas akses pendidikan non formal bagi anak putus sekolah	Optimalisasi Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Luar Sekolah
2.	Terwujudnya Generasi Muda Yang Berprestasi dan Berdaya saing	Membangun sarana dan prasarana olahraga dan pembinaan atlet berprestasi	Menyediakan sarana dan prasarana olahraga berbasis masyarakat
		Meningkatkan pembinaan organisasi pemuda, karang taruna, dan Pramuka	Melakukan pembinaan berbasis masyarakat
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Menyusun Regulasi bidang kesehatan daerah berbasis masalah di masyarakat sebagai pedoman umum kebijakan kesehatan	Menyediakan Regulasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan manajerial maupun operasional pelayanan pendidikan
		Meningkatkan Promosi dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi pada balita	Melakukan sosialisasi dan Advokasi dengan melibatkan kelompokkategorial yang ada di masyarakat
		Memperluas jangkauan pelayanan BPJS-Bidang Kesehatan ke seluruh masyarakat	melakukan koordinasi dan pendataan ulang calon peserta BPJS Untuk mendukung BPJS semesta tahun 2019
		Mengenalkan budaya hidup sehat sejak dini	Mengupayakan promosi budaya hidup sehat melalui Pendekatan pelayanan Kesehatan berbasis Masyarakat dan lembaga pendidikan
		Meningkatkan jumlah tenaga medis dan para medis ketentuan Permenkes 75 tahun 2014	Menyusun dan menyediakan Formasi ASN tenaga kesehatan atau merekrut Tenaga kesehatan sebagai tenaga kontrak daerah
		Meningkatkan pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas	Meningkatkan upaya layanan kesehatan bagi penduduk rentan

4.	Meningkatnya partisipasi angkatan Kerja	Menyusun Regulasi daerah bidang Ketenagakerjaan umum kebijakan ketenagakerjaan	Menyediakan Regulasi sebagai pedoman Pelaksanaan kegiatan Manajerial maupun operasional pelayanan pendidikan
		Memaksimalkan BLK, Menyediakan instruktur yang memiliki keahlian link match dg kebutuhan pasar kerja; dan meningkatkan pelatihan tenaga kerja	Menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dan siap kerja
		Penguatan lembaga perlindungan tenaga kerja	Penguatan kerjasama Kelembagaan dan Advokasi tenaga kerja
5.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan advokasi dan kebijakan untuk pemenuhan hak-hak dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial, Keluarga miskin, bantuan peralatan kerja, dan bantuan UEP/KUBE serta Padat Karya	Mengupayakan perlindungan Bagi Masyarakat dan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
		Meningkatkan jumlah panti untuk menampung anak-anak terlantar/yatim piatu	Mengupayakan tempat perlindungan perlindungan dan pelayanan social
6.	Meningkatnya minat baca masyarakat	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan yang dijangkau oleh masyarakat pembaca	Pengembangan perpustakaan Dan fasilitasnya berbasis Masyarakat
7.	Meningkatnya peran sector pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah	Mengidentifikasi potensi dan peluang destinasi pariwisata baru dengan fokus wisata ekologis, budaya, bahari dan petualangan	Penguatan dan pengembangan destinasi wisata baru dalam rangka meningkatkan lama tinggal wisatawan
		Meningkatkan Promosi Destinasi Wisata	Melalui Kemitraan Dengan stakeholder
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas penataan daya tarik wisata	Penyediaan sarana dan prasarana pada daerah tujuan wisata
		Mengembangkan agrowisata berbasis komoditas unggulan bidang pertanian, peternakan, perikanan perkebunan dan kehutanan	Meningkatkan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat
		Mengembangkan aset budaya Manggarai	Upaya pelestarian budaya lokal
		Identifikasi karakteristik desa wisata	Pengembangan Destinasi Wisata basis perdesaan
8.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan pertanian	Perluasan lahan pertanian Dan peningkatan penggunaan saprodi
		Penerapan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri)	Pengembangan Sistem Pertanian terintegrasi
		Peningkatan penyediaan sarana/prasarana pertanian	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan air
		Pengembangan	Pengembangan Produk unggulan

		spesialisasi produk unggulan pertanian/perkebunan berbasis desa	sesuai karakteristik pertanian dalam rangka Mendukung Agrowisata
		Pengembangans pesialisasi peternakan besar dan kecil berbasis desa	Peningkatan usaha peternakan berbasis Masyarakat
		Pendataan masalah peternakan	Identifikasi Potensi Ternak dan upaya pengembangan nya
		Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Peningkatan Upaya Pemberantasan Penyakit Ternak
		Mengkaji daya dukung dan meningkatkan jumlah ternak	Peningkatan upaya Pengembangan dan pembibitan ternak
		Pengembangan Spesialisasi perikanan minapolitan berbasis desa	Pengembangan Perikanan Berbasis Perdesaan
		Peningkatan penyediaan sarana/prasarana penangkapan ikan	Meningkatkan hasil tangkapan dengan sarana dan prasarana ramah lingkungan
		Memberdayakan kelompok tani, ternak dan nelayan	Peningkatan Kemampuan dan kualitas Masyarakat
		peningkatan rasio jumlah penyuluh terhadap jumlah desa	Penguatan dan penyebaran Sumber Daya Manusia Penyuluh
		Memberikan pelatihan secara berkala kepada penyuluh pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Pengembangan dan Peningkatan SDM Penyuluh
9.	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	Memfasilitasi kegiatan kerjasama investasi	Melaksanakan promosi dan Kemitraan dengan badan usaha
		Mengintensifkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi investasi	Peningkatan Kualitas perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi pertumbuhan Investasi daerah
		Mengkaji dan mengembangkan potensi PMD	Meningkatkan kerjasama Dengan Perangkat Daerah dalam megoptimalkan potensi investasi
		Mengembangkan sistem pelayanan informasi perijinan secara elektronik	Mengembangkan sistem Pelayanan informasi perijinan secara elektronik
10.	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Keamanan Pangan	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan	Membangun tata kelola Penyediaan pangan Berbasis masyarakat bersama Pemerintah Desa
		Memperbaiki infrastruktur, teknologi dan strategi distribusi pangan	Peningkatan Infrastruktur, Teknologi dan strategi distribusi Pangan
		Meningkatkan produksi produk olahan pangan non beras	Peningkatan SDM masyarakat atas pengelolaan panganan non beras
		Meningkatkan jumlah dan jenis produk pangan yang aman dan sehat	Peningkatanketersediaan Produksi Pangan dan jaminan mutunya

		Menyusun dokumen kebijakan pangan (Rencana Induk Pangan), Peta Ketahanan dan Kerawanan pangan, NBM, dan SKPG secara berkala	Penyediaan Dokumen Kebijakan Peta ketahanan dan kerawanan Pangan
		Meningkatkan pengawasan produk pangan	Mengupayakan adanya jaminan mutu produk pangan bagi masyarakat
11.	Meningkatnya Akses terhadap Infrastruktur Jalan	Pembinaan Jasa Konstruksi	Sebagai upaya peningkatan SDM mitra dalam melaksanakan pembangunan
		Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan	Meningkatkan Kualitas layanan yang berkesinambungan
		Pembukaan Jalan ke Sentra- Sentra Produksi dan Obyek Pariwisata	Upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisata
12.	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan Sumber daya Air berbasis Masyarakat
13.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Penataan dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan	Penataan dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Berbasis masyarakat
		Peningkatan Kualitas Lingkungan	Peningkatan kualitas Lingkungan berbasis Masyarakat
14.	Meningkatnya Akses Perumahan Layak Huni	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	Layanan perumahan Kepada keluarga miskin dan Rentan
15.	Terwujudnya Sistem Transportasi yang memadai	Penyediaan Sarana Transportasi yang layak bagi Masyarakat	Transportasi darat dan laut berupa Terminal dan dermaga
		Penyediaan Moda Transportasi Bagi Masyarakat	Peningkatan kualitas Transportasi masyarakat
16.	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informatika	Penyediaan Akses Telekomunikasi yang layak bagi Masyarakat	Meningkatkan akses Masyarakat kepada Informasi berbasis desa
17.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Melaksanakan Sosialisasi, Bimtek SAKIP dan LPPD	Mendorong penerapan Pelaksanaan tupoksi yang akuntabel dan transparan
		Meningkatkan kompetensi aparatur	Melalui pendidikan penjenjangan dan tugas belajar
		Menyiapkan dokumen standar kompetensi manajerial	Sebagai dokumen rujukan Penempatan pejabat dalam jabatan
		Menyusun pedoman umum Indeks Kepuasan Masyarakat	Penerapan IKM pada seluruh unit layanan public
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Membangun tata kelola perencanaan yang transparan dan dapat Dipertanggungjawabkan
		Menyusun rencana pembangunan tepat waktu	Mengoptimalkan perbaikan tata kelola perencanaan daerah

		Menata manajemen sistem data dan informasi bagi pengambilan kebijakan pembangunan daerah	Peningkatan penyediaan data informasi pembangunan daerah
		Mengembangkan sistem penyusunan dokumen perencanaan berbasis elektronik	Penyediaan aplikasi data perencanaan, pengendalian dan evaluasi
18	Meningkatnya Kesadaran hukum masyarakat	Melakukan sosialisasi, advokasi produk hukum daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat	Untuk menyebarluaskan Peraturan Daerah terkait Trantib
		Melaksanakan penegakan PERDA baik secara persuasif maupun represif dengan melibatkan pihak yang terkait	Pelaksanaan penertiban Dilakukan secara berkala
		Meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur Satpol. PP	Untuk menyediakan aparat yang profesional dan terlatih
		Pembentukan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi	Mengupayakan peningkatan Harmonisasi dan sinkronisasi aturan antar lembaga
19.	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Meningkatkan partisipasi partai politik, masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan social politik	Meningkatkan partisipasi partai politik, masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan sosial politik
20.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro.

Indikator Kinerja Makro Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	63.89	64.17	0.44
2	Angka Kemiskinan	17.71	17.92	1.19
3	Angka Pengangguran	3.72	4.94	32.80
4	Pertumbuhan Ekonomi	0.89	1.29	44.94
5	Pendapatan Per Kapita	13,731,223	13,915,992	1.35
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.367	0.346	-5.68

Sumber Data BPS Kabupaten Manggarai Barat

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sudah cukup jelas 28	Dinas PPO
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sda 0	Dinas PPO
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda 3356 Siswa	Dinas PPO
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Sda 170	Dinas PPO
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Sda 169	Dinas PPO

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Sda 5	Dinas PPO
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	Sda 3	Dinas PPO
		8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sda 183	Dinas PPO
		9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sda 0	Dinas PPO
		10	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda 20317	Dinas PPO
		11	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Sda 2104	Dinas PPO

	12	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sda	2592	Dinas PPO
	13	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Sda	526	Dinas PPO
	14	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Sda	1143	Dinas PPO
	15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sda	474	Dinas PPO
	16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sda	157	Dinas PPO
	17	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sda	71	Dinas PPO
	18	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sda	83	Dinas PPO
	19	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sda	0	Dinas PPO

	20	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda	18,203	Dinas PPO
	21	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda	1056	Dinas PPO
	22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda	1460	Dinas PPO
	23	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda	192	Dinas PPO
	24	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda	254	Dinas PPO
	25	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sda	243	Dinas PPO
	26	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sda	64	Dinas PPO
	27	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sda	80	Dinas PPO
	28	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sda	1 PKBM dari 31 PKBM	Dinas PPO

		29	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sda	0	Dinas PPO
		30	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda	191	Dinas PPO
		31	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sda	92	Dinas PPO
		32	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sda	89	Dinas PPO
		33	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Sda	89	Dinas PPO
		34	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Sda	10	Dinas PPO
2	Kesehatan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sudah cukup jelas	2	Dinas Kesehatan
		2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sda	2	Dinas Kesehatan
		3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	1 Paket	Dinas Kesehatan

	4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Sda	189	Dinas Kesehatan
	5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	1 Paket	Dinas Kesehatan
	6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Sda	189	Dinas Kesehatan
	7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	1 Paket	Dinas Kesehatan
	8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Sda	189	Dinas Kesehatan
	9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	1 Paket	Dinas Kesehatan
	10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Sda	422	Dinas Kesehatan
	11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	1 paket	Dinas Kesehatan
	12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Sda	21 orang	Dinas Kesehatan
	13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	1 paket	Dinas Kesehatan
	14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sda	189	Dinas Kesehatan
	15	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	1 paket	Dinas Kesehatan
	16	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sda	4015	Dinas Kesehatan

		17	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	1 Paket	Dinas Kesehatan
		18	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sda	22	Dinas Kesehatan
		11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	1 Paket	Dinas Kesehatan
		12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sda	22	Dinas Kesehatan
		13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	1 Paket	Dinas Kesehatan
		14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sda	22	Dinas Kesehatan
		15	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	1 paket	Dinas Kesehatan
		16	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sda	50	Dinas Kesehatan
		17	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	1 paket	Dinas Kesehatan
		18	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sda	22	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sudah cukup jelas	273,96 Ha	Dinas PUPR
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Sda	633,96 m	Dinas PUPR

	3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sda	70,750 Ha	Dinas PUPR
	4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Sda	3,333 m	Dinas PUPR
	5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Tidak ada	Dinas PUPR
	6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Tidak ada	Dinas PUPR
	7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	3,333	Dinas PUPR
	8	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sda	3,296 Ha	Dinas PUPR
	9	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Sda	329,60 m	Dinas PUPR
	10	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sda	70,750 Ha	Dinas PUPR

	11	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Sda	3,333		Dinas PUPR
	12	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Tidak		Dinas PUPR
	13	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Tidak		Dinas PUPR
	14	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	8,894		Dinas PUPR
	15	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100 \%$			Dinas PUPR
	16	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100 \%$			Dinas PUPR
	17	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100 \%$			Dinas PUPR
	18	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada/Tidak	Ada		Dinas PUPR
	19	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada		Dinas PUPR

	20	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	Sudah cukup jelas	1	Dinas PUPR
	21	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	22	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	23	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Sudah cukup jelas	37170	Dinas PUPR
	24	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Sudah cukup jelas	37170	Dinas PUPR
	25	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	26	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	27	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	28	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR

29	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik rumah yang}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha}} \times 100 \%$	0.00	%	Dinas PUPR
30	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha}} \times 100 \%$	0.00	%	Dinas PUPR
31	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} \times 100 \%$	0.00	%	Dinas PUPR
32	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100 \%$	0.00	%	Dinas PUPR
33	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kab/Kota}} \times 100 \%$	0.00	%	Dinas PUPR
34	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Kab/Kota}} \times 100 \%$	0.00	%	Dinas PUPR

35	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\Sigma \text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\Sigma \text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada Kab/Kota}} \times 100 \%$	0.00 %	Dinas PUPR
36	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\Sigma \text{Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah di sedot}}{\Sigma \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100 \%$	0.00 %	Dinas PUPR
37	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\Sigma \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\Sigma \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}}$	0.00 %	Dinas PUPR
38	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Sudah cukup jelas	211	Dinas PUPR
39	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	Ada	Dinas PUPR
40	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	Tidak Ada	Dinas PUPR
41	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
42	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR

	43	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	44	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	45	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	Sudah cukup jelas	1,226,891	Dinas PUPR
	46	Panjang jalan yang dibangun	Sudah cukup jelas	18,620	Dinas PUPR
	47	Panjang jembatan yg dibangun	Sudah cukup jelas	76	Dinas PUPR
	48	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	49	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Sudah cukup jelas	1	Dinas PUPR
	50	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Sudah cukup jelas	11,826,83	Dinas PUPR
	51	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Sudah cukup jelas	1	Dinas PUPR
	52	Panjang jalan yang dipelihara	Sudah cukup jelas	8,824,80	Dinas PUPR
	53	Panjang jembatan yang dipelihara	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	54	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	46	Dinas PUPR

	55	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	160	Dinas PUPR
	56	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	160	Dinas PUPR
	57	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	58	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Sudah cukup jelas	76	Dinas PUPR
	59	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	60	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	61	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Sudah cukup jelas	46	Dinas PUPR

	62	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	Ada	Dinas PUPR
	63	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Sudah cukup jelas	46	Dinas PUPR
	64	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Sudah cukup jelas	46	Dinas PUPR
	65	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Sudah cukup jelas	46	Dinas PUPR
	66	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	160	Dinas PUPR
	67	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sudah cukup jelas	254	Dinas PUPR

	68 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	Tidak	Dinas PUPR
	69 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	Tidak	Dinas PUPR
	70 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	46	Dinas PUPR
	71 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	72 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	73 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	74 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
	75 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR

		76	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		77	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		78	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sudah cukup jelas	0	Dinas PRKP
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Sudah cukup jelas	90	Dinas PRKP
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Sudah cukup jelas	65	Dinas PRKP
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Sudah cukup jelas	0	Dinas PRKP
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Sudah cukup jelas	10	Dinas PRKP
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Sudah cukup jelas	10	Dinas PRKP

	7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Sudah cukup jelas	0	Dinas PRKP
	8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Sudah cukup jelas	65	Dinas PRKP
	9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Sudah cukup jelas	0	Dinas PRKP
	10	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	0	Dinas PRKP
	11	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	0	Dinas PRKP
	12	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	0	Dinas PRKP
	13	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	18.610	Dinas PRKP
	14	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	31.148	Dinas PRKP
	15	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Sudah cukup jelas	0	Dinas PRKP

	16	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Sudah cukup jelas	58.54 ha	Dinas PRKP
	17	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Sudah cukup jelas	344	Dinas PRKP
	18	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Sudah cukup jelas	0	Dinas PRKP
	19	Jumlah rumah di kab/kota	Sudah cukup jelas	49.758	Dinas PRKP
	20	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Sudah cukup jelas	344	Dinas PRKP
	21	Jumlah rumah tidak layak huni	Sudah cukup jelas	31.148	Dinas PRKP
	22	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Sudah cukup jelas	0	Dinas PRKP
	23	Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}} \times 100 \%$		0 % Dinas PRKP
	24	Jumlah rumah pembangunan baru	Sudah cukup jelas	10	Dinas PRKP
	25	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sudah cukup jelas	0	Dinas PRKP
	26	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Sudah cukup jelas	35872	Dinas PRKP
	27	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Sudah cukup jelas	0	Dinas PRKP
	28	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Sudah cukup jelas	37.042	Dinas PRKP
	29	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Sudah cukup jelas	0	Dinas PRKP

		30	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Sudah cukup jelas	0		Dinas PRKP
		31	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Sudah cukup jelas	0		Dinas PRKP
		32	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Sudah cukup jelas	0		Dinas PRKP
		33	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Sudah cukup jelas	0		Dinas PRKP
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Sudah cukup jelas	90	%	Sat. Pol PP
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Sudah cukup jelas	1404	%	Sat. Pol PP
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Sudah cukup jelas	33		Sat. Pol PP
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Sudah cukup jelas	2 Orang		Sat. Pol PP
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada/Tidak	Ada		Sat. Pol PP
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada/Tidak	Ada		Sat. Pol PP
		7	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan x 100 %	0	%	Sat. Pol PP

	8	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana $\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100 \%$	0	%	Sat. Pol PP
	9	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun $\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100 \%$	0	%	Sat. Pol PP
	10	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun $\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen rekon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100 \%$	0	%	Sat. Pol PP
	11	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan $\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	0	%	Sat. Pol PP
	12	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan $\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berda di kawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	0	%	Sat. Pol PP
	13	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pusdalops $\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berda di kawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	0	%	Sat. Pol PP

		14	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan $\times 100\%$ 0 % Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	Sat. Pol PP
		15	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB $\times 100\%$ 0 % Jumlah seluruh penetapan status KLB	Sat. Pol PP
		16	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana $\times 100\%$ 0 % Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	Sat. Pol PP
		17	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana $\times 100\%$ 0 % Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	Sat. Pol PP
		18	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi $\times 100\%$ 0 % Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	Sat. Pol PP
		19	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Sudah cukup jelas 0	Sat. Pol PP

	20	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Sudah cukup jelas	0	Sat. Pol PP	
	21	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada/Tidak	Tidak Ada	Sat. Pol PP	
	22	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Sudah cukup jelas	0	Sat. Pol PP	
	23	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sudah cukup jelas	Ada	Sat. Pol PP	
	24	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Sudah cukup jelas	9 orang	Sat. Pol PP	
	25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Sudah cukup jelas	0	Sat. Pol PP	
	26	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Sudah cukup jelas	9 orang	Sat. Pol PP	
6	Sosial	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sudah cukup jelas	2 aplikasi	Dinas Sosial

	2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Sudah cukup jelas	19.151 jiwa	Dinas Sosial
	3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Sudah cukup jelas	1 pleton (30 orang)	Dinas Sosial
	4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Sudah cukup jelas	19.151 jiwa	Dinas Sosial
	5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Sudah cukup jelas	1 unit	Dinas Sosial
	6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Sudah cukup jelas	72 orang	Dinas Sosial
	7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Sudah cukup jelas	1 unit	Dinas Sosial
	8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
	9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Sudah cukup jelas	26 orang	Dinas Sosial
	10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
	11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial

	12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
	13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
	14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Sudah cukup jelas	131 orang	Dinas Sosial
	15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Sudah cukup jelas	17 orang	Dinas Sosial
	16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
	17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
	18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
	19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Sudah cukup jelas	20 orang	Dinas Sosial

		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Sudah cukup jelas	20 orang	Dinas Sosial
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
		22	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Sudah cukup jelas	8.498 jiwa	Dinas Sosial
		23	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Sudah cukup jelas	40 KK	Dinas Sosial
		24	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
		25	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
		26	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Ada/Tidak	Tidak Ada	Dinas Sosial
7	Ketenagakerjaan	27	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Sudah cukup jelas	131 orang	Dinas Sosial
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Realisasi indikator} - \text{target indikator}}{\text{Realisasi}} \times 100 \%$	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n}}{\text{Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah instruktur pada tahun n}}{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun n}}$	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh LPK pada tahun n}} \times 100 \%$	20 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n}}{\text{Jumlah LPK yang terdata pada tahun n}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Jumlah penganggur yang dilatih	Sudah cukup jelas	90 Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n}}{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun n}} \times 100 \%$	10 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan pada tahun n}} \times 100 \%$	10 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

12	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n}} \times 100 \%$	10 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\Sigma \text{ CPMI dilatih}}{\Sigma \text{ CPMI terdaftar}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100 \%$	9.62 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

19	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Sudah cukup jelas	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100 \%$	43.75 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100 \%$	0.96 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
23	Jumlah mogok kerja	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
24	Jumlah penutupan perusahaan	Sudah cukup jelas	2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25	Jumlah perselisihan kepentingan	Sudah cukup jelas	2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
26	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Sudah cukup jelas	2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	27	Jumlah perselisihan PHK	Sudah cukup jelas	2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	28	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Sudah cukup jelas	103	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	29	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Sudah cukup jelas	2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	30	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Ada/Tidak	Tidak	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	31	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah perjanjian bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	32	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	481	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	33	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Sudah cukup jelas	148	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	34	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	35	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	36	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	37	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		38	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Sudah cukup jelas	0		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		39	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Sudah cukup jelas	0		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\Sigma \text{CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\Sigma \text{CPMI/CTKI}} \times 100 \%$	0	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		41	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Sudah cukup jelas	0		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		42	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\Sigma \text{Fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\Sigma \text{PMI yang pulang}} \times 100 \%$	0	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		43	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\Sigma \text{PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\Sigma \text{PMI/TKI}} \times 100 \%$	0	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		44	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\Sigma \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\Sigma \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100 \%$	0	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		45	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\Sigma \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100 \%$	0	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Sudah cukup jelas	0		Dinas PP, KB dan PA

	2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas PP, KB dan PA
	3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Sudah cukup jelas	0	Dinas PP, KB dan PA
	4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Sudah cukup jelas	1 Lembaga	Dinas PP, KB dan PA
	5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak ditingkat Kab/Kota}} \times 100 \%$ 100 %		Dinas PP, KB dan PA
	6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sudah cukup jelas	1 Lembaga	Dinas PP, KB dan PA
	7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)	Sudah cukup jelas	1 Lembaga	Dinas PP, KB dan PA
	8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Sudah cukup jelas	1 Lembaga	Dinas PP, KB dan PA
	9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Sudah cukup jelas	14	Dinas PP, KB dan PA
	10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Sudah cukup jelas	1 Lembaga	Dinas PP, KB dan PA

		11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	1 Lembaga	Dinas PP, KB dan PA
		12	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Sudah cukup jelas	0	Dinas PP, KB dan PA
		13	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Sudah cukup jelas	0	Dinas PP, KB dan PA
		14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100 \% = 100$		Dinas PP, KB dan PA
9	Pangan	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2	Terselurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	11 Lumbung	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada (1 Kelurahan dan Desa)	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		7	Terselurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada (6.900 Kg untuk 1 Kelurahan dan 4 Desa)		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada (100%)		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10	Pertanahan	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) $\times 100\%$	0	0%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah penerbitan SK penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee $\times 100\%$ Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform	0	0%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee x 100 % 0 % Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak x 100 % 0 % Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik x 100 % 0 % Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11	Lingkungan Hidup	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH) d. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) Nilai Realatif = $\frac{Ci}{Lij}$ $IP = \frac{\sqrt{(Ci/Lij)^2 Rata - Rata + (Ci/Lij)^2 Maksimum}}{2}$ 0 Rumus Metode IP : $0 \leq PIj \leq 1,0 \rightarrow Baik$ (memenuhi baku mutu) $1,0 < PIj \leq 5,0 \rightarrow Cemar ringan$ $5,0 < PIj \leq 10,0 \rightarrow Cemar sedang$ $PIj > 10,0 \rightarrow Cemar berat$	Dinas Lingkungan Hidup

		7	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana x 100 % 0 % target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	Dinas Lingkungan Hidup
		8	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani x 100 % 100 % Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Dinas Lingkungan Hidup
12	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan x 100 % 71.48 % Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan x 100 % 30.00 % Peristiwa perceraian yang dilaporkan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan x 100 % 100 % Peristiwa kematian yang dilaporkan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		4	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala Kabupaten Kota dalam satu tahun x 100 % 100 % 2 kali	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sudah cukup jelas 0 Desa	BPMPD

		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sda	0 Desa	BPMPD
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sda	0 Desa	BPMPD
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sda	0 Desa	BPMPD
		5	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sda	0 Desa	BPMPD
		6	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sda	0 Desa	BPMPD
		7	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sda	0 Desa	BPMPD
		8	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sda	0 Desa	BPMPD
14	Pengendalian Penduduk dan KB	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/tidak	Ada	Dinas PP, KB dan PA
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Sudah cukup jelas	36,155	Dinas PP, KB dan PA

3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{bi}{pf} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	546	Dinas PP, KB dan PA
4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}} \times 100 \%$	798.48 %	Dinas PP, KB dan PA
5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Sudah cukup jelas	18	Dinas PP, KB dan PA
6	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100 \%$	100 %	Dinas PP, KB dan PA
7	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100 \%$	59.38 %	Dinas PP, KB dan PA
8	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	36	Dinas PP, KB dan PA
9	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100 \%$	100 %	Dinas PP, KB dan PA

		10	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	42	%	Dinas PP, KB dan PA
		11	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI}}{\text{Jumlah keluarga PBI}} \times 100 \%$	9.42	%	Dinas PP, KB dan PA
15	Perhubungan	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100 \%$	100	%	Dinas Perhubungan
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100 \%$	97.57	%	Dinas Perhubungan
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan}}{\text{Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	0	%	Dinas Perhubungan
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	92.29	%	Dinas Perhubungan
		5	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	92.29	%	Dinas Perhubungan

16	Komunikasi & Informatika	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo x 100 % Jumlah perangkat daerah	90.24 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo x 100 % Jumlah perangkat daerah Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)	90.24 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ya atau tidak	Ya	Dinas Komunikasi dan Informatika
		4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub dominan instansi penyelenggara negara sesuai dengan PM kominfo No.5/2015 x 100 % Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar x 100 % Jumlah perangkat daerah	68.29 %	Dinas Komunikasi dan Informatika

6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{\text{Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100 \%$	5.56 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100 \%$	77.78 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	14.63 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	14.63 %	Dinas Komunikasi dan Informatika

13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	24.39 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai}}{\text{Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah}} \times 100 \%$	54.84 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	34.15 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo}}{\text{Jumlah ASN pengelola TIK}} \times 100 \%$	6.45 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	Ada atau Tidak	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{\sum \text{Komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\sum \text{Komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah Kabupaten}} \times 100 \%$	89.36 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\sum \text{Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\sum \text{Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten}} \times 100 \%$	90.14 %	Dinas Komunikasi dan Informatika

		20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\Sigma \text{Deseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{\Sigma \text{Deseminasi dan layanan informasi publik}} \times 100 \%$	100	%	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Koperasi & UKM	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100 \%$	0	%	Dinas Perindagkop dan UKM
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerimaan izin pembukaan kantor cabang-cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang-cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100 \%$	100	%	Dinas Perindagkop dan UKM
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	74.48	%	Dinas Perindagkop dan UKM
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100 \%$	0	%	Dinas Perindagkop dan UKM
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	8.28	%	Dinas Perindagkop dan UKM

6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100 \%$	87.55 %	Dinas Perindagkop dan UKM
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM
8	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat nomor induk koperasi (NIK)}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM
9	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM
10	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM
11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM
13	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM

		14	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem data online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100 \%$	3.57 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		15	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100 \%$	0.00 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		16	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100 \%$	0.00 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		17	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100 \%$	28.74 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		18	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100 \%$	4.75 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		19	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100 \%$	0.00 %	Dinas Perindagkop dan UKM
18	Penanaman Modal	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Tidak Ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Tidak Ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

	3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	Tidak Ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
	4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	2 kali kegiatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
	5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	Tidak Ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
	6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
	7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Tidak Ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
	8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	1.771 izin	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
	9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	Rp8,877,201,681,691	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
	10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	3 orang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	49 perusahaan (PMA+PMDN)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	30 data informasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	75 orang	Dinas PPO
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas PPO
		3	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	62 orang	Dinas PPO
		4	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	150	Dinas PPO
		5	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	18 orang	Dinas PPO
		6	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Tidak Ada	Dinas PPO
20	Statistik	1	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Ada	BP4D
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	Tidak Ada	BP4D
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Tidak Ada	BP4D
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Tidak Ada	BP4D



		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Tidak Ada	BP4D
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100 \%$	0.00 %	BP4D
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100 \%$	0.00 %	BP4D
21	Persandian	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100 \%$	0.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi persandian}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100 \%$	20 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{\text{Jumlah SE atau aset informasi yang telah di audit dengan resiko kategori rendah}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100 \%$	20 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100 \%$	0.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Kebudayaan	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	135	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

	2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	135	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemerinkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	7	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23	Perpustakaan	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}}$	0.06	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		2	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan perpustakaan yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya}} \times 100 \%$	3.08 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	0.00010		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan x 100 % Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	0.00	%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	8,204		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	402 eksemplar		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
24	Kearsipan	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip x 100 % Jumlah seluruh arsip aktif	59.46	%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip x 100 % Jumlah seluruh arsip inaktif	100	%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik x 100 % Jumlah seluruh arsip statistik	100	%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

	4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{\text{Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan Kabupaten}} \times 100 \%$	0.00 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	7	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Kabupaten	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25 Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	1057 RTP	Dinas Kelautan dan Perikanan



		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kab/Kota}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelemahan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	18 kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	181.114 ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan
26	Pariwisata	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	11 lokasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	10 jenis	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	597	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Tidak Ada	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100 \%$	8.22 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	17 Desa	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	Pertanian	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	671,876.79	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		2	Prasara pertanian yang digunakan	Jumlah prasara pertanian yang digunakan	338 unit	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	Tidak Ada	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		4	Persentase prasara yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasara yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasara yang dibangun}} \times 100 \%$	78.24 %	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan

		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100 \%$	0.00 %	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100 \%$	118.99 %	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	0	KPH Manggarai Barat
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	0	KPH Manggarai Barat
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	0	KPH Manggarai Barat
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	0	KPH Manggarai Barat
29	Energi Sumber Daya Mineral	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	1 Ijin	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
30	Perdagangan	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100 \%$	0.00 % 100 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		2	Persentase penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Perindagkop dan UKM

		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab/Kota}} \times 100 \%$	10	%	Dinas Perindagkop dan UKM
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri:			
			a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk menerima waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar			
			b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	$\frac{\text{Jumlah permohonan STPW untuk menerima waralaba dari waralaba dalam negeri}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk menerima waralaba dari waralaba dalam negeri}} \times 100 \%$	0.00	%	Dinas Perindagkop dan UKM
			c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri :			
				Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar			
				$\frac{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri}} \times 100 \%$	0.00	%	Dinas Perindagkop dan UKM
				Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri :			
				Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar			
				$\frac{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri}} \times 100 \%$	0.00	%	Dinas Perindagkop dan UKM

		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota $\times 100\%$ Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	0.00	%	Dinas Perindagkop dan UKM
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1×24 jam) $\times 100\%$ Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	0.00	%	Dinas Perindagkop dan UKM
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	50.00	%	Dinas Perindagkop dan UKM
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	$X = a/b$ Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	0.00	%	Dinas Perindagkop dan UKM
		9	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a/b$ a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	40.54	%	Dinas Perindagkop dan UKM

		10	Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab/Kota}} \times 100 \%$	8.43 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		11	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan}} \times 100 \%$	0.00 %	Dinas Perindagkop dan UKM
31	Perindustrian	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100 \%$	0.00 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	0.00	Dinas Perindagkop dan UKM
		3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100 \%$	0.00 %	Dinas Perindagkop dan UKM

		5	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota di SIINas $\times 100 \%$ Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota	0.00 %	Dinas Perindagkop dan UKM
--	--	---	---	---	--------	---------------------------

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{2,773}{10,753} \times 100 = 25.79 \%$	Dinas PPO
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{31,620}{32,700} \times 100 = 96.70 \%$	Dinas PPO
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{18,256}{19,756} \times 100 = 92.41 \%$	Dinas PPO
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{773}{67,077} \times 100 = 1.15 \%$	Dinas PPO
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{215}{266,336} \times 100 = 0.08 \%$	Dinas Kesehatan
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{2}{3} \times 100 = 66.667 \%$	Dinas Kesehatan
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{4,426}{6,117} \times 100 = 72.36 \%$	Dinas Kesehatan
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{5,276}{5,276} \times 100 = 100 \%$	Dinas Kesehatan
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{5,122}{5,220} \times 100 = 98.12 \%$	Dinas Kesehatan

		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{8,581}{8,581} \times 100 = 100.00 \%$	Dinas Kesehatan
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{9,950}{9,950} \times 100 = 100.00 \%$	Dinas Kesehatan
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{137,741}{172,622} \times 100 = 79.79 \%$	Dinas Kesehatan
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{17,673}{24,757} \times 100 = 71.39 \%$	Dinas Kesehatan
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{18,766}{18,766} \times 100 = 100.00 \%$	Dinas Kesehatan
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{2,271}{2,271} \times 100 = 100.00 \%$	Dinas Kesehatan
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{441}{441} \times 100 = 100 \%$	Dinas Kesehatan
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{1,586}{1,586} \times 100 = 100.00 \%$	Dinas Kesehatan
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{4,195}{7,213} \times 100 = 58.16 \%$	Dinas Kesehatan

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{83.47}{273.960} \times 100 = 30.47 \%$	Dinas PUPR
	2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{3,333}{30,750} \times 100 = 10.84 \%$	Dinas PUPR
	3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{19.286}{36.479} \times 100 = 52.87 \%$	Dinas PUPR
	4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{186,547}{258,776} \times 100 = 72.09 \%$	Dinas PUPR
	5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{37,042}{49,886} \times 100 = 74.25 \%$	Dinas PUPR
	6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0.00 \%$	Dinas PUPR
	7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{560.884}{1,226.89} \times 100 = 45.72 \%$	Dinas PUPR
	8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{160}{762} = 0.21$	Dinas PUPR
	9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{76}{76} \times 100 = 100 \%$	Dinas PUPR

4	Perumahan Rakyat dan Kawasan	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0.00 \%$	Dinas PRKP
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0.00 \%$	Dinas PRKP
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{0}{58.54} \times 100 \% = 0.00 \%$	Dinas PRKP
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{31,492}{49,758} \times 100 = 63.29 \%$	Dinas PRKP
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{0}{49,758} \times 100 = 0.00 \%$	Dinas PRKP
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{90}{90} \times 100 = 100 \%$	Sat. Pol PP
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{33}{33} \times 100 = 100 \%$	Sat. Pol PP
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0	Sat. Pol PP
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	Sat. Pol PP
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	Sat. Pol PP

		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{10}{14} \times 100 = 71.43 \%$	Sat. Pol PP
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	1.07	Sat. Pol PP
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{98}{19,151} \times 100 = 0.51 \%$	Dinas Sosial
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{8,498}{8,498} \times 100 = 100.00 \%$	Dinas Sosial
7	Ketenagakerjaan	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{3}{5} \times 100 = 60.00 \%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{410}{192,128} \times 100 = 0.21 \%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{0.89}{192,128} \times 100 = 0.00 \%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{91}{208} \times 100 = 43.75 \%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{50}{148} \times 100 = 33.784 \%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	74,672,358,469 659,082,250,496	x 100 = 11.33 %	Dinas PP, PA dan KB
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	35 97,722	x 100 = 0.04 %	Dinas PP, PA dan KB
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10.55 132.2	x 100.000 = 7.98	Dinas PP, PA dan KB
		1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	10.55 130.70	x 100 = 8.07 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0 0	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKPP
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0 0	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKPP
9	Pangan	3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0 0	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKPP
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0 0	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKPP
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0 0	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKPP
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0 0	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKPP
		1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0 0	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKPP
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0 0	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKPP
10	Pertanahan	3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0 0	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKPP
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0 0	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKPP
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0 0	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKPP
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0 0	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKPP
		1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0 0	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKPP
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0 0	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKPP

11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	$\begin{array}{l} \text{IKA} = 0 \\ \text{IKD} = 83.70 \\ \text{ITH} = 70.42 \end{array}$	Dinas Lingkungan Hidup
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	$\frac{10,220}{10,594.125} \times 100 = 96.47 \%$	Dinas Lingkungan Hidup
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{0}{42} \times 100 = 0.00 \%$	Dinas Lingkungan Hidup
12	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	$\frac{171,979}{177,253} \times 100 = 97.02 \%$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{13,069}{89,702} \times 100 = 14.57 \%$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		3	Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{77,942}{89,755} \times 100 = 86.84 \%$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{3}{41} \times 100 = 7.32 \%$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{45}{113} \times 100 = 39.82 \%$	BPMPD
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{45}{45} \times 100 = 100 \%$	BPMPD
14	Pengendalian Penduduk dan KB	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	$\frac{3,602}{1,000} = 3.60$	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{21,470}{36,155} \times 100 = 59.38 \%$	Dinas PP, PA dan KB
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{6,162}{36,155} \times 100 = 0.17 \%$	Dinas PP, PA dan KB

15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	$\frac{IK1 \text{ Angkutan Jalan} + IK2 \text{ Angkutan Sungai dan Penyebrangan}}{2}$ $IK1 \text{ (Angkutan Jalan)} = \frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek}}$ $IK2 \text{ (Angka, Sungai, Danau dan Penyebrangan)} = \frac{\text{Jumlah lintasan penyebrangan yg beroperasi}}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyebrangan}}$ $IK1 \text{ (Angkutan Jalan)} = \frac{8+12 \text{ Trayek}}{12+45 \text{ Trayek}} = \frac{20}{57} = 0.35$ $IK2 \text{ (Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan)} = \frac{5 \text{ Trayek}}{10 \text{ Trayek}} = 0.50$ $\text{Rasio Konektivitas Kabupaten} = \frac{0.35 + 0.50}{2} = 0.43$	Dinas Perhubungan
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	$\frac{0.35 + 0.50}{2} = 0.43$	Dinas Perhubungan
16	Komunikasi & Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{37}{41} \times 100 = 90.24 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{8}{10} \times 100 = 80.00 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{46,114}{173,038} \times 100 = 26.65 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Koperasi & UKM	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{91}{145} \times 100 = 62.76 \%$	Dinas Perindagkop dan UKM
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{840}{1,053} \times 100 = 79.77 \%$	Dinas Perindagkop dan UKM

18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	$\frac{433,958,569,699}{8,443,243,111,992} \times 100 = 5.14 \%$	Dinas PMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{360}{77,154} \times 100 = 0.47 \%$	Dinas PPO
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasvarakatan	$\frac{758}{77,154} \times 100 = 0.98 \%$	Dinas PPO
		3	Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Perunggu	Dinas PPO
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{13}{41} \times 100 = 31.71 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{13}{41} \times 100 = 31.71 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{5}{5} \times 100 = 100 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{33}{33} \times 100 = 100 \%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Total jumlah pengunjung perpustakaan = 8204 Lamanya hari 48 minggu 171	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	7,114	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	6.67	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	P. Tangkap = 6.993.535 P. Budidaya = 119.415 7,112,950.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{-15,116}{18,350} \times 100 = -82.38 \%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{31,133}{26,072} \times 100 = 119 \%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		3	Tingkat Hunian Akomodasi	$\frac{75,780}{2,100} \times 100 = 3609 \%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Rp. 27.696.490.384 PDRB Rp. 3.519.340.010.000 0.79 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Sektor Pariwisata Terhadap PAD Rp. 27.696.490.384 PAD Kab. Manggarai Barat Rp. 145.400.072.597 19.05 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{247,773.90}{44,180.10} \times 100 = 560.83 \%$	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkehunan
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{2,241}{3,484} \times 100 = 64.32 \%$	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkehunan

28	Energi Sumber Daya Mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	1	$\times 100 = 100 \%$	Dinas PMPTSP
				1		
29	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	26	$\times 100 = 14.61 \%$	Dinas Perindagkop dan UKM
				178		
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	7,285.00	$\times 100 = 50.20 \%$	Dinas Perindagkop dan UKM
				14,511.30		
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	28	$\times 100 = 8.43 \%$	Dinas Perindagkop dan UKM
				332		
30	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	-426	$\times 100 = -93.42 \%$	Dinas Perindagkop dan UKM
				456		
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	$\times 100 = 0.00 \%$	Dinas Perindagkop dan UKM
				0		
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	$\times 100 = 0.00 \%$	Dinas Perindagkop dan UKM
				39		
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	$\times 100 = 0.00 \%$	Dinas Perindagkop dan UKM
				39		

		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{0}{39} \times 100 = 0.00 \%$	Dinas Perindagkop dan UKM
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	$\frac{0}{39} \times 100 = 0.00 \%$	Dinas Perindagkop dan UKM
31	Transmigrasi	1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	2 Lokasi Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{104,069,008,792.25}{1,403,591,351,175} \times 100 = 7.41 \%$	Dinas PKAD
		2	Rasio PAD	$\frac{270,410,736,984}{3,611,199.39} \times 100 = 7,488,114.27 \%$	Dinas PKAD
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{710,669,872,356}{1,099,460,949,420.24} \times 100 = 64.64 \%$	Dinas PKAD
		4	Opini Laporan Keuangan	Ada (Opini BPK tahun 2012 s/d 2021)	Dinas PKAD
		5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{1,099,460,949,420.24}{1,403,591,351,175.00} - 1 \times 100 = 78.33 \%$	Dinas PKAD
		6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{155,172,782,150.44}{270,410,736,984.00} - 1 \times 100 = 57.38 \%$	Dinas PKAD

		7	Assets Management	Ya	Dinas PKAD
		8	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{37,766,015,547.02}{1,151,092,170,354.51} \times 100 = 3.28 \%$	Dinas PKAD
2	Inspektorat	1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 2,776 (belum mencapai level 3)	Inspektorat
		2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat berada pada Level 3	Inspektorat
3	Ekonomi Pembangunan dan SDA	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{92,138,333,559} \times 100 = 0.00 \%$	Bagian Ekonomi, Pembangunan dan SDA
		2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{92,138,333,559}{860,971,130,019} \times 100 = 10.70 \%$	Bagian Ekonomi, Pembangunan dan SDA
4	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{185}{1,069} \times 100 = 17.31 \%$	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{3,029}{782} \times 100 = 387.34 \%$	BKPPD
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{298}{1,221} \times 100 = 24.41 \%$	BKPPD
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{41}{923} \times 100 = 4.44 \%$	BKPPD

6	Komunikasi & Informatika	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	11	$\times 100 =$	26.83 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
				41			
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	11	$\times 100 =$	100.00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
				11			

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan	1	Angka Melek Huruf	%	4
		2	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	98
		3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	9
2.	Terwujudnya Generasi Muda yang Berprestasi dan Berdaya Saing	4	Persentase Cabang Olahraga yang Memperoleh Medali Emas	7	7
		5	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	44	44
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6	Angka Usia Harapan Hidup	70	70

4.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	7	Persentase Penduduk yang Bekerja	73	73
		8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1.7	1.7
5.	Menurunnya Angka Kemiskinan	9	Persentase KK Miskin	15.86	15.86
		10	Indeks Kedalaman Kemiskinan	3	3
		11	Indeks Keparahan Kemiskinan	%	0.7
6.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	12	Indeks Literasi	%	6.12
7.	Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah	13	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Org	211,749
		14	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	7.6
8.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	15	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	17.89
		16	Pertumbuhan PDRB	%	6.37
9.	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	17	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp	2,095,944 ,923,908
10.	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Keamanan Pangan	18	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	73
11.	Meningkatnya Akses terhadap Infrastruktur Jalan	19	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (>20 Km/Jam)	%	72.6
12.	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	20	Luas Daerah Irigasi (DI) (ha) yang Diairi secara Kontinyu	Ha	19,585
		21	Persentase RT yang Terlayani Air Bersih	%	77.92
13.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	22	Persentase RT Terlayani Sanitasi Dasar	%	43.58
		23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	B/S/TB	Baik
14.	Meningkatnya Akses Perumahan Layak Huni	24	Persentase Rumah Layak Huni	%	13.54

15.	Terwujudnya Sistem Transportasi yang Memadai	25	Persentase Sarana Transportasi Terbangun	%	81.48
16.	Meningkatnya Layanan Komunikasi & Informatika	26	Persentase Desa / Kelurahan yang Terakses Telekomunikasi	%	100
17.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	27	Nilai AKIP	nilai	70 (BB)
		28	Nilai LPPD	nilai	Tinggi
		29	Opini BPK	opini	WTP
		30	Indeks Kepuasan Masyarakat	B/S/TB	Baik
		31	Indeks Arsip	%	43
18.	Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat	32	Persentase Penegakan Perda	%	100
		33	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	0,23
19.	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	34	Persentase Keikutsertaan Wajib Pilih dalam Pemilu	%	77%
20.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	35	Persentase Desa yang Mengalami Kenaikan Status Desa (Berkembang ke Maju)	%	1.83

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Kabupaten Manggarai Barat dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021

Adapun realisasi perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Pengukuran Kinerja
Pemerintah Kab. Manggarai Barat Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7

1.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan	1	Angka Melek Huruf	%	98	97.24	99.22
		2	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9	7.56	84.00
		3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.8	12.29	104.15
2.	Terwujudnya Generasi Muda yang Berprestasi dan Berdaya Saing	4	Persentase Cabang Olahraga yang Memperoleh Medali Emas	%	7	0.00	0.00
		5	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%	44	74.57	169.48
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70	67.46	96.37
4.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	7	Persentase Penduduk yang Bekerja	%	73.00	73.18	100.25
		8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1.70	4.94	34.41
5.	Menurunnya Angka Kemiskinan	9	Persentase KK Miskin	%	15.86	18.01	88.06
		10	Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	3	3.39	88.50
		11	Indeks Keparahan Kemiskinan	%	0.7	0.79	88.61
6.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	12	Indeks Literasi	%	6.12	2.96	48.33
7.	Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah	13	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Org	211.74 9	60.439	28.543
		14	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	7.60	0.00	0.00
8.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	15	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	17.89		
		16	Pertumbuhan PDRB	%	6.37	1.29	20.25
9.	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	17	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Rp	2,095,944 ,923,908	433,958,5 69,699	20.70
10.	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Keamanan Pangan	18	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	73.00	66.70	91.37
11.	Meningkatnya Akses terhadap Infrastruktur Jalan	19	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (>20 Km/Jam)	%	72.60	62.97	86.73
12.	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	20	Luas Daerah Irigasi (DI) (ha) yang Diairi secara Kontinyu	Ha	19.585	19.286	98.47
		21	Persentase RT yang Terlayani Air Bersih	%	77.92	72.09	92.52
13.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	22	Persentase RT Terlayani Sanitasi Dasar	%	43.58	74.25	170.38

		23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	B/S/TB	Baik	**	**
14	Meningkatnya Akses Perumahan Layak Huni	24	Persentase Rumah Layak Huni	%	13.54	62.60	462.33
15	Terwujudnya Sistem Transportasi yang Memadai	25	Persentase Sarana Transportasi Terbangun	%	81.48	87.50	107.39
16	Meningkatnya Layanan Komunikasi & Informatika	26	Persentase Desa / Kelurahan yang Terakses Telekomunikasi	%	100.00	97.00	97.00
17	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	27	Nilai AKIP	nilai	70 (BB)	*	
		28	Nilai LPPD	nilai	Tinggi	*	
		29	Opini BPK	opini	WTP	WTP	100
		30	Indeks Kepuasan Masyarakat	B/S/TB	Baik	B	100
		31	Indeks Arsip	%	43	33.33	77.51
18	Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat	32	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100
		33	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	0.23	5.00	2174
19	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	34	Persentase Keikutsertaan Wajib Pilih dalam Pemilu	%	77	77.91	101.18
20	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	35	Persentase Desa yang Mengalami Kenaikan Status Desa (Berkembang ke Maju)	%	1.83	4.44	242.62

Ket.

*: Dalam proses penyusunan/belum diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri

** :Dalam proses penyusunan/belum diumumkan oleh Kementerian PANRB

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021, serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama segenap komponen masyarakat telah berupaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Analisis atas realisasi dan capaian indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan.

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) mencerminkan kemampuan baca tulis penduduk. Angka melek huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk Manggarai Barat terbuka terhadap pendidikan.

Realisasi Angka melek huruf tahun 2021 97,24% mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2020 sebesar 95,89%, artinya dari total penduduk Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 yang berusia >15 tahun sebanyak 182.891 orang, yang sudah melek huruf berjumlah 175.374 orang (95,89%) dan yang masih buta huruf sejumlah 7.517 orang (4.11%).

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah artinya jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat usia 15 tahun keatas yang menyelesaikan atau sedang mengikuti pendidikan formal beserta dengan lama pendidikan (sekolah).

Realisasi kinerja angka rata-rata lama sekolah tahun 2021 7.56 tahun, mengalami penurunan jika dibanding tahun 2020 sebesar 8.40 tahun.

c. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 -18 tahun karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dengan realisasi 12,29 tahun,

mengalami penurunan jika dibanding tahun 2020 dengan realisasi 12.30 tahun

2. Terwujudnya Generasi Muda yang Berprestasi dan Berdaya Saing

a. Persentase Cabang Olahraga yang Memperoleh Medali Emas

Pada tahun 2020 maupun tahun 2021 Persentase Cabang Olahraga yang Memperoleh Medali Emas dengan realisasi sebesar 0%, tidak tercapainya indikator Cabang Olahraga yang Memperoleh Medali Emas disebabkan tidak dilaksanakannya even olahraga tingkat provinsi karena pandemi Covid-19

b. Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif

Pada tahun 2021 Persentase organisasi Kepemudaan yang aktif dengan realisasi 74.57%, tidak mengalami peningkatan realisasi jika di banding dengan realisasi pada tahun 2020.

3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

a. Angka usia harapan hidup

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata estimasi lamanya tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup dihitung melalui pendekatan tidak langsung, yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH). Perhitungan Angka Harapan Hidup tidak dapat kami hitung sendiri karena memerlukan program dan metode tertentu dalam perhitungannya sehingga Angka harapan hidup di rilis oleh BPS Kabupaten Manggarai Barat dan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup dengan realisasi 67.46 tahun, atau meningkat jika dibandingkan tahun 2020 dengan realisasi 67.38 tahun. Angka harapan hidup dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari realisasi tahun 2017 sampai tahun 2021.

4. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

a. Persentase Penduduk yang Bekerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan.

Pada tahun 2021 Persentase Penduduk yang Bekerja dengan realisasi 73.18%, atau menurun jika dibandingkan tahun 2020 dengan realisasi 78.52%.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka dengan realisasi 4.94% atau menurun jika dibandingkan tahun 2020 dengan realisasi 3.72%.

5. Menurunnya Angka Kemiskinan

a. Persentase KK Miskin

Pada tahun 2021 Persentase KK Miskin dengan realisasi sebesar 19.54%, atau mengalami peningkatan persentase KK Miskin jika dibanding tahun 2020 15.59%. disebabkan munculnya Pandemi Covid-19 dimana banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga menambah daftar masyarakat miskin baru di seluruh daerah yang cukup besar terhadap menurunnya tingkat kesejahteraan

hidup masyarakat.

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Pada Pada tahun 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan realisasi sebesar 3.55%, atau mengalami peningkatan realisasi dibanding tahun 2020 dengan persentase 3.09%. artinya Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

c. Indeks Keparahan Kemiskinan

Pada Pada tahun 2021 Indeks Keparahan Kemiskinan dengan realisasi sebesar 0.99%, atau mengalami peningkatan realisasi dibanding tahun 2020 dengan persentase 0.79%. artinya Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

6. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

a. Indeks Literasi

Pada Pada tahun 2021 Indeks Literasi dengan realisasi sebesar 3.89%, atau menurun jika dibandingkan tahun 2020 dengan indeks 6.21%.

7. Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah

a. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Pada Pada tahun 2021 Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan realisasi 60.439 orang, atau mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 dengan 44.505 orang.

b. Lama Tinggal Wisatawan

Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 berdasarkan hasil survey Tahun 2020 yaitu 5,88 hari. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,87 hari. Data angka lama tinggal wisatawan ini didapat dari hasil survey Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai barat bekerja sama dengan SusTour. Survey dilaksanakan dengan memilih 500 responden yang

diambil secara acak.

8. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah

a. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pada tahun 2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebesar 14.72%, atau meningkat jika dibandingkan tahun 2020 dengan indeks 8.24%.

b. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai tambah yang diproduksi oleh semua unit usaha pada satu daerah tertentu dalam periode waktu tertentu. Dengan kata lain pengertian PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Fungsi PDRB sebagai indikator ekonomi sangat penting bagi daerah. PDRB adalah salah satu indikator untuk memberikan gambaran ekonomi di daerah.

Pada tahun 2021 Pertumbuhan PDRB dengan realisasi sebesar 1.29% ,atau mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 0.9%.

9. Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN

a. Nilai Investasi PMA dan PMDN

Pada tahun 2021 Nilai Investasi PMA dan PMDN dengan realisasi sebesar Rp.433,958,569,699, atau menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.1,331,263,628,999.

10. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Keamanan Pangan

a. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Pada tahun 2021 Skor Pola Pangan Harapan dengan

realisasi sebesar 66.19, atau menurun jika dibandingkan tahun 2020 dengan realisasi 74.62.

11. Akses terhadap Infrastruktur Jalan

a. Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (>20 Km/Jam)

Pada Pada tahun 2021 Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (>20 Km/Jam) dengan realisasi sebesar 62.97%, atau meningkat jika dibandingkan tahun 2020 dengan realisasi 45.72%.

12. Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

a. Luas Daerah Irigasi (DI) (ha) yang Diairi secara Kontinyu

Pada Pada tahun 2021 Luas Daerah Irigasi (DI) (ha) yang Diairi secara Kontinyu dengan realisasi sebesar 19.286 ha, atau meningkat jika dibandingkan tahun 2020 dengan realisasi 18.751 ha.

b. Persentase RT yang Terlayani Air Bersih

Pada Pada tahun 2021 Persentase RT yang Terlayani Air Bersih dengan realisasi sebesar 72.09%, atau meningkat jika dibandingkan tahun 2020 dengan realisasi 61.01%.

13. Meningkatnya Kualitas Lingkungan

a. Persentase RT Terlayani Sanitasi Dasar

Pada Pada tahun 2021 Persentase RT Terlayani Sanitasi Dasar dengan realisasi sebesar 74.25%, atau meningkat jika dibandingkan tahun 2020 dengan realisasi 65.54%.

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2020 tingkat Kabupaten Manggarai Barat tidak memperoleh nilai dikarenakan salah satu dari tiga indikator IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) tidak memperoleh nilai. Hal ini disebabkan karena dari delapan (8) parameter kualitas air yang wajib diuji hanya tujuh yang bisa dilakukan sedangkan 1

parameternya tidak bisa diuji karena belum terakreditasinya laboratorium di provinsi untuk mengukur terkait parameter kandungan fosfat pada air, sehingga berdampak pada penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan.

14. Meningkatnya Akses Perumahan Layak Huni

a. Persentase Rumah Layak Huni

Pada Pada tahun 2021 Persentase Rumah layak huni dengan realisasi sebesar 62.60%, atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan realisasi 36.62%.

15. Terwujudnya Sistem Transportasi yang Memadai

a. Persentase Sarana Transportasi Terbangun

Pada Pada tahun 2021 Persentase Sarana Transportasi Terbangun dengan realisasi sebesar 87.50%, atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan realisasi 83.00.

16. Meningkatnya Layanan Komunikasi & Informatika

a. Persentase Desa/ Kelurahan yang Terakses Telekomunikasi

Pada Pada tahun 2021 Persentase Desa/Kelurahan yang Terakses Telekomunikasi dengan realisasi sebesar 97.00%, atau meningkat jika dibandingkan tahun 2020 dengan realisasi 90.00%.

17. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik

a. Nilai AKIP

Realisasi indikator kinerja Nilai AKIP pada tahun 2020 dengan nilai 61.60 (B), atau menurun jika dibandingkan tahun 2019 dengan nilai 63.12 (B).

b. Nilai LPPD

Realisasi indikator Nilai LPPD pada tahun 2020 belum dapat dihitung karena belum diumumkan/dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

c. Opini BPK

Pada Pada tahun 2021 indikator Opini BPK dengan realisasi

WTP, atau realisasi sama dengan pencapaian tahun 2020 dengan Opini WTP.

d. Indeks Kepuasan Masyarakat

Maksud pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat kinerja perangkat daerah secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja yang diberikan oleh aparatur.

Pada Pada tahun 2021 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi Baik (82.30), atau menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 B (84.78).

e. Indeks Arsip

Pada Pada tahun 2021 indikator Indeks Arsip dengan realisasi 33.33%, atau meningkat jika dibandingkan tahun 2020 13.95%.

18. Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat

a. Persentase Penegakan Perda

Pada tahun 2021, Persentase Penegakan Peraturan Daerah dengan realisasi 100%, atau realisasi sama dengan pencapaian tahun 2020 sebesar 100%. Jumlah Perda yg memuat sanksi yang ditegakan pada tahun 2020 dengan jumlah 94 Peraturan Daerah, sedangkan Jumlah keseluruhan Perda yg memuat sanksi dengan jumlah 94 Peraturan Daerah.

b. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Pada Pada tahun 2021 indikator Angka Kriminalitas yang Tertangani dengan realisasi 0.05%, atau menurun jika dibanding tahun 2020 0.08%, artinya angka kriminalitas di kabupaten Manggarai Barat mengalami penurunan.

19. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat

a. Persentase Keikutsertaan Wajib Pilih dalam Pemilu

Pada tahun 2021 secara umum Kabupaten Manggarai Barat tidak melaksanakan pemilihan umum, karena pemilihan Kepala

Daerah telah dilaksanakan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 Persentase Keikutsertaan Wajib Pilih dalam Pemilu dengan realisasi 77.91%.

20. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Persentase Desa yang Mengalami Kenaikan Status Desa (Berkembang ke Maju)

a. Desa yang Mengalami Kenaikan Status Desa (Berkembang ke Maju)

Pada tahun 2021, Persentase Desa yang Mengalami Kenaikan Status Desa (Berkembang ke Maju) mengalami penurunan karena jumlah desa berkembang mengalami peningkatan.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pend

1.1 Angka Melek Huruf

Pada tahun 2021 realisasi kinerja Angka melek huruf 97,24% dari target yang ditetapkan sebesar 98,00%, dengan tingkat capaian kinerja 99,22% dengan kategori **Baik**, artinya dari total penduduk Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2021 sebanyak 259.566 orang, yang sudah melek huruf 252.402 orang (97.24) dan yang masih buta huruf sebanyak 7.164 orang (2.76%).

1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Pada tahun 2021 realisasi kinerja Angka Rata-rata lama sekolah 7.56 tahun dari target 9 tahun dengan tingkat capaian 84.00 % dengan kategori **Baik**, artinya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Manggarai Barat adalah 7.56 tahun atau rata-rata menyelesaikan pendidikan sampai dengan kelas II SMP. Dengan kondisi ini Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga harus dapat mengambil kebijakan, dalam rangka meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Misalnya meningkatkan pembangunan unit sekolah atau ruang kelas

baru, pemberian beasiswa bagi penduduk kurang mampu, pembebasan uang sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi.

1.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Pada tahun 2021 Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Manggarai Barat dengan realisasi 12,29 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 11,8 %, dengan capaian 104.15% dengan kategori **Sangat Baik**. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7-18 tahun) di masa mendatang adalah selama 12,29 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan SMA kelas XII.

2. Terwujudnya Generasi Muda yang Berprestasi dan Berdaya Saing

2.1 Persentase Cabang Olahraga yang Memperoleh Medali Emas

Pada tahun 2021 Persentase Cabang Olahraga yang Memperoleh Medali Emas dengan realisasi sebesar 0% dari target 7,00%, tidak tercapainya indikator Cabang Olahraga yang Memperoleh Medali Emas disebabkan tidak dilaksanakannya even olahraga tingkat provinsi karena pandemi Covid-19, namun atlet Kabupaten Manggarai Barat memperoleh medali perunggu pada dari cabang kempo mewakili kontingen NTT di PON Papua tahun 2021.

2.2 Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif

Pada tahun 2021 Persentase organisasi Kepemudaan yang aktif dengan realisasi 74.57% dari target 44.00%, dengan capaian 169.48 dengan kategori **Sangat Baik**. Dari 59 organisasi Kepemudaan yang terdaftar, 54 di antaranya tercatat sebagai organisasi kepemudaan yang aktif. Dengan perhitungan persentase jumlah organisasi kepemudaan aktif dibanding jumlah organisasi kepemudaan $(54/59 \times 100) = 74.57\%$.

3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

3.1 Angka usia harapan hidup

Pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup dengan realisasi 67.46 tahun dari target 70.00 tahun, dengan capaian 96.47% dengan kategori **Baik**. Angka kematian Bayi merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 sampai 1 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Pada tahun 2021, jumlah bayi yang meninggal sebanyak 67 orang dari 5.220 KH. Dapat dihitung, bahwa angka kematian bayi sejumlah 12,84/1.000 KH. indikator ini masih jauh di atas angka target yakni 13/1.000 KH

4. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

4.1 Pada tahun 2021 Persentase Penduduk yang Bekerja dengan realisasi 73.18% dari target 73.00% tingkat capaian 100.25% dengan kategori **Sangat Baik**.

4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka dengan realisasi 4.94% dari target 1.7% tingkat capaian 34.41% dengan kategori **Kurang**.

5. Menurunnya Angka Kemiskinan

5.1 Persentase KK Miskin

Pada tahun 2021 Persentase KK Miskin dengan realisasi sebesar 19.54 % dari target 15,86 %, tingkat capaian 81,17 % dengan kategori **Baik**. Jumlah KK Miskin dalam DTKS Kabupaten Manggarai Barat per 31 Desember 2021 52.035 Jiwa sedangkan Jumlah Total Penduduk Kabupaten Manggarai Barat per 31 Desember 2021 266.336 Jiwa.

5.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Pada Pada tahun 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan dengan realisasi sebesar 3.55 % dari target 3.00 % tingkat capaian

84.51%, dengan kategori **Baik**.

5.3 Indeks Keparahana Kemiskinan

Pada Pada tahun 2021 Indeks Keparahana Kemiskinan dengan realisasi sebesar 0.99% dari target 0.70% tingkat capaian 70.71%, dengan kategori **Cukup**.

6. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

6.1 Indeks Literasi

Pada Pada tahun 2021 Indeks Literasi dengan realisasi sebesar 3.89% dari target 6.12% tingkat capaian 63.51%, dengan kategori **Cukup**.

7. Meningkatnya Peran Sektor Pariwisata Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah

7.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Pada Pada tahun 2021 Jumlah Kunjungan Wisatawandengan realisasi 60.439 orang dari target 211.749 orang, tingkat capaian 24.54%, dengan kategori **Kurang**.

7.2 Lama Tinggal Wisatawan

Indikator Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2021 tidak dapat diukur disebabkan karena kegiatan exit survey yang selama ini dilakukan Dinas Pariwisata, Ekonomi kreatif dan Kebudayaan guna memperoleh data – data yang salah satunya adalah pengukuran tingkat lama tinggal Wisatawan tidak dilakukan/dilaksanakan yang disebabkan kurangnya anggaran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan di Tahun 2021karena Refocussing Anggaran.

8. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah

8.1 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Persentase PAD Terhadap Pendapatan pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar 14.72 % dari target 17,89 %, tingkat capaian 82.28 % dengan kategori **Baik**. Dengan formula perhitungan adalah: Persentase PAD Terhadap Pendapatan =

Pendapatan Asli Daerah/ Pendapatan Daerah X 100
 $\text{Rp.155,130,923,650.44/Rp.1,053,768,233,034.44} \times 100 = 14.72\%$

8.2 Pertumbuhan PDRB

Pada Pada tahun 2021 Pertumbuhan PDRB dengan realisasi sebesar 1.29 % dari target 6.37 % tingkat capaian 20.25%, dengan kategori **Kurang**.

9. Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN

9.1 Nilai Investasi PMA dan PMDN

Pada Pada tahun 2021 Nilai Investasi PMA dan PMDN dengan realisasi sebesar Rp.433,958,569,699 dari target Rp.2,095,944,923,908 tingkat capaian 20.70%, dengan kategori **Kurang**.

10. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Keamanan Pangan

10.1 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Pada Pada tahun 2021 Skor Pola Pangan Harapan dengan realisasi sebesar 66.19 dari target 73.00 tingkat capaian 90.67%, dengan kategori **Baik**.

11. Akses terhadap Infrastruktur Jalan

11.1 Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (>20 Km/Jam)

Pada Pada tahun 2021 Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (>20 Km/Jam) dengan realisasi sebesar 62.97% dari target 72.60% tingkat capaian 86.73%, dengan kategori **Baik**.

Panjang jalan kabupaten = 1.226.89 KM, Target dalam kondisi baik 2021 = 890,72 KM.

Realisasi dalam kondisi baik 2021 = 679.217 Km (baik = 560,884 KM, sedang = 118,333 KM) capaian = $(679,217/890,72 \times 100) = 62,97\%$.

12. Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

12.1 Luas Daerah Irigasi (DI) (ha) yang Diairi secara

Kontinyu

Pada Pada tahun 2021 Luas Daerah Irigasi (DI) (ha) yang Diairi secara Kontinyu dengan realisasi sebesar 19.286 ha dari target 19.585 ha tingkat capaian 98.47 %, dengan kategori **Baik**.

12.2 Persentase RT yang Terlayani Air Bersih

Pada Pada tahun 2021 Persentase RT yang Terlayani Air Bersih dengan realisasi sebesar 72.09% dari target 77.92% tingkat capaian 92.52%, dengan kategori **Baik**.

13. Meningkatnya Kualitas Lingkungan

13.1 Persentase RT Terlayani Sanitasi Dasar

Pada Pada tahun 2021 Persentase RT Terlayani Sanitasi Dasar dengan realisasi sebesar 72.81% dari target 43.58% tingkat capaian 167.07%, dengan kategori **Sangat Baik**.

13.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pada pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan tahun 2021 tingkat Kabupaten Manggarai Barat tidak memperoleh nilai dikarenakan salah satu dari tiga indikator IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) tidak memperoleh nilai. Hal ini disebabkan karena dari delapan (8) parameter kualitas air yang wajib diuji hanya tujuh yang bisa dilakukan sedangkan 1 parameternya tidak bisa diuji karena belum terakreditasinya laboratorium di provinsi untuk mengukur terkait parameter kandungan fosfat pada air, sehingga berdampak pada penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan.

14. Meningkatnya Akses Perumahan Layak Huni

14.1 Persentase Rumah Layak Huni

Pada Pada tahun 2021 Persentase Rumah layak huni dengan realisasi sebesar 62.60% dari target 13.54% tingkat capaian 462.33%, dengan kategori **Sangat Baik**.

15. Terwujudnya Sistem Transportasi yang Memadai

15.1 Persentase Sarana Transportasi Terbangun

Pada Pada tahun 2021 Persentase Sarana Transportasi Terbangun dengan realisasi sebesar 87.50% dari target 81.48% tingkat capaian 107.39 %, dengan kategori **Sangat Baik**. Dengan perhitungan sebagai berikut :

Sarana transportasi terbangun dengan target 24 buah, namun realisasi 21 buah $(21/24) \times 100\% = 87,50\%$

16. Meningkatnya Layanan Komunikasi & Informatika

16.1 Persentase Desa/ Kelurahan yang Terakses Telekomunikasi

Pada Pada tahun 2021 Persentase Desa/Kelurahan yang Terakses Telekomunikasi dengan realisasi sebesar 97.00% dari target 100% tingkat capaian 97.00 %, dengan kategori **Baik**.

Tahun 2021 terdapat 5 Desa yang masih blank spot, Desa tersebut adalah Desa Watu Manggar Kecamatan Macang Pacar, Desa Golo Ru'a Kecamatan Ndosso, Desa Rehak Kecamatan Welak, Desa Dunta Kecamatan Welak, dan Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat dengan formula perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Desa/ kelurahan yang terakses} &= \frac{\text{Jumlah Desa/ kelurahan yang terakses}}{\text{Jumlah Desa/kelurahan}} \times 100 \\ \text{Jumlah Desa/kelurahan yang terakses telekomunikasi} &= \frac{164}{169} \times 100 \\ &= 97.00 \% \end{aligned}$$

17. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik

17.1 Nilai AKIP

Realisasi indikator kinerja Nilai AKIP pada tahun 2021 belum dapat dihitung karena masih dalam proses penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021.

17.2 Nilai LPPD

Realisasi indikator Nilai LPPD pada tahun 2020 belum dapat dihitung karena masih dalam proses penyusunan dokumen

LPPD tahun 2021.

17.3 Opini BPK

Pada Pada tahun 2021 indikator Opini BPK dengan realisasi WTP dari target WTP dengan tingkat capaian 100%, dengan kategori **Baik**.

17.4 Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada Pada tahun 2021 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi Baik(82.30) dari target Baik dengan tingkat capaian 100%, dengan kategori **Baik**.

17.5 Indeks Arsip

Pada Pada tahun 2021 indikator Indeks Arsip dengan realisasi 33.33% dari target 43.00% dengan tingkat capaian 77.51%, dengan kategori **Baik**.

18. Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat

18.1 Persentase Penegakan Perda

Pada tahun 2021, Persentase Penegakan Peraturan Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%, tingkat capaian 100 % dengan kategori **Baik**. Dengan formula pengukuran :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Penegakan Peraturan Daerah} &= \frac{\text{Jumlah Perda yg memuat sanksi yang ditegakan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda yg memuat sanksi}} \times 100 \\ &= \frac{33 \text{ Perda}}{33 \text{ Perda}} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

18.2 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Pada Pada tahun 2021 indikator Angka Kriminalitas yang Tertangani dengan realisasi 0.05% dari target 0.23 % dengan tingkat capaian 460%, dengan kategori **Sangat Baik**. Pada tahun 2021 tercatat ada 5 kasus kriminalitas yang terpantau oleh Badan Kesbangpol dan semuanya sudah tertangani.

19. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat

19.1 Persentase Keikutsertaan Wajib Pilih dalam Pemilu

Pada tahun 2021 secara umum Kabupaten Manggarai Barat tidak melaksanakan pemilihan umum, karena pemilihan Kepala Daerah telah dilaksanakan pada tahun 2020.

20. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Persentase Desa yang Mengalami Kenaikan Status Desa (Berkembang ke Maju)

20.1 Desa yang Mengalami Kenaikan Status Desa (Berkembang ke Maju)

Pada tahun 2021, Persentase Desa yang Mengalami Kenaikan Status Desa (Berkembang ke Maju) dengan realisasi sebesar 4.44% dari target 1,83 % dengan tingkat capaian 242,62 % dengan kategori **Sangat baik**. Dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Desa yang Mengalami Kenaikan Status Desa (Berkembang ke Maju)} &= \frac{\text{Desa Maju}}{\text{Desa berkembang}} \times 100 \\ &= \frac{2}{45} \times 100 \\ &= \mathbf{4.44} \end{aligned}$$

e. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah suatu ukuran keberhasilan program dan kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang akan tercapai. Adapun penggunaan sumber daya dikaitkan dengan kinerja yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

- Jumlah anggaran yang disediakan untuk urusan pemerintahan bidang pendidikan Rp.263.103.684.158 dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga Rp.2.476.637.780 dengan jumlah ASN sebanyak 1974 orang, yang terdiri dari Pegawai dan Guru.
- Jumlah anggaran yang disediakan untuk urusan pemerintahan bidang kesehatan Rp.210.272.183.982 dengan jumlah ASN sebanyak 801 orang, yang terdiri dari Pegawai dan Tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Komodo.
- Jumlah anggaran yang disediakan untuk urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Rp.3.159.787.520 dengan jumlah ASN sebanyak 20 orang.

- Jumlah anggaran yang disediakan untuk urusan pemerintahan bidang sosial Rp.4.700.640.300 dengan jumlah ASN sebanyak 18 orang.
- Jumlah anggaran yang disediakan untuk urusan pemerintahan bidang perpustakaan Rp.731.400.760 dengan jumlah ASN sebanyak 24 orang.
- Jumlah anggaran yang disediakan untuk urusan pemerintahan bidang Kebudayaan Rp.2.952.529.500 dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata Rp.7.503.500.881 dengan jumlah Sumber Daya Manusia (ASN) sebanyak 24 orang.
- Jumlah anggaran yang disediakan untuk unsur penunjang urusan pemerintahan (Keuangan), program pengelolaan pendapatan daerah Rp.2.204.709.470 dengan jumlah Sumber Daya Manusia (ASN) sebanyak 43 orang.
- Jumlah anggaran yang disediakan untuk urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah Rp.328.718.430 urusan pemerintahan bidang perdagangan Rp.2.241.633.250 urusan pemerintahan bidang perindustrian Rp.2.033.684.510 dengan jumlah Sumber Daya Manusia (ASN) sebanyak 17 orang.
- Jumlah anggaran yang disediakan untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal Rp.4.645.829.900 dengan jumlah Sumber daya manusia (ASN) sebanyak 33 orang.
- Jumlah anggaran yang disediakan untuk urusan pemerintahan bidang pangan Rp.3.380.115.190 urusan pemerintahan bidang pertanian Rp.44.320.242.080 dengan jumlah Sumber Daya Manusia (ASN) sebanyak 33 orang.

f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target dan Kinerja.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 sebagai berikut:

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.	Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
5.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
12.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
13.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
14.	Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
15.	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
16.	Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
17.	Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
18.	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
19.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
20.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
21.	Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
22.	Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
23.	Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
24.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
25.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
26.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
27.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan pendapatan Daerah
28.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
29.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
30.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
31.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
32.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkh)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
33.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
34.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
35.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
36.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
37.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
38.	Pengembangan iklim penanaman modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
39.	Promosi penanaman modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

40.	Pelayanan penanaman modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
41.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
42.	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
43.	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
44.	Penanganan kerawanan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
45.	Pengawasan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
46.	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian
		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
47.	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
48.	Perizinan usaha pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
49.	Penyuluhan pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
50.	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

**BAB
III**

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN**

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah
Kabupaten Manggarai Barat.**

No.	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kementerian Keuangan	PMK 69/PMK.07. 2021	Program: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan: Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan. Keluaran: Dana Desa untuk 164 Desa. Rincian Kegiatan: Transfer Dana Desa ke 164 Desa.	Labuan Bajo	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	149.502.115.000	149.502.115.000	100	Terealisasinya Dana Desa ke 164 Desa	100	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab./ Kota	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	SP DIPA-018.08.4.2491 65/2021 Tanggal 23 November 2020	Program: Kegiatan Pengembangan Saluran Irigasi/Dam Parit. Kegiatan: Kelompok Tani yang menerima Pengembangan Saluran Irigasi/ Dam Parit.	Manggarai Barat	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan						
			a. Kelompok tani Lingko Watu Mese, luas lahan 27 dan volumenya Panjang saluran 181 m, lbr 40 cm, tinggi 40 cm, tebal 30 cm			153.495.000	153.495.000	100	100	100	
			b. Kelompok tani Bantang Cama, luas lahan 25 dan volumenya Panjang Saluran 195 m, lbr 40 cm, tinggi 40 cm, tebal 30 cm			142.125.000	142.125.000	100	100	100	
			c. Kelompok tani Rangkang V, luas lahan 25 dan volumenya Panjang Saluran 190 m, lbr 40 cm, tinggi 40 cm, tebal 30 cm			142.125.000	142.125.000	100	100	100	

			d. Kelompok tani Lengkong Keramak, luas lahan 28 dan volumenya Panjang Saluran 200 m, lbr 40 cm, tinggi 40 cm, tebal 30 cm, saluran tanah, Panjang 174 m, lbr 20 cm, tinggi 20 cm			159.180.000	159.180.000	100	100	100	
			e. Kelompok tani Golo Garang, luas lahan 28 dan volumenya Panjang Saluran 202 m, lbr 40 cm, tinggi 40 cm, tebal 25 cm			159.180.000	159.180.000	100	100	100	
			f. Kelompok Tani Tenda, luas lahan 25 dan volumenya Panjang Saluran 202 m, lbr 40 cm, tinggi 40 cm, tebal 25 cm			142.125.000	142.125.000	100	100	100	
			g. Kelompok Tani Flamboyan, luas lahan 25 dan volumenya Panjang Saluran 183 m, lbr 40 cm, tinggi 40 cm, tebal 30 cm			142.125.000	142.125.000	100	100	100	
			h. Kelompok Tani Nggernggug, luas lahan 27 dan volumenya Panjang Saluran 180 m, lbr 1 m, tinggi 50 cm, tebal 25 cm			153.495.000	153.495.000	100	100	100	
			i. Kelompok Tani Suka Maju, luas lahan 33 dan volumenya Pasangan Batu Kali bagian kanan 34,87 m, bagian kiri 14 m, Pasangan batu kali untuk limpasan 7,74 m, Pasangan batu kali untuk sayap 6,4			187.605.000	187.605.000	100	100	100	

			m, tambahan pasangan batu kali untuk sayap 2,5m, luas lantai pasangan batu 11 x 16 x 0,25 m								
			Jumlah			1,381,455,000	1,381,455,000	100	100	100	
			Kegiatan: Pembangunan Irigasi Perpompaaan/ Perpipaan	Manggarai Barat	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan						
			a. Kelompok tani Sedang Mekar, luas lahan 25 dan volumenya 1 unit irigasi perpompaaan dengan ukuran: selang spiral 4 dim p 17 m, pipa HDPE 2 dim p 500 m, pipa HDPE 3 dim p 200 m, rumah mesin 2m X 3m X 2,5m, bak 3m X 3m X 1,5m kapasitas tampung 13,5m ³ , mesin Kubota 4 dim dengan water poom.			142.125.000	142.125.000	100	100	100	
			b. Kelompok tani Maju Bersama, luas lahan 27 dan volumenya 1 unit irigasi perpipaan dengan ukuran: pipa HDPE 1,5 p 1.350m, pipa HDPE 2 dim p 250m, bak 3m X 3m X 1,5m kapasitas tampung 13,5m ³ .			153.495.000	153.495.000	100	100	100	

			c. Kelompok tani cinta Damai, luas lahan 27 dan volumenya 1 unit irigasi perpompaaan dengan ukuran: selang spiral 4 dim p 17m, pipa HDPE 1,5 p 200m, pipa HDPE 2 dim p 700m, pipa HDPE 3 dim p 50m, rumah mesin 2m X 3m X 2,5m, bak 3m X 3m X 1,5m kapasitas tampung 13,5m3, mesin Kubota 4 dim dengan water poom.			153.495.000	153.495.000	100	100	100	
			d. Kelompok tani Mekar Jaya, luas lahan 38 dan volumenya 1 unit irigasi perpompaaan dengan ukuran: selang spiral 4 dim p 17m, pipa HDPE 1,5 p 200m, pipa HDPE 2 dim p 650m, pipa HDPE 3 dim p 50m, rumah mesin 2m X 3m X 2,5m, bak 3m X 3m X 1,5m kapasitas tampung 13,5m3, mesin Kubota 4 dim dengan water poom.			216.030.000	216.030.000	100	100	100	
			e. Kelompok tani Sub Mekar Jaya, luas lahan 28 dan volumenya 1 unit irigasi perpompaaan dengan ukuran: selang spiral 4 dim p 17m, pipa HDPE			159.180.000	159.180.000	100	100	100	

			1,5 p 200m, pipa HDPE 2 dim p 500m, pipa HDPE 3 dim p 50m, rumah mesin 2m X 3m X 2,5m, bak 3m X 3m X 1,5m kapasitas tampung 13,5m3, mesin Kubota 4 dim dengan water poom.								
			f. Kelompok tani Golo Kaca, luas lahan 28 dan volumenya 1 unit irigasi perpompaaan dengan ukuran: selang spiral 4 dim p 17m, pipa HDPE 1,5 p 200m, pipa HDPE 2 dim p 650m, pipa HDPE 3 dim p 50m, rumah mesin 2m X 3m X 2,5m, bak 3m X 3m X 1,5m kapasitas tampung 13,5m3, mesin Kubota 4 dim dengan water poom.			159.180.000	159.180.000	100	100	100	
			g. Kelompok tani Baeng Koe, luas lahan 25 dan volumenya 1 unit irigasi perpompaaan dengan ukuran: selang spiral 4 dim p 17m, pipa HDPE 1,5 p 200m, pipa HDPE 2 dim p 500m, pipa HDPE 3 dim p 50m, rumah mesin 2m X 3m X 2,5m, bak 3m X 3m X 1,5m kapasitas tampung 13,5m3,			142.125.000	142.125.000	100	100	100	

			mesin Kubota 4 dim dengan water poom.								
			h. Kelompok tani Lestari, luas lahan 34 dan volumenya 1 unit irigasi perpompaan dengan ukuran: selang spiral 4 dim p 17m, pipa HDPE 1,5 p 200m, pipa HDPE 2 dim p 500m, pipa HDPE 3 dim p 50m, rumah mesin 2m X 3m X 2,5m, bak 3m X 3m X 1,5m kapasitas tampung 13,5m ³ , mesin Kubota 4 dim dengan water poom.			193.290.000	193.290.000	100	100	100	
			i. Kelompok tani Nggermol, luas lahan 25 dan volumenya 1 unit irigasi perpompaan dengan ukuran: saluran irigasi p 80m, tinggi 40cm, lebar 40cm, selang spiral 4 dim p 17m, pipa HDPE 3 dim p 50m, rumah mesin 2m X 3m X 2,5m, mesin Kubota 4 dim dengan water poom.			142.125.000	142.125.000	100	100	100	
			j. Kelompok tani Bintang Harapan, luas lahan 50 dan volumenya 1 unit irigasi perpompaan dengan ukuran: selang spiral 4 dim p 18m, pipa HDPE			284.250.000	284.250.000	100	100	100	

			1,5 p 750m, pipa HDPE 2 dim p 1.800m, pipa HDPE 3 dim p 50m, rumah mesin 2m X 3m X 2,5m, bak 3m X 3m X 1,5m kapasitas tampung 13,5m3, mesin Kubota 4 dim dengan water poom.								
			k. Kelompok tani Harapan, luas lahan 40 dan volumenya 1 unit irigasi perpompaaan dengan ukuran: selang spiral 4 dim p 17m, pipa HDPE 1,5 p 550m, pipa HDPE 2 dim p 1100m, pipa HDPE 3 dim p 150m, rumah mesin 2m X 3m X 2,5m, bak 3m X 3m X 1,5m kapasitas tampung 13,5m3, mesin Kubota 4 dim dengan water poom.			227.400.000	227.400.000	100	100	100	
			l. Kelompok tani Ca Nai Tembel, luas lahan 10 dan volumenya 1 unit irigasi perpompaaan dengan ukuran: selang spiral 4 dim p 17m, pipa 1,5 dim dari rumah mesin ke bak 1 p 11m, dari bak 1 ke bak 2 p 135m, pipa 2 dim p 150m, rumah mesin terbuat dari			56.850.000	56.850.000	100	100	100	

			zink ukuran 2 X 3m, bak 1 ukuran 1,5 X 1,5 X 1m, memiliki kapasitas tampung 2,25m3, bak 2 memiliki kapasitas tampung 2,25m3, mesin kubota 3 dim.								
			Progran: Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida. Kegiatan: Penyusunan e- RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	Manggarai Barat	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan						
			a. Belanja bahan:			28.115.000	28.115.000	100	100	100	
			- ATK/ Foto copy/ Komputer Supplies			1.365.000	1.365.000	100	100	100	
			- Perbanyak pedoman umum			500.000	500.000	100	100	100	
			- Dukungan pulsa tim pendata dan input RDKK			25.200.000	25.200.000	100	100	100	
			- Dukungan pulsa tim admin Kabupaten			1.050.000	1.050.000	100	100	100	
			b. Belanja Honor output kegiatan:			105.000.000	105.000.000	100	100	100	
			- Honor admin Kabupaten (2 org X 6 bln)			4.200.000	4.200.000	100	100	100	
			- Honor tim pendata dan input RDKK (4 org X 6 blnX 12 Kec)			100.800.000	100.800.000	100	100	100	
			c. Belanja Perjalanan biasa:			8.400.000	8.100.000	96	96	96	
			- Pengawalan/monito ring/ koordinasi			3.900.000	3.600.000	92	92	92	
			- Konsultasi dan koordinasi ke Provinsi			4.500.000	4.500.000	100	100	100	

			d. Belanja Perjalanan Dinas paket Meeting Dalam Kota:			11.520.000	11.520.000	100	100	100	
			- Konsumsi rapat			1.920.000	1.920.000	100	100	100	
			- Transport peserta			9.600.000	9.600.000	100	100	100	
			Kegiatan: Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi	Manggarai Barat	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan						
			a. Belanja Bahan:			2.120.000	2.120.000	100	100	100	
			- ATK/Fcopy/ Komputer Supplies			1.520.000	1.520.000	100	100	100	
			- Perbanyak pedoman umum			600.000	600.000	100	100	100	
			b. Belanja Honor output kegiatan:			74.250.000	74.250.000	100	100	100	
			- Honor Tim Pembina Kabupaten (3 org X 11 bln)			8.250.000	8.250.000	100	100	100	
			- Honor tim verval Kecamatan (2 org X 11 blnX 12 Kec)			66.000.000	66.000.000	100	100	100	
			c. Belanja Perjalanan biasa:			8.100.000	8.100.000	100	100	100	
			- Pengawasan/monito ring/evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi			4.500.000	4.500.000	100	100	100	
			- pengawasan Verval penyaluran pupuk bersubsidi (tim Kecamatan)			3.600.000	3.600.000	100	100	100	
			d. Belanja Perjalanan Dinas paket Meeting Dalam Kota:			11.100.000	11.100.000	100	100	100	
			- Konsumsi rapat			2.100.000	2.100.000	100	100	100	
			- Transport peserta			9.000.000	9.000.000	100	100	100	
			Kegiatan: Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan	Manggarai Barat	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan						

			a. PIP Kedelai seluas 20 ha berupa Benih, Pupuk NPK dan Rizobium			314.300.000	314.300.000	100	100	100	
			b. Jagung ABT seluas 1000 ha berupa benih			630.000.000	630.000.000	100	100	100	
			c. Bantuan Budi Daya Gizi (Biofortifikasi) seluas 100 ha berupa benih			1.082.500.000	200.000.000	18,48	18,48	18,48	
			d. Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BT) Padi Inbrida seluas 10 ha berupa benih			16.750.000	16.750.000	100	100	100	
			e. Padi Inbrida Sawah seluas 4500 ha berupa benih			1.181.250.000	1.181.250.000	100	100	100	
			f. Budidaya SORGUM seluas 50 ha berupa Pupuk NPK (Kegiatan tidak berjalan karena tidan tersedianya Benih)			51.500.000	41.000.000	79,61	79,61	79,61	

3.3 Permasalahan dan Kendala.

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Manggarai Barat tidak mengalami permasalahan dan kendala yang signifikan selama tahun 2021.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut.

Tidak adanya permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Kabupaten Manggarai Barat tidak memiliki saran maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan selama tahun 2021.

A. Bidang Urusan Pendidikan**1. Jenis Pelayanan Dasar.**

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- Pendidikan Anak Usia Dini: Usia 5 (lima) s/d 6 (enam) tahun;
- Pendidikan Dasar: Usia 7 (tujuh) s/d 15 (lima belas) tahun;
- Pendidikan Kesetaraan: Usia 7 (tujuh) s/d 18 (delapan belas) tahun

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah.

Pencapaian SPM Pendidikan oleh Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2016-2021) sebagai berikut:

NO	Program/ Kegiatan SPM	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2021	Pembiayaan
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	

3. Anggaran

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja		Sumber Dana
			Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru	135.056.469,00	916.319.520,00	Dana Insentif Daerah, dan DAU
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	2.576.578.200,00	Dana Insentif Daerah, DAK Fisik, DAU
		Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	583.168.140,00	2.332.672.560,00	Dana Transfer Khusus, DAK Fisik
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	214.958.400,00	DAK Fisik
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	547.599.000,00	2.007.863.000,00	DAK Fisik, DAU
		Pembangunan Sarana dan Peralatan dan Utilitas Sekolah	1.243.079.000,00	1.442.882.100,00	DAK Fisik, DAU
		Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas	269.000.000,00	-	DAK Fisik, DAU
		Pengadaan Mebel Sekolah	530.000.000,00	555.000.000,00	Dana Insentif Daerah, DAU
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	15.204.093.195,00	7.177.163.614,00	DAK Non Fisik- BOS Reguler
		Pengadaan Alat Praktek dan peraga siswa	-	1.145.000.000,00	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD

		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	238.429.360,00	-	DAU
		Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	48.314.960,00	-	DAU
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan sekolah Dasar	270.405.880,00	-	DAU
		Pengembangan Karier Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan sekolah Dasar	160.108.920,00	-	DAU
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	404.857.880,00	-	DAU
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	-	411.279.700,00	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	295.100.000,00	2.186.450.880,00	Dana Insentif Daerah, DAU
		Penambahan Ruang Kelas Baru	-	888.350.700,00	DAK Fisik, DAU
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100.000.000,00	1.140.000.000,00	DAU

		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	481.310.850,00	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	227.546.850,00	DAK Fisik
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	244.000.000,00	1.090.100.000,00	Dana Insentif Daerah, DAK Fisik, DAU
		Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Sekolah	589.375.270,00		DAU
		Pengadaan Mebel Sekolah	135.000.000,00	655.000.000,00	Dana Insentif Daerah, DAU
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	12.942.342.768,00	4.239.852.587,00	DAK Non Fisik, BOS Reguler
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	410.193.240,00	-	DAU
		Penyiapan dan Tindaklanjuti Evaluasi Satuan Pendidikan SMP	30.265.000,00	-	DAU
		Penyiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan SMP	98.905.000,00	-	DAU
		Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Pendidikan SMP	19.830.000,00	-	DAU

		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	104.766.140,00	-	DAU
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	-	247.023.730,00	DAK Fisik
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	119.711.000,00	404.036.901,00	DAK Fisik, DAU
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.013.600.000,00	-	DAK Non Fisik- BOP PAUD
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	-	60.000.000,00	DAK Fisik
		Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan PAUD	60.878.200,00	-	DAU
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD	130.282.300,00	-	DAU
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	558.455.000,00	-	DAU
4.	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/kesejahteraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	345.900.000,00	-	DAK Fisik, BOP Pendidikan Kesetaraan

		Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/ Keseraraan	118.535.000,00	-	DAU
		Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan di pendidikan non formal/kese taran	85.060.000,00	-	DAU
		Penyediaan Pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal/kese taran	135.049.400,00	-	DAU
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/ Kesetaraan	58.643.760,00	-	DAU
5.	Penetapan Kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	14.400.000,00	-	DAU
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8.730.000,00	-	DAU
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	32.400.000,00	-	DAU

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas PKO TA. 2021

4. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM Pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal baik personil Dinas Pendidikan maupun tenaga Pendidik. Adapun dukungan personil sebagai berikut:

No	Personil	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	S2 S1 D4 D3 DI SPG SMA	2 Orang 24 Orang - 4 Orang 1 Orang 2 Orang 4 Orang	
2.	Tenaga Kontrak Daerah	S2 S1 D4 D3 D2 SMA	- 18 Orang - 1 Orang 1 Orang 20 Orang	

5. Hasil Capaian

Realisasi capaian SPM bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Program/ Kegiatan SPM	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2021		Realisasi Capaian Tahun 2021	
			Orang	%	Orang	%
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	10.753	100 %	2.773	25,79%
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	52.456	100 %	54.183	103,29 %

3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	67.077	100 %	773	115,24 %
----	-----------------------	--	--------	-------	-----	----------

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Kendala dan Permasalahan

- Ketersediaan data yang kurang menunjang dalam merumuskan kebijakan dalam pendidikan PAUD;
- Belum maksimalnya Satuan Pendidikan memahami dan memanfaatkan DAPODIK sebagai sumber data pendidikan secara nasional, sehingga keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan ataupun pihak lain yang memanfaatkan DAPODIK sebagai sumber data untuk perencanaan belum maksimal;
- Belum terealisasinya 1 Desa 1 PAUD;
- Keterbatasan Anggaran mengakibatkan upaya peningkatan kualitas guru belum maksimal.

b. Solusi Permasalahan

- Melakukan upaya pendataan sasaran PAUD,
- Ketersediaan Anggaran untuk melakukan sosialisasi cara pengisian DAPODIK yang benar kepada semua Satuan Pendidikan;
- Mendorong Pemerintah Desa dan Stakeholder lainnya untuk membuka Lembaga PAUD;
- Mendorong Guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru secara mandiri, antara lain melalui Pelatihan Profesi Guru (PPG), dan Guru Penggerak.

B. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- Pelayanan kesehatan Ibu bersalin;
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- Pelayanan kesehatan balita;
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
- Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency Virus*).

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah.

Pencapaian SPM Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2016-2021) sebagai berikut:

NO	Program/ Kegiatan SPM	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2021	Pembiayaan
1.	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	100%	
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard	100%	

3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
4.	Pelayanan kesehatan Balita	jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	jumlah layanan hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	jumlah Penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	jumlah orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodeficiency Virus)	jumlah pelayanan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	100%	

Sumber: RPJMD periode 2016-2021

3. Anggaran

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja		Sumber Dana
			Belanja Operasi	Belanja Modal	
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah Kab/kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Rp.1.274.342.000,00	-	DAK non Fisik, DAU
		Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rp.3.568.610.000,00	-	DAK non Fisik, DAU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Rp. 48.800.000,00	-	DAK non Fisik, DAU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan balita	Rp. 37.900.000,00	-	DAK non Fisik, DAU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rp.455.540.501,00	-	DAK non Fisik, DAU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Rp.74.900.000,00	-	DAK non Fisik
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Rp. 850.800.000,00	-	DAK non Fisik, DAU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi	Rp. 58.300.000,00	-	DAK non Fisik, DAU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada pasien diabetes melitus	Rp. 42.900.000,00	-	DAK non Fisik
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada ODGJ berat	Rp. 54.900.000,00	-	DAK non Fisik, DAU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada orang tuberkulosis	Rp. 248.405.000,00	-	DAK non Fisik, DAU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV	Rp.55.700.000,00	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Kesehatan TA. 2021

4. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM Kesehatan di Kabupaten Manggarai Barat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal baik personil Dinas Kesehatan maupun tenaga kesehatan. Adapun dukungan personil sebagai berikut:

No	Personil	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	S2 SI D IV SMA SMP	3 Orang 124 Orang 18 Orang 19 Orang -	
2.	Tenaga Kontrak Daerah	S2 SI D IV SMA SMP	- 90 Orang 9 Orang 70 Orang 11 Orang	

Sumber: Data Pegawai Dinas Kesehatan tahun 2021

5. Hasil Capaian

Realisasi capaian SPM bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Program/ Kegiatan SPM	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2021		Realisasi Capaian Tahun 2021	
			Orang	%	Orang	%
1.	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	6.117	100%	4.426	72.36%
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	6.116	100%	5.276	86.27%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.825	100%	5.220	89.61%
4.	Pelayanan kesehatan Balita	jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	27.515	100%	2.388	8.69%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	18.873	100%	9.735	51.58%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	172.622	100%	137.741	79.79%

7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	24.757	100%	17.673	71.39%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	jumlah layanan hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	56.997	100%	18.129	31.81%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	jumlah Penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	763	100%	608	79.69%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	477	100%	262	54.93%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	jumlah orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1.586	100%	1586	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	jumlah pelayanan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	7.213	100%	4195	58.16%

Sumber: Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Proses Pengumpulan data untuk mengevaluasi kegiatan masih belum optimal terutama dalam hal ketepatan waktu laporan serta kurangnya pemahaman akan definisi operasional dari masing-masing indikator.
- Kurangnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Kesehatan di kabupaten Manggarai Barat.
- Belum adanya pengelola atau penanggungjawab khusus pelaporan SPM di tingkat Puskesmas.
- Perhitungan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program SPM Bidang belum dilakukan secara baik.

b. Solusi Permasalahan

- Meningkatkan kualitas SDM kesehatan dengan berbagai pelatihan.
- Laporan SPM dibuat dan dikirim langsung dari Puskesmas ke Pengelola SPM Kabupaten. Menunjuk pengelola SPM di tingkat Puskesmas.

- Perencanaan penganggaran dan perhitungan kebutuhan SPM Bidang Kesehatan menggunakan Aplikasi Siscobikes (system costing biaya kesehatan).

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum.

1. Jenis Pelayanan Dasar.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
Penerima pelayanan dasar adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
Penerima pelayanan dasar adalah Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

2. Target capaian SPM oleh Daerah

Pencapaian SPM Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2016-2021) sebagai berikut:

NO	Program/ Kegiatan SPM	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2021	Pembiayaan
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	

2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100%	
----	---	---	------	--

Sumber: RPJMD periode 2016-2021

3. Anggaran

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja		Sumber Dana
			Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	
1.	Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum SPAM di daerah Kabupaten/ kota	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan	11.363.366.633	-	DAK Fisik bidang air minum, DAU
2.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/ kota	Pembangunan/ penyediaan sub system pengolahan setempat	1.544.400.000	-	DAK Fisik Sanitasi, DAU

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan TA. 2021

4. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM Pekerjaan Umum di Kabupaten Manggarai Barat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal. Adapun dukungan personil sebagai berikut:

No	Personil	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	S2	2 Orang	
		S1	18 Orang	
		D IV	10 Orang	
		SMA	9 Orang	
		SMP	-	
2.	Tenaga Kontrak Daerah	S2	-	
		S1	8 Orang	
		D IV	2 Orang	
		SMA	10 Orang	
		SMP	-	

Sumber: Data Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2021

5. Hasil Capaian

Realisasi capaian SPM bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Program/ Kegiatan SPM	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2021		Realisasi Capaian Tahun 2021	
			Rumah	%	Rumah	%
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	263.554	100%	184.357	69.95%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	49.886	100%	36.892	74,13%

6. Kendala Permasalahan dan Solusi.

a. Permasalahan:

- Masalah social : dalam pelaksanaan kegiatan air minum, yang menjadi kendala sosial yaitu terkait dengan pembebasan lahan untuk jaringan perpipaan dan pembangunan bak reservoir. Banyak masyarakat yang keberatan untuk memberikan lahan. Hal ini

kemudian yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan air minum;

- Masalah sumber daya: dalam pelaksanaan kegiatan air minum, sering kali terjadi di lapangan terkait dengan kekurangan debit air dari mata air yang ditentukan;
- Masalah manajemen: setelah pelaksanaan paket pekerjaan air minum, desa terkait sering kewalahan dalam melakukan manajemen pemeliharaan terkait dengan air minum tersebut.

b. Solusi Permasalahan:

- Masalah sosial: masalah ini diatasi dengan melakukan mediasi terhadap beberapa warga yang terdampak pembangunan.
- Masalah sumber daya: masalah ini diatasi dengan mencari sumber mata air lainnya untuk menambah debit air.
- Masalah manajemen: masalah ini diatasi dengan melakukan sosialisasi terkait dengan pola manajemen yang baik untuk dilakukan.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota. Penerima pelayanan dasar adalah setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
- Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Penerima pelayanan dasar adalah setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.

Pencapaian SPM Perumahan Rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2016-2021) sebagai berikut:

NO	Program/ Kegiatan SPM	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2021	Pembiayaan
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	

Sumber: RPJMD periode 2016-2021

3. Alokasi Anggaran.

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja		Sumber Dana
			Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	
1.	Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Perbaikan Rumah tidak layak huni	3.391.725.000	-	DAK Fisik, DAU

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan TA. 2021

4. Dukungan Personil.

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM Perumahan rakyat di Kabupaten Manggarai Barat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal baik. Adapun dukungan personil sebagai berikut:

No	Personil	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	S2 S1 D IV SMA SMP	2 Orang 18 Orang 10 Orang 9 Orang -	
2.	Tenaga Kontrak Daerah	S2 S1 D IV SMA SMP	- 8 Orang 2 Orang 10 Orang -	

Sumber: Data Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

5. Hasil Capaian

Realisasi capaian SPM bidang Perumahan Rakyat Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Program/ Kegiatan SPM	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2021		Realisasi Capaian Tahun 2021	
			Rumah	%	Orang	%
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	N/A	100 %	100	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	N/A	100 %	0	0%

Sumber: Realisasi Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2021

6 Kendala Permasalahan dan Solusi:

a. Permasalahan:

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, masalah yang dihadapi yaitu terkait dengan kesiapan warga untuk melakukan swakelola. Banyak penerima

bantuan yang kewalahan untuk menambah dana pribadi dalam mendukung program peningkatan kualitas ini akhirnya seringkali terhambat pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni.

b. Solusi:

Masalah ini dihadapi dengan melakukan sosialisasi serta motivasi kepada masyarakat agar bisa menambah swakelola supaya kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan lancar.

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Penerima pelayanan dasar adalah warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota.
- Pelayanan Informasi rawan Bencana;
Penerima pelayanan dasar adalah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
Penerima pelayanan dasar adalah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana.
- Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
Penerima pelayanan dasar adalah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan tempat terjadinya bencana.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran;
Penerima pelayanan dasar adalah warga Negara yang menjadi korban

kebakaran atau terdampak kebakaran.

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.

Target Pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2016-2021) sebagai berikut:

NO	Program/ Kegiatan SPM	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2021	Pembiayaan
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kab/kota	100%	
2.	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh informasi Rawan Bencana	100%	
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	

Sumber: RPJMD periode 2016-2021

3. Anggaran

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja		Sumber Dana
			Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	
1.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	996.324.100	-	DAU
		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	6.250.000	-	DAU
2.	Pelayanan Informasi rawan bencana Kabupaten/kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten Kota (per jenis bencana)	28.730.000	-	DAU
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	222.230.000	-	DAU
4.	Pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/kota	Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	82.115.000	-	DAU
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	779.664.080	-	DAU
5.	Pencegahan dan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan bahaya beracun kebakaran dalam Daerah Kab/kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kab/kota	30.000.000	-	DAU

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Polisi Praja dan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah TA. 2021

4. Jumlah Personil.

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan di Kabupaten Manggarai Barat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal baik. Adapun dukungan personil sebagai berikut:

- **Data Pegawai Satpol PP**

No	Personil	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	PNS	S2	-	
		S1	13	
		DIII	3	
		D IV	12	
		SMA	-	
		SMP	-	
		SD	1	

2.	Tenaga Kontrak Daerah	S2	-	
		S1	25	
		D IV	-	
		DIII	8	
		SMA	78	
		SMP	-	
		SD	1	

Sumber Data Satuan Polisi Praja

• Data Pegawai BPBD

No	Personil	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	S2 S1 D III SMA SMP	- 13 Orang 2 Orang 5 Orang 0 Orang	
2.	Tenaga Kontrak Daerah	S2 S1 D III SMA SMP	- 2 Orang 1 Orang 8 Orang -	

Sumber: Data Pegawai Badan Penanggulangan Bencana

5. Hasil Capaian.

Realisasi capaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Program/ Kegiatan SPM	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2021		Realisasi Capaian Tahun 2021	
			Orang	%	Orang	%
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kab/kota	N/A	100%	10 Orang	80,67%
2.	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh informasi Rawan Bencana	20 Titik	100%	9 Titik	45%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Kec	100%	12 Kec	100%

4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	104 Laporan	100%	54 Laporan	51,92%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	N/A	100%	883 Orang	100%

Sumber: Realisasi Satpol PP dan BPBD Tahun 2021

6. Kendala Permasalahan dan Solusi.

- Permasalahan:
 - Kurangnya Alokasi Anggaran Bencana terutama berkaitan dengan sosialisasi, pelatihan mitigasi.
 - Recofusing anggaran
 - Kurangnya kualitas SDM penanganan Bencana
 - Kurangnya Sarana Prasarana pendukung Penanggulangan Bencana
- Solusi:

Penambahan Anggaran baik alokasi DAU maupun dari bantuan lembaga-lembaga peduli bencana, LSM siap siaga yang merupakan Mitra BNPB.

F. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti dan;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.

Pencapaian SPM Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2016-2021) sebagai berikut:

NO	Program/ Kegiatan SPM	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2021	Pembiayaan
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti dan	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat	100%	

Sumber: RPJMD periode 2016-2021

3. Alokasi Anggaran.

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Sosial Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Belanja		Sumber Dana
			Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Penyediaan Permakanan	92.505.000,00	-	DAU
		Penyediaan Alat Bantu	77.940.000,00	-	DAU
2.	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Penjangkauan anak-anak terlantar	2.220.000,00	-	DAU
3.	Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/kota	Pengelolaan Data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/kota	8.250.000,00	-	DAU
		Fasilitasi Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga	1.692.467.130,00	11.000.000,00	DAU
4.	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Penyediaan Sandang	173.770.000,00	-	DAU
5.	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kab/kota	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	96.340.000,00	-	DAU

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Sosial TA. 2021

4. Dukungan Personil.

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM Sosial di Kabupaten Manggarai Barat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal baik. Adapun dukungan personil sebagai berikut:

No	Personil	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	S2	1 Orang	
		S1	12 Orang	
		D3	3 Orang	
		SMA	2 Orang	
2.	Tenaga Kontrak Daerah	S2	0 Orang	
		S1	5 Orang	
		D3	1 Orang	
		SMA	10 Orang	

Sumber: Data Pegawai Dinas Sosial tahun 2021

5. Hasil Capaian.

Realisasi capaian SPM bidang Sosial Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Program/ Kegiatan SPM	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2021		Realisasi Capaian Tahun 2021	
			Orang	%	Orang	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	16 Orang	100%	43 Orang	1,78%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 Orang	100%	0 orang	0%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	40 Orang	100%	55 Orang	0,34%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti dan	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	50 Orang	100%	0 Orang	0%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat	40 KK/ 19.942 Jiwa	100%	2.194 KK/8.498 Jiwa	100%

Sumber: Realisasi Dinas Sosial Tahun 2021

6. Kendala Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Verifikasi data, monitoring dan evaluasi kegiatan belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran (rasionalisasi 2021);
- Verifikasi data serta pendampingan tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran (rasionalisasi 2021);
- Verifikasi data tidak bisa dilaksanakan secara spesifik dan pemberian bantuan permakanan hanya bisa dilakukan untuk 1 kali pemberian (paket) karena keterbatasan anggaran yang disediakan (rasionalisasi 2021);

- Belum ada data terkait Gelandangan dan Pengemis untuk Kabupaten Manggarai Barat;
- Monitoring, evaluasi dan pendampingan belum bisa dilaksanakan secara optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana darurat bencana serta keterbatasan anggaran yang disediakan (rasionalisasi 2021).

b. Solusi.

- Menyalurkan bantuan berdasarkan permohonan yang masuk serta meningkatkan koordinasi dengan perangkat desa tempat penerima bantuan bermukim;
- Untuk sementara hanya bisa melaksanakan pendampingan untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan menyiapkan perencanaan yang tepat untuk kegiatan tahun selanjutnya;
- Meningkatkan koordinasi dengan Pekerja Sosial dan aparat desa terkait untuk melaksanakan verifikasi data penerima serta menyiapkan juknis dan perencanaan yang lebih baik serta tepat sasaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya;
- Mengoptimalkan penyaluran bantuan CBP untuk masyarakat korban bencana dan tetap melaksanakan pengadaan bantuan bahan bangunan rumah sesuai dengan anggaran yang ada.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Manggarai Barat merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Laporan Tugas Pembantuan, Laporan Tugas Umum Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Capaian kinerja Out Put dan Out Come dari urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun 2021 tergambar dalam berbagai sektor dengan hasil – hasil pembangunan, baik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun yang membutuhkan proses dalam kurun waktu tertentu. Dari capaian hasil pembangunan, belum menjawab semua kebutuhan masyarakat karena keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, SDM serta hambatan lainnya sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Evaluasi dalam bentuk penilaian untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka sinerjitas berbagai stakeholder yakni, Pemerintah Daerah, DPRD, LSM, dunia usaha, akademisi dan komponen masyarakat terkait lainnya sangat penting untuk dilakukan.

Evaluasi untuk penilaian atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Manggarai Barat oleh Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur, menjadi masukan yang sangat mendasar dan berharga dalam rangka perbaikan pada tataran penyesuaian laporan maupun perbaikan kinerja Pemerintah Daerah.

Labuan Bajo, 30 Maret 2022
BUPATI MANGGARAI BARAT

EDISTASIUS ENDI, SE